

31.23  
50e

P 01

**PENGARUH SOSIAL EKONOMI, MOTIVASI DAN SIKAP  
TERHADAP  
PARTISIPASI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR  
PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN TANJUNG  
KABUPATEN BREBES**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Diajukan oleh:  
**M. SOEDianto**  
NIM: D4E 000113

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION  
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (NPWP)  
STATE OF SOUTH SUMATRA

THE  
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (NPWP)  
OF THE TAXPAYER  
IS HEREBY  
DECLARED  
VALID  
FROM THE DATE OF  
ISSUANCE  
UNTIL THE DATE OF  
CANCELLATION  
OR EXPIRATION

UPI	
No. Dat:	2069/T/MAY/01
Tgl.	: 1 sept 2003

STATE OF SOUTH SUMATRA  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION  
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (NPWP)

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION  
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (NPWP)  
STATE OF SOUTH SUMATRA

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

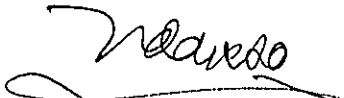
PENGARUH SOSIAL EKONOMI, MOTIVASI DAN SIKAP TERHADAP  
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR  
DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**M. SOEDIANTO**  
**D4E000113**

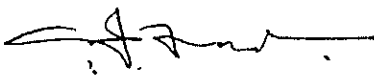
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal : 21 Maret 2003

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji / Pembimbing I

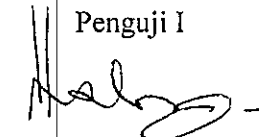
  
**Drs. Sundarso, SU**

Sekretaris Penguji / Pembimbing II


  
**Drs. Hardi Warsono, MTP**

Anggota Tim Penguji :

Penguji I

  
**Prof. Drs. Hartojo**

Penguji II

  
**Dra. Retno Sunu Astuti, MSI**

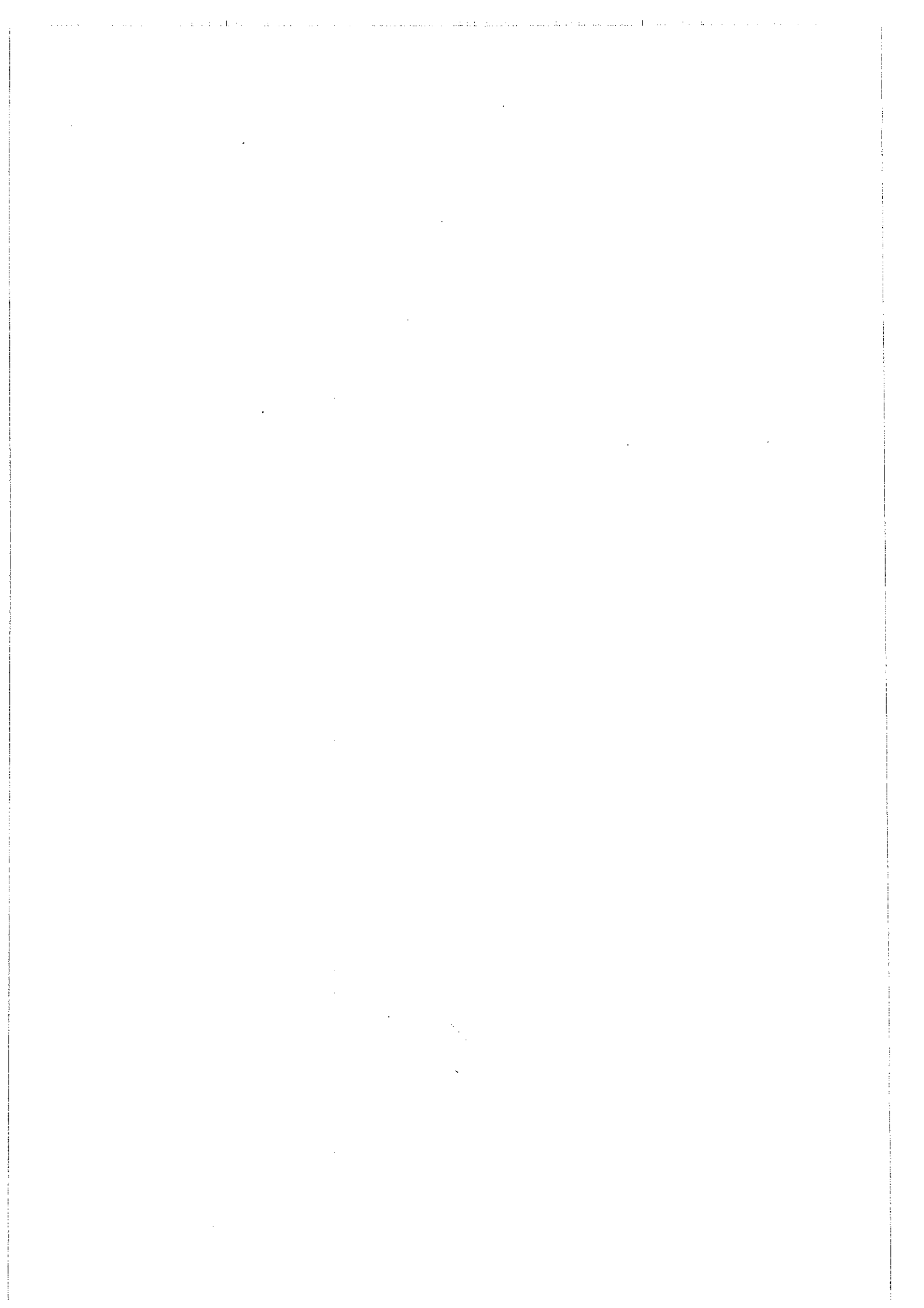
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal : 21 Maret 2003

Ketua Program Studi MAP  
Universitas Diponegoro Semarang



  
**Prof. Desy Warella, MPA, Ph.D**



## RINGKASAN

JUDUL : PENGARUH SOSIAL EKONOMI, MOTIVASI DAN SIKAP TERHADAP PARTISIPASI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES

Wajib Belajar Pendidikan Dasar merupakan program Pemerintah dalam bidang Pendidikan, sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan harapan seluruh warga negara mempunyai tingkat pendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sehingga bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pelaksanaan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan serius, tetapi mempunyai kendala sehingga belum optimal antara lain pemahaman terhadap pendidikan, sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat, budaya setempat, kurangnya daya tampung, sikap dan dorongan untuk menyekolahkan anaknya dan faktor faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, dan berdasarkan asumsi penulis bahwa faktor sosial ekonomi, motivasi dan sikap, dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. sehingga akan dicari apakah ada hubungan positif dan signifikan antara ketiga variabel bebas tersebut dengan partisipasi sebagai variabel tergantung.

Dari hasil penyajian data, dapat dikatakan bahwa hubungan variabel sosial ekonomi dengan partisipasi menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,024 dengan dengan nilai hitung Approx Signifikansi sebesar 0,830, yang berarti ada hubungan positif, dan signifikan, tetapi lemah, dalam arti faktor sosial ekonomi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi partisipasi. Tingkat sosial ekonomi yang tinggi belum tentu mereka berpartisipasi. Hubungan antara motivasi dengan partisipasi, menunjukkan adanya koefisien korelasi sebesar 0,462 dengan Approx. Signifikansi sebesar 0,00 membuktikan bahwa hipotesis dapat diterima atau dapat dikatakan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan partisipasi, artinya semakin tinggi motivasi mereka, akan semakin tinggi tingkat partisipasinya. Sedangkan hubungan variabel sikap dengan partisipasi menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,283, maka dengan Approx. Signifikansi sebesar 0,005, membuktikan bahwa hipotesis dapat diterima, atau ada hubungan yang positif dan signifikan antara sikap dengan partisipasi, artinya semakin tinggi atau semakin positif sikap mereka, akan semakin tinggi tingkat partisipasinya. Konkordansi Kendall diperoleh angka sebesar 0,793, dan Chi – square adalah sebesar 190,247, uji signifikansi ketiga variabel dengan harga tabel Chi-square df. 3, dan pengaruhnya dapat dilihat pada koefisien determinasi sebesar 0,130 atau kalau dilakukan perhitungan

1948

1. The first part of the report deals with the general situation in the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

3. The third part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

4. The fourth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

5. The fifth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

6. The sixth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

7. The seventh part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

8. The eighth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

9. The ninth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

10. The tenth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

1949

1. The first part of the report deals with the general situation in the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

prosentase, maka pengaruh bersama-sama adalah sebesar 13 % yang berarti sebanyak 87 % adalah faktor –faktor di luar model. Dikarenakan sosial ekonomi, pengaruhnya tidak cukup untuk mempengaruhi partisipasi, artinya semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, belum tentu akan semakin tinggi tingkat partisipasinya. Oleh karena itu perlu diteliti variabel lain yang dapat mempengaruhi partisipasi, antara lain Kinerja pemerintah yang menangani wajar, kurangnya sosialisasi serta tidak adanya sanksi yang tegas kepada anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa motivasi menjadi faktor yang paling dominan yang dapat mempengaruhi partisipasi. Implikasi dari hasil penelitian tersebut, apabila ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, agar pelaksanaan program Wajib Belajar dapat berhasil, maka yang paling penting dan diutamakan adalah meningkatkan motivasi masyarakat melalui berbagai cara, dengan memberikan pemahaman akan arti pentingnya pendidikan melalui penyuluhan, contoh dari pemuka masyarakat sehingga dapat menunjukkan sikap yang positif. Dengan motivasi yang tinggi dan sikap yang positif, maka tingkat partisipasi akan dapat meningkat. Namun demikian, untuk lebih menjamin keberhasilan program, faktor sosial ekonomi juga perlu ditingkatkan dengan cara memberdayakan masyarakat melalui UKM dan usaha lainnya, disamping adanya upaya-upaya terhadap faktor lain di luar penelitian yang dapat mempengaruhi partisipasi, perlu dikaji lebih jauh.



## ABSTRAKSI

SOEDIANTO, 2003 : PENGARUH SOSIAL EKONOMI, MOTIVASI DAN SIKAP TERHADAP PARTISIPASI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES

KATA KUNCI : Pentingnya peningkatan Motivasi, dan Sikap terhadap partisipasi Wajar Dikdas.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eskplanatory, dengan mengambil populasi orang tua yang mempunyai anak usia sekolah di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Two Stages Random Sampling*, dengan 80 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan dan data sekunder untuk menjawab permasalahan. Analisa data dilakukan secara kuantitatif dilengkapi dengan kualitatif, dengan menggunakan uji statistik Korelasi Rank Kendall, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosial ekonomi, motivasi dan sikap terhadap pelaksanaan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Hubungan variabel sosial ekonomi dengan partisipasi ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,024 dengan dengan nilai hitung *Approx* Signifikansi sebesar 0,830, yang berarti ada hubungan positif, dan signifikan, tetapi lemah, dalam arti semakin tinggi sosial ekonomi belum tentu mereka berpartisipasi. Hubungan antara motivasi dengan partisipasi, menunjukkan adanya koefisien korelasi sebesar 0,462 dengan *Approx*. Signifikansi sebesar 0,00 dapat dikatakan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan partisipasi, yang berarti semakin tinggi motivasi akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi Sedangkan hubungan variabel sikap dengan partisipasi menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,283 dengan *Approx*. Signifikansi sebesar 0,005, membuktikan ada hubungan yang positif dan signifikan antara sikap dengan partisipasi., yang berarti semakin tinggi sikapnya akan semakin tinggi partisipasi Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan (Koefisien Korelasi :0,793) dengan pengaruh bersama-sama sebesar 13 % (Koefisien determinasi 0,130). Hal ini berarti masih banyak ( 87%) pengaruh variabel lain selain ketiga variabel yang diteliti. Variabel tersebut kemungkinan adalah manfaat program kurang berarti, ataupun kurang jelasnya program maupun faktor kinerja pemerintah. . Dari ketiga variabel bebas tersebut, yang diutamakan untuk digarap adalah peningkatan motivasi agar dapat membentuk sikap positif untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar, disamping meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program.

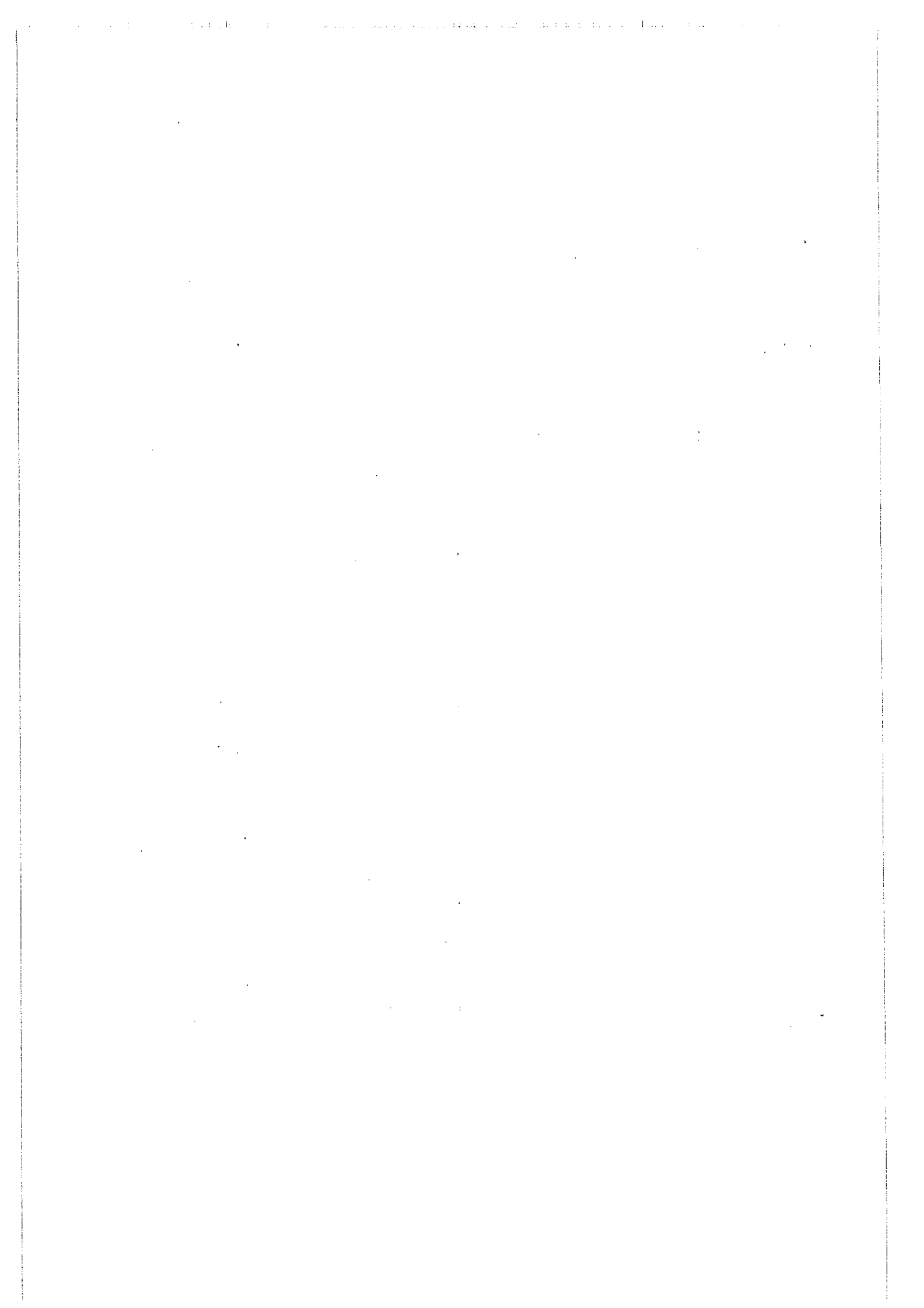


## ABSTRACT

SOEDIANTO, 2003: "SOCIAL ECONOMIC INFLUENCE, MOTIVATION AND ATTITUDE TOWARD THE PARTISIPATION OF COMPULSORY EDUCATION IN TANJUNG DISTRICT BREBES REGENCY "

KEY WORDS : Importantly increasing of motivation, attitude toward participation of compulsory education

This research uses the type of explanatory research by taxing the population the parents who had the sons of education ages in Tanjung District, Brebes Regency, this samples are done by using the Two Stages Random Sampling technique with 80 respondent. Collecting data is done by interviewing, observation, giving questionnaire and taking secondary data to answer the problems. Data analysis is done quantitative and supplement with qualitative, and using by Rank Kendall Correlation Statistic Test, to known how big is the influence of social economic, motivation and attitude toward compulsory education activity in Tanjung District, Brebes Regency. The relation between social economic variable and participation showed that coefficient correlation of 0,024 by significancy Approx of counted value about 0,830. It means that there is any positive correlation and significant, but weak, which means that the higher social economic condition is not guaranted that the society will be participate. The relation between motivation ang paticipation showed that corelation coeficien of 0,462 with significant Approx of 0,00, can be said that motivation has positive influence and significant with participation and its mean higher motivation, can be higher participate too . Mean while, the relation between attitude variable and participation showed that coeficien of 0,283 by significancy Approx of 0,005, can be said that attitude has positive influence and significancy with paticipation, and its mean higher that attitude higher participate.. The ajusted of three variable mean while significant correlation (coefficient correlation : 0,793) and ajusted influence of 13 % (Determination Correlation 0,130). That is way thre was many (87%) factors in the other variable other while three variable in research. This variable maybe the utility of the programs not available, or fixed not the program also the performance of birocracy. From those three variable the most important thing that must be increased is creating the motivation so as to make positive attitude to participate in carryng out the compulsory education, be side increasing social welfare through some programs.



## PERNYATAAN

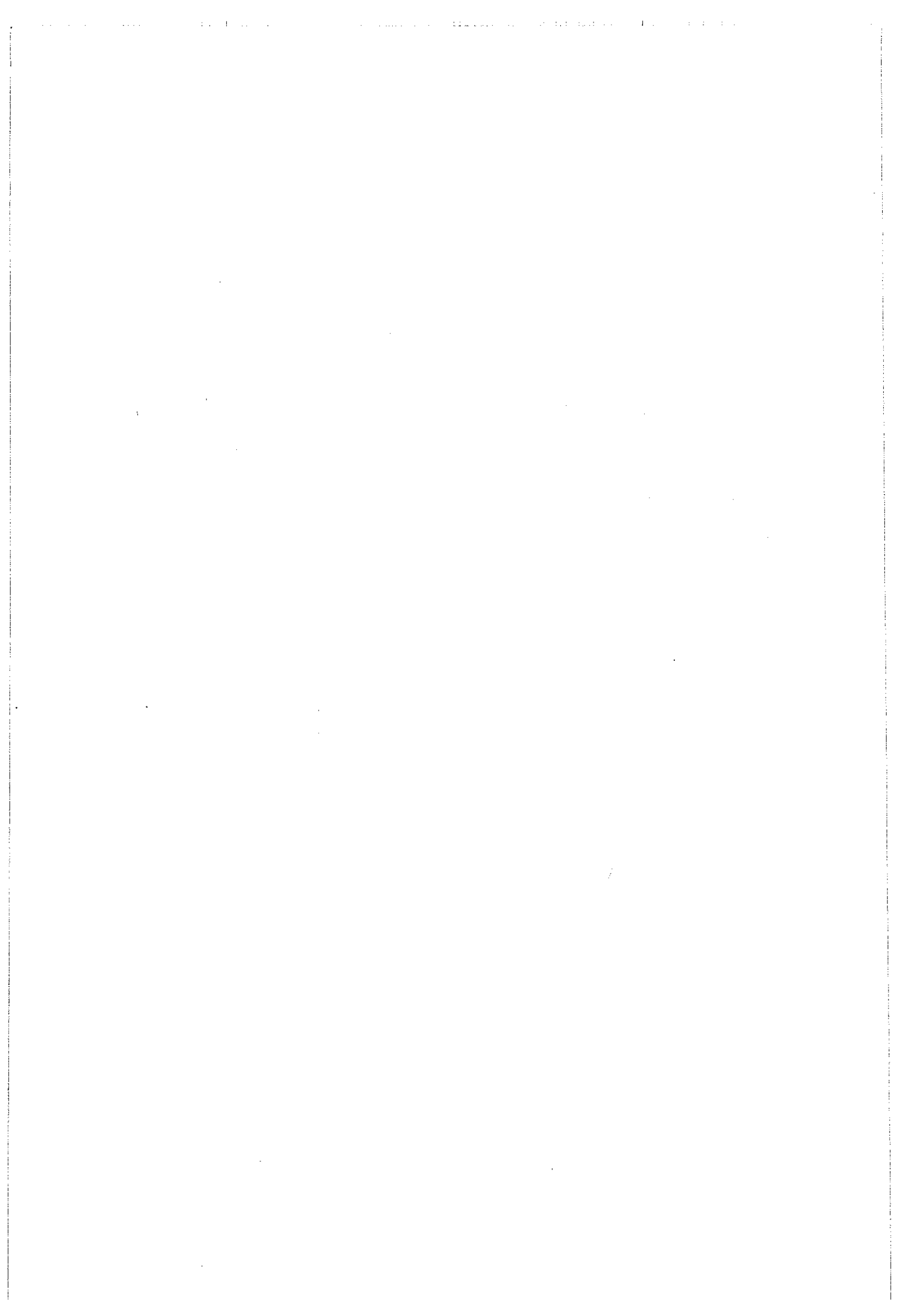
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diasu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, Maret 2003



M. SOEDIANTO

D 4 E 000113



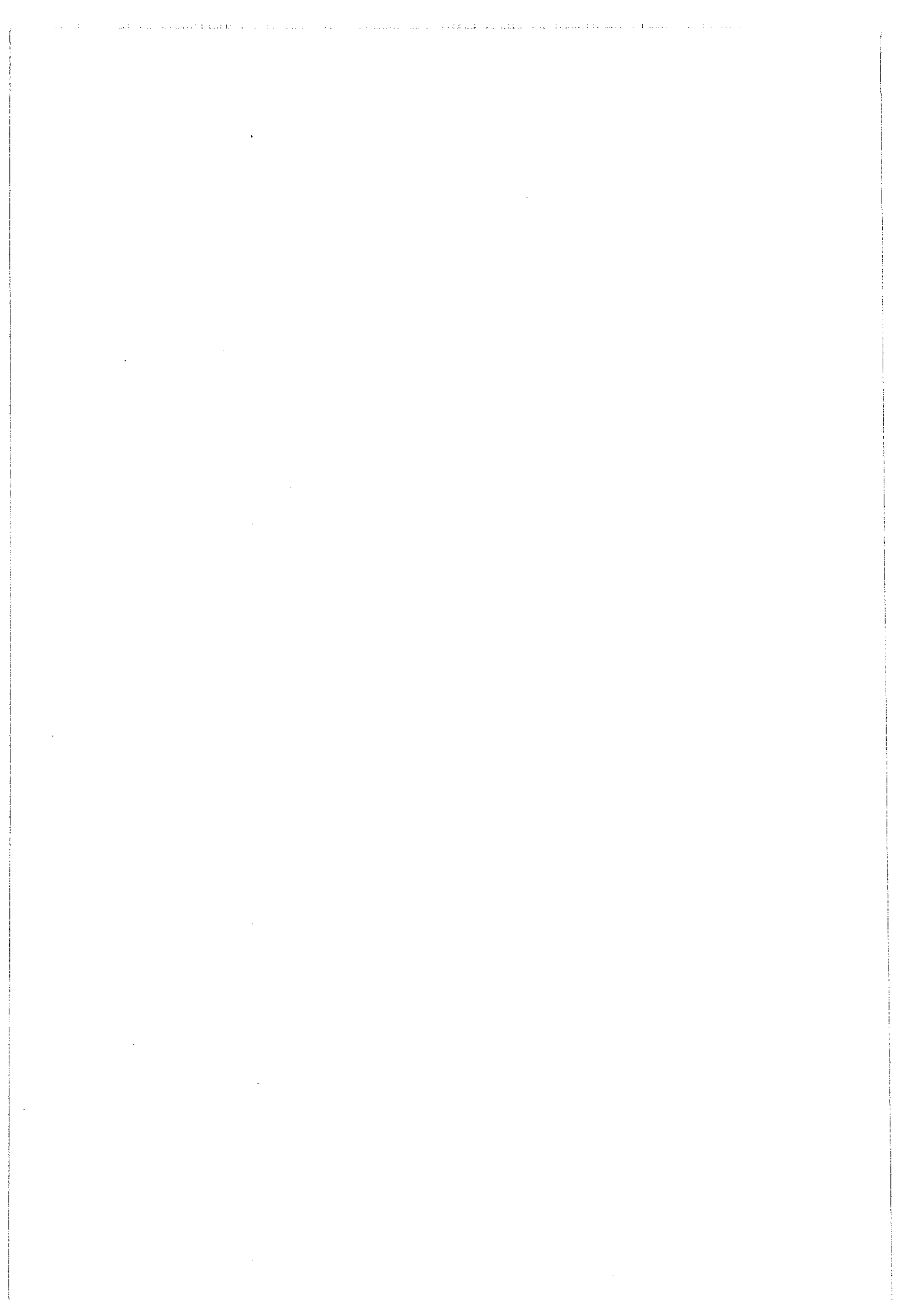
## KATA PENGANTAR

Puji-Syukur kupanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatNya kepada saya yang telah dapat menyelesaikan tugas untuk menyusun Tesis untuk diajukan kepada Dosen Pembimbing dan Tim Penguji

Judul “ PENGARUH SOSIAL EKONOMI, TINGKAT MOTIVASI DAN SIKAP TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES “ saya ajukan sebagai keinginan untuk dapat membantu terlaksananya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar melalui penelitian tentang faktor faktor penyebab keberhasilan/ketidak berhasilannya, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengatasi permasalahannya.

Dalam kesempatan ini saya patut mengucapkan terima kasih kepada :

1. Isteriku, anak-anakku yang telah memberikan dorongan moral sehingga saya mampu untuk mengikuti kuliah di Pasca Sarjana Universitas Diponegoro .
2. Dosen Pembimbing I, sekaligus Ketua Penguji, Bapak Drs. H. Sundarso, SU, dan Dosen Pembimbing II Bapak Drs. Hardi Warsono, MTP selaku Sekretaris Penguji yang secara sabar membimbing saya.
3. Bapak Prof. Drs Hartojo dan Ibu Dra Retno Sunu Astuti, Msi selaku Dosen Penguji.
4. Para dosen, MAP Undip yang telah membimbing, mendorong saya sehingga dapat menyelesaikan studi



5. Karyawan/Karyawati MAP Undip, yang dengan setia melayani para karyasiswa, terutama pada diri saya
6. Rekan-rekan Karyasiswa Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Angkatan II Reguler 2000 yang telah memberikan dorongan kepada saya dalam menempuh studi.

Semoga apa yang saya sajikan ini dapat menambah khasanah bacaan yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan.

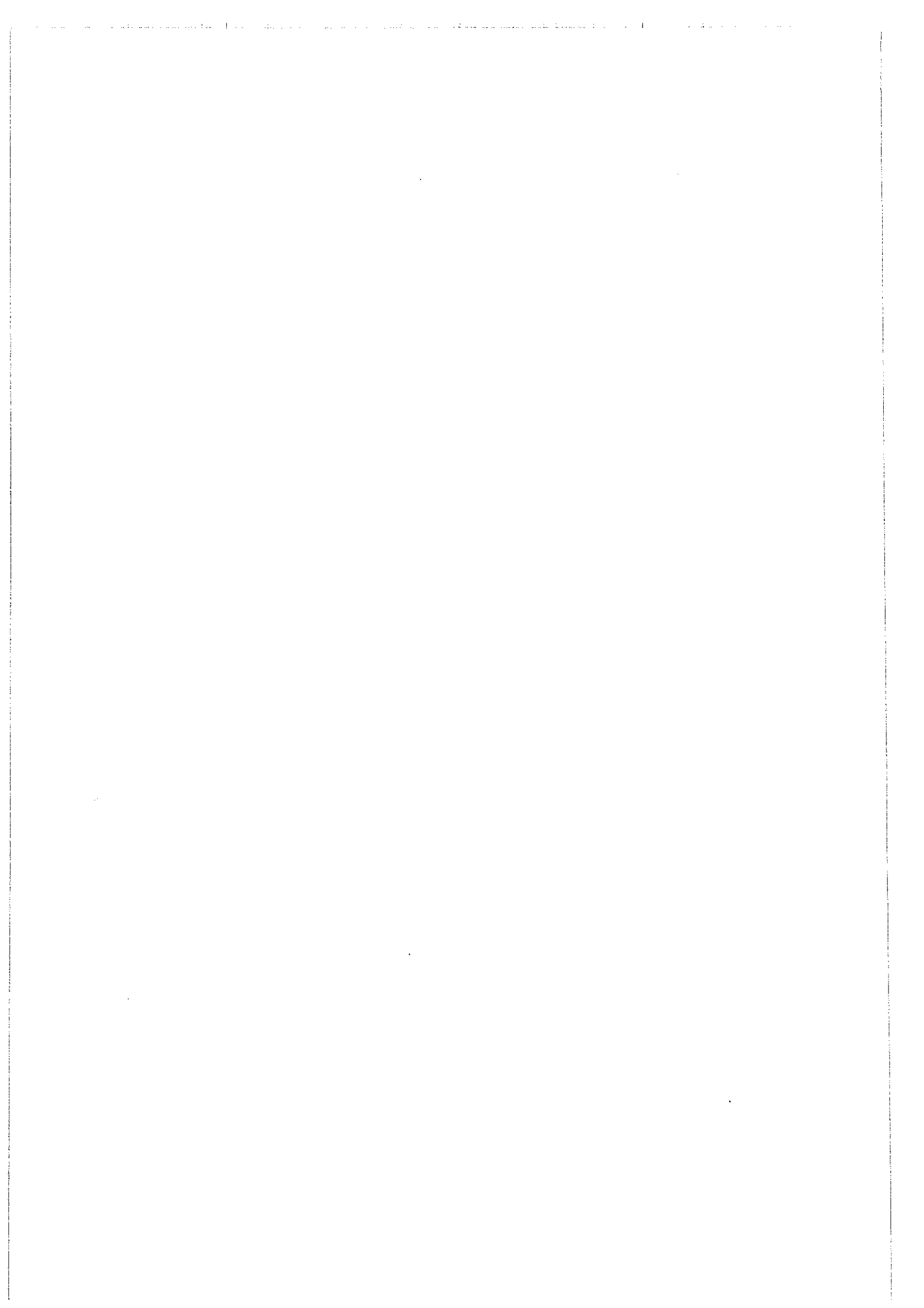
*Amien*

Semarang, Maret 2003

Penulis

**M. SOEDIANTO**

**D 4 E 000113**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

### **BAB I : PENDAHULUAN**

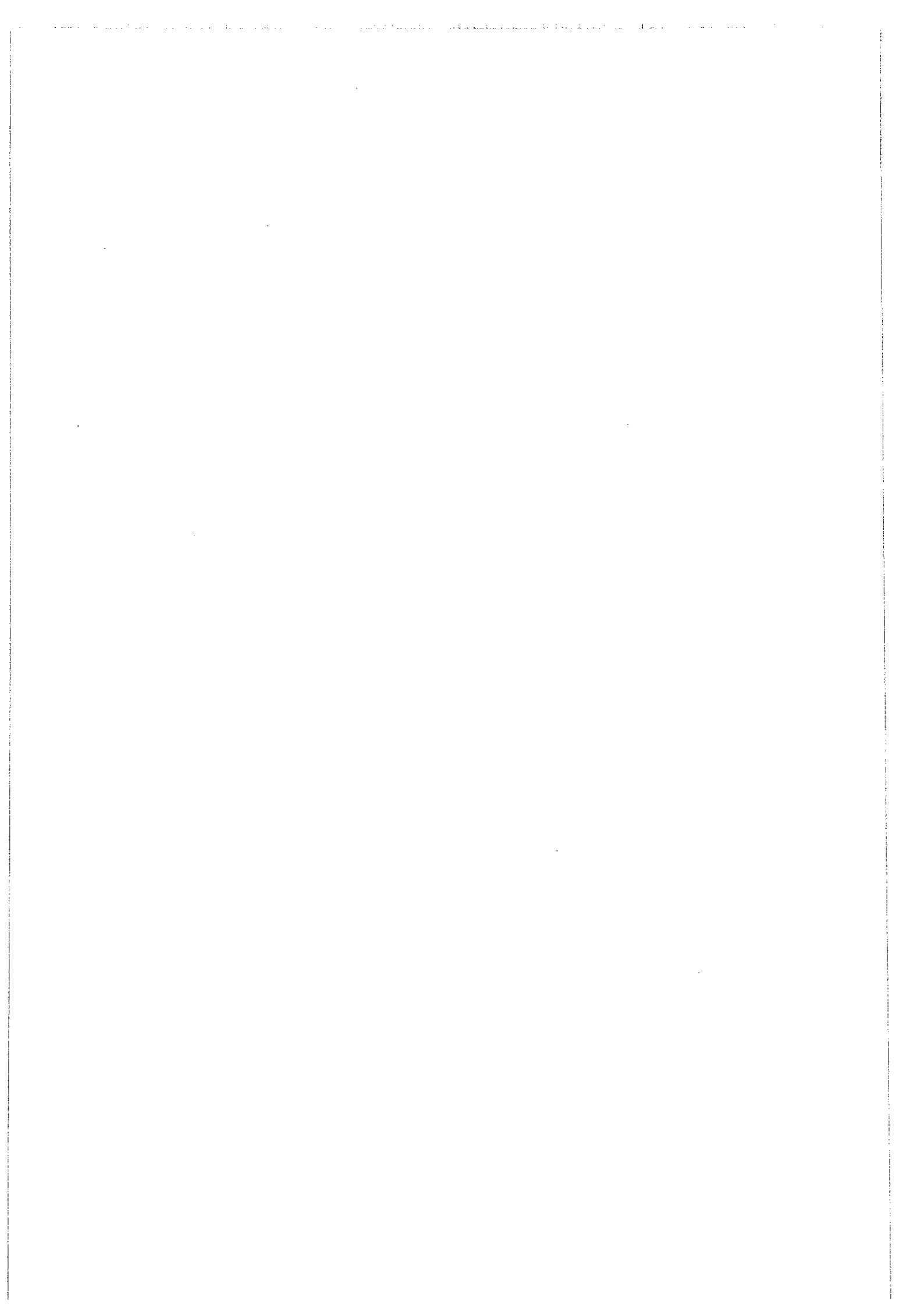
<b>A. LATAR BELAKANG</b>	1
<b>B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH</b>	11
1. Faktor Sosial Ekonomi	12
2. Faktor Motivasi	12
3. Faktor Sikap	13
4. Faktor Partisipasi	13
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b>	14
<b>D. KEGUNAAN PENELITIAN</b>	15
1. Manfaat Praktis	15
2. Manfaat Akademis	15

### **BAB II. : TINJAUAN PUSTAKA**

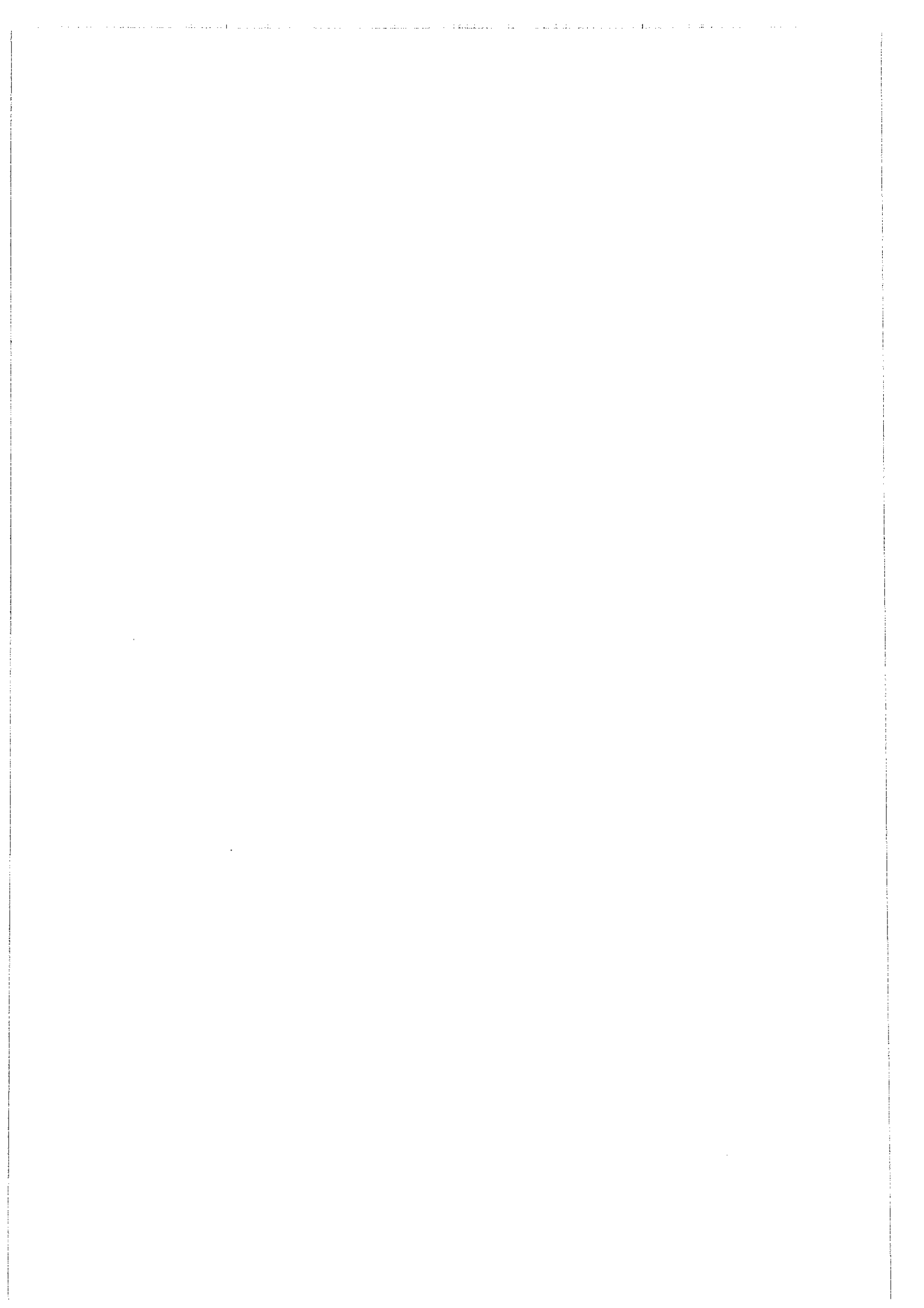
<b>A. LANDASAN TEORI</b>	16
1. Teori Yang Mendasari Penelitian	16
a. Partisipasi	16
b. Sosial Ekonomi	27



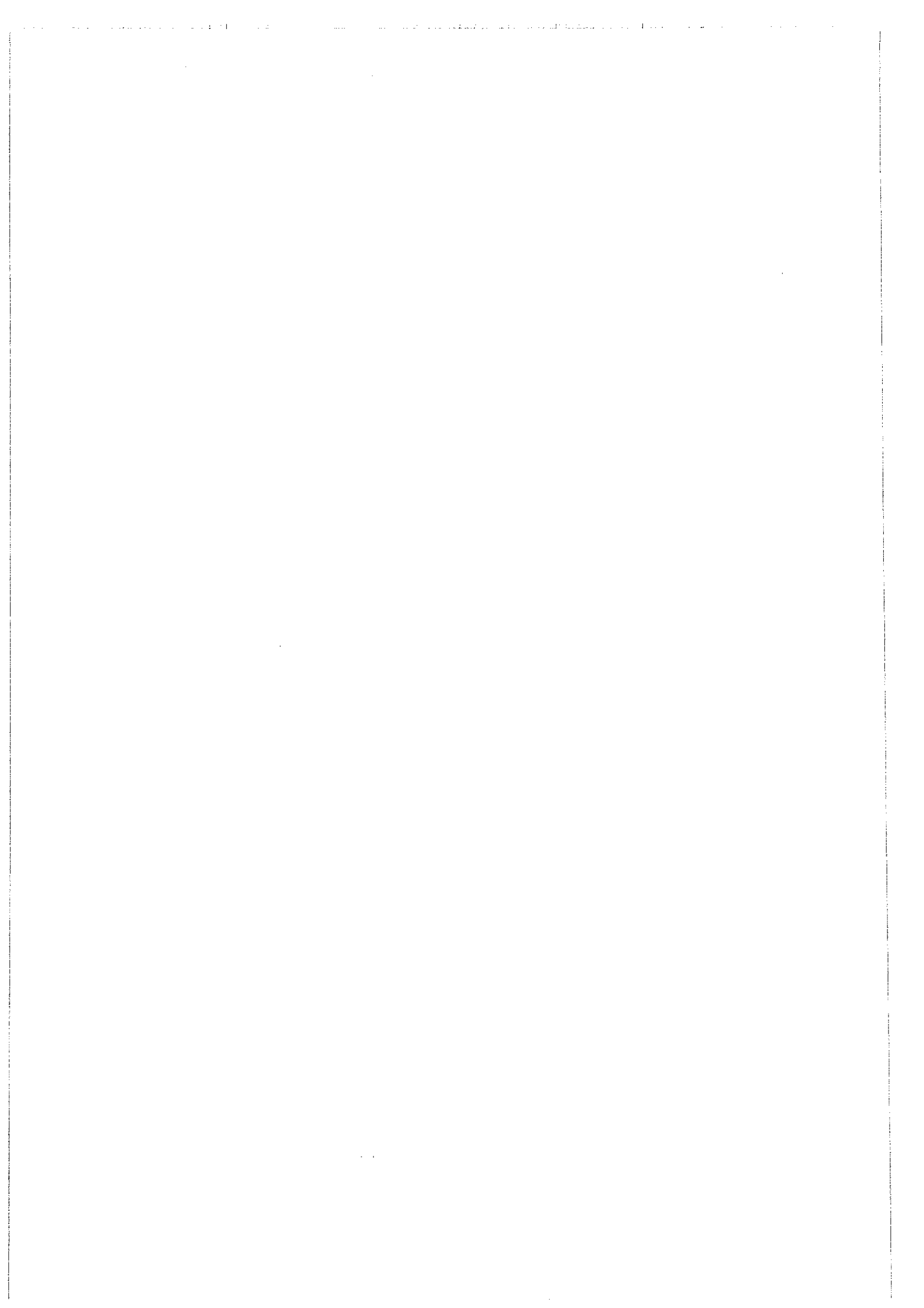
c. Motivasi	30
d. Sikap	34
e. Wajib Belajar	39
2. Konsep. Konsep Penelitian	43
a. Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi	43
b. Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Motivasi	43
c. Pengaruh Motivasi Terhadap Partisipasi	45
d. Pengaruh Motivasi Terhadap Sikap	46
e. Pengaruh Sikap Terhadap Partisipasi	46
<b>B. PEMBAHASAN PENELITIAN YANG RELEVAN</b>	47
<b>C. HIPOTESIS</b>	49
1. Model Verbal	50
2. Model Geomatrik	51
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	52
<b>A. RANCANGAN PENELITIAN</b>	52
<b>B. RUANG LINGKUP PENELITIAN/FOKUS PENELITIAN</b>	54
<b>C. LOKASI PENELITIAN</b>	54
<b>D. VARIABEL PENELITIAN</b>	55
1. Klasifikasi variabel	56
2. Definisi Konseptual	56
3. Definisi Operasional	58



<b>E. JENIS DAN SUMBER DATA</b>	60
<b>F. INSTRUMEN PENELITIAN</b>	61
<b>G. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL</b>	62
1. Populasi	62
2. Sampel	62
3. Teknik Sampling	64
<b>H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA</b>	65
<b>I. TEKNIS ANALISIS DATA</b>	66
<b>BAB IV. : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	68
<b>A. DISKRIPSI WILAYAH</b>	68
1. Keadaan Geografi dan Wilayah	68
2. Pemerintahan	70
3. Demografi	71
4. Daya Tampung	77
<b>B. HASIL PENELITIAN</b>	78
1. Identitas Responden	78
2. Partisipasi	83
3. Sosial Ekonomi	97
4. Motivasi	107
5. Sikap	121
<b>C. ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	145
1. Hubungan antara Sosial Ekonomi dengan Partisipasi	145
2. Hubungan antara Motivasi dengan Partisipasi	148
3. Hubungan antara Sikap dengan Partisipasi	150
4. Hubungan antara Sosial Ekonomi, Motivasi dan Sikap dengan Partisipasi	152

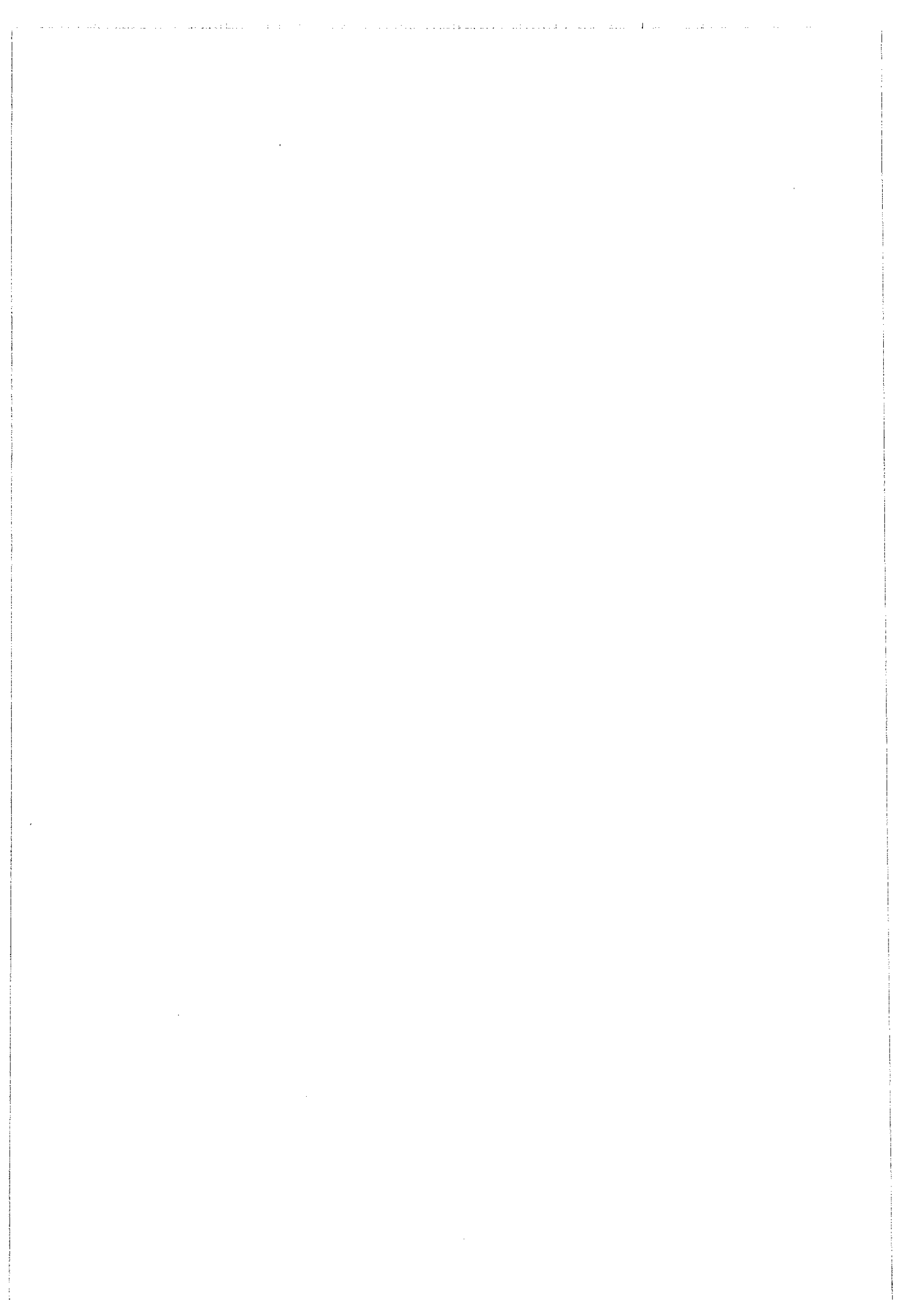


<b>D. DISKUSI</b>	158
<b>BAB V : SIMPULAN DAN SARAN</b>	161
<b>A. SIMPULAN</b>	161
<b>B. SARAN</b>	163
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

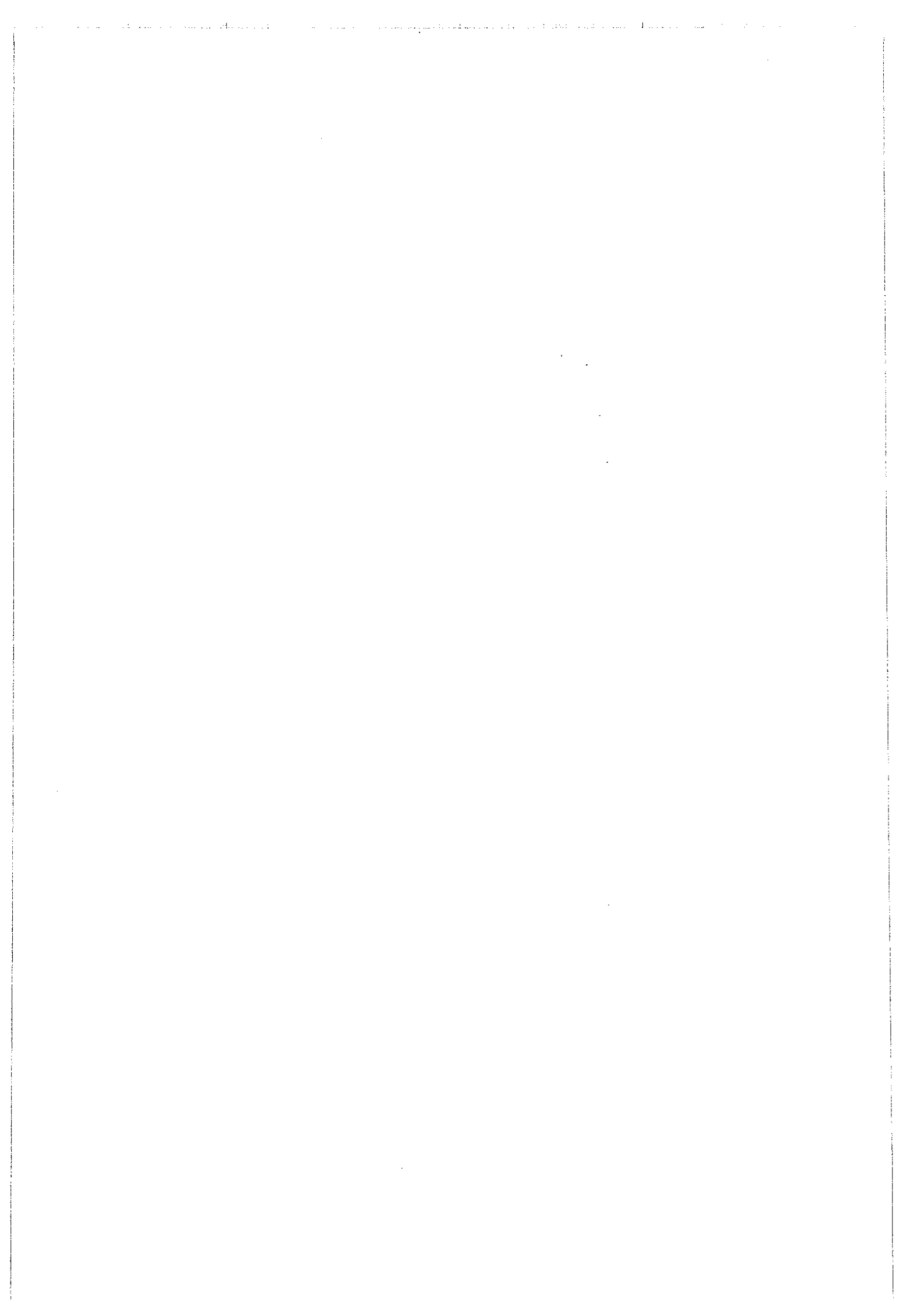


## DAFTAR TABEL

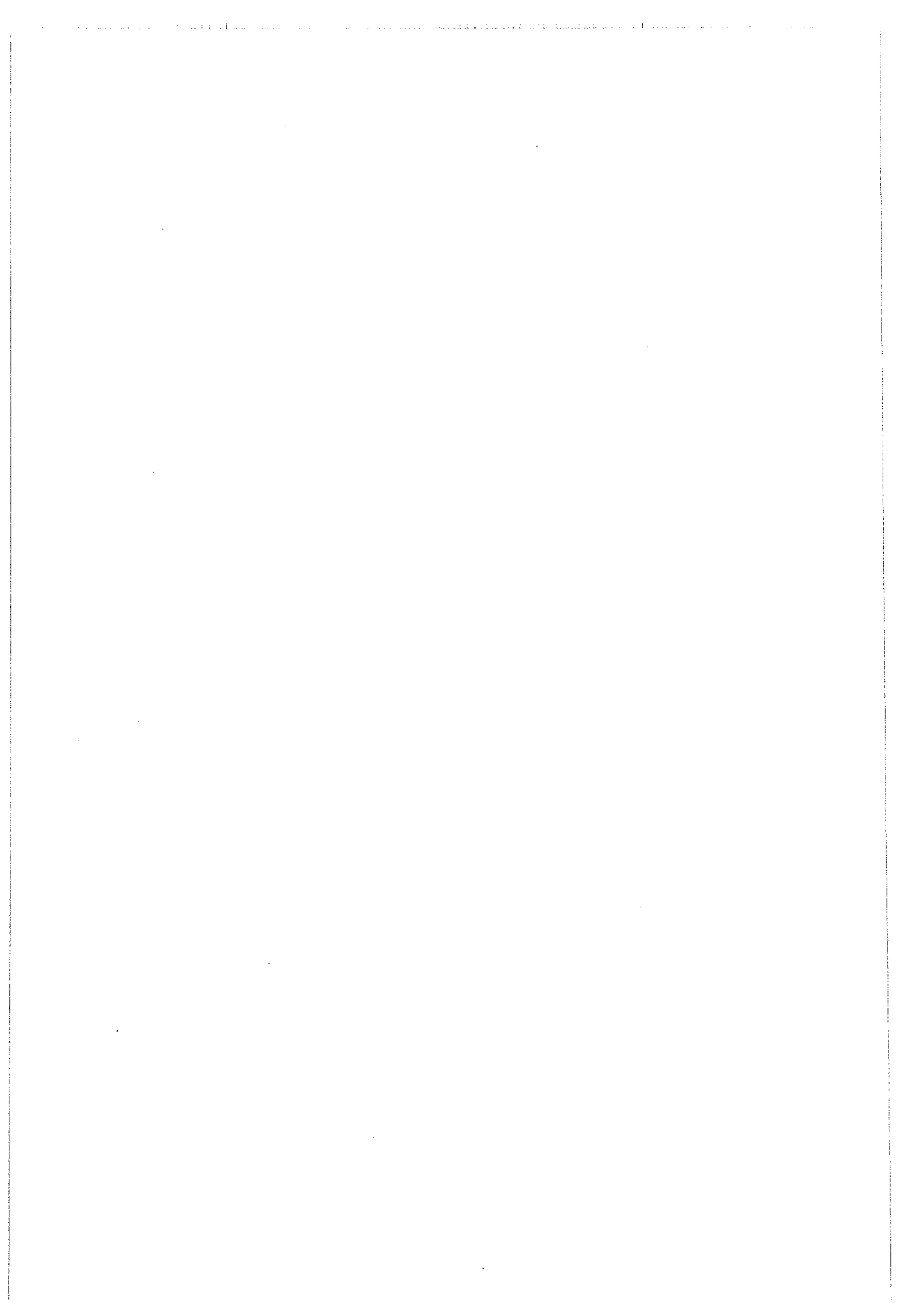
TABEL 1.1	: APK/APM JAWA TENGAH .....	5
TABEL 1.2	: APK/APM KABUPATEN BREBES .....	8
TABEL 1.3	: APK/APM KECAMATAN TANJUNG.....	9
TABEL 3.1	: PENGAMBILAN SAMPEL.....	64
TABEL 4.1	: LUAS LAHAN KECAMATAN TANJUNG.....	69
TABEL 4.2	: JUMLAH DUKUH, RT DAN RW .....	70
TABEL 4.3	: JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN	71
TABEL 4.4	: JUMLAH PENDUDUK PER KELOMPOK UMUR/JENIS KELAMIN .....	72
TABEL 4.5	: TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK.....	73
TABEL 4.6	: PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA	75
TABEL 4.7	: TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK .....	76
TABEL 4.8	: DAYA TAMPUNG .....	77
TABEL 4.9	: PEKERJAAN RESPONDEN.....	78
TABEL 4.10	: TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN.....	79
TABEL 4.11	: JUMLAH ANAK YANG DIMILIKI.....	80
TABEL 4.12	: ANAK RESPONDEN YANG BERSEKOLAH DI SD .....	80
TABEL 4.13	: ANAK YANG BERSEKOLAH DI SLTP.....	81
TABEL 4.14	: ANAK YANG BERSEKOLAH DI LEMBAGA PENDIDIKAN LAINNYA.....	82
TABEL 4.15	: KETERLIBATAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR ...	83
TABEL 4.16	: FREKUENSI KEHADIRAN RESPONDEN.....	84
TABEL 4.17	: KEAKTIFAN DALAM MENDUKUNG WAJAR.....	85
TABEL 4.18	: INTENSITAS DUKUNGAN TERHADAP WAJIB BELAJAR	85
TABEL 4.19	: FREKUENSI DUKUNGAN SATU TAHUN ....	86
TABEL 4.20	: BENTUK BANTUAN PADA PROGRAM WAJAR.....	87
TABEL 4.21	: BESARNYA BANTUAN DANA PARTISIPASI WAJAR	88
TABEL 4.22	: FREKUENSI BANTUAN TENAGA UNTUK PENDIDIKAN	89







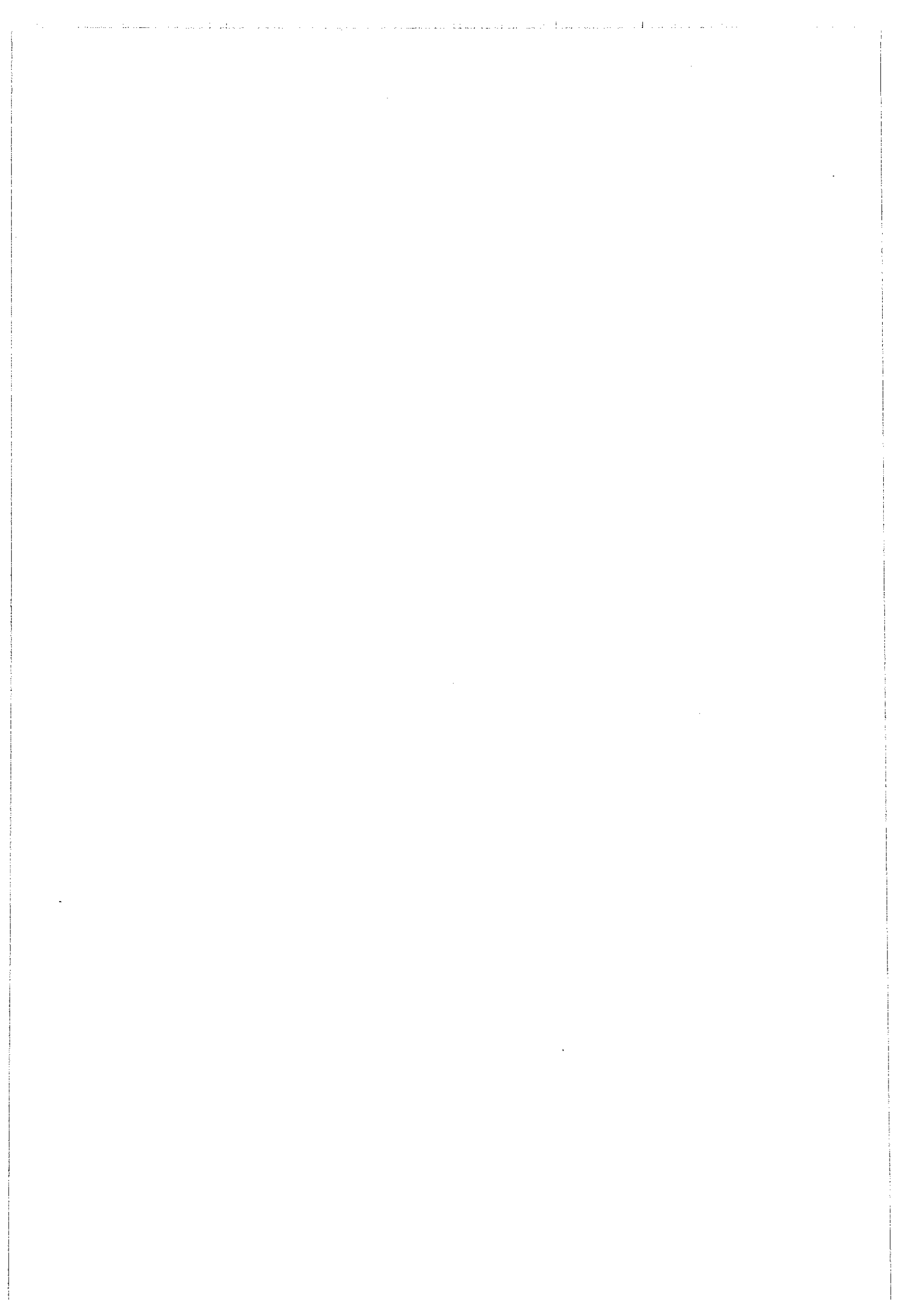
TABEL 4.50 : ADANYA KEINGINAN ANAKNYA PINTAR.....	110
TABEL 4.51 : TUJUAN MENYEKOLAHKAN ANAKNYA.....	111
TABEL 4.52 : PERLUNYA DORONGAN DARI LUAR.....	111
TABEL 4.53 : MASA DEPAN ANAK BERSEKOLAH.....	112
TABEL 4.54 : ANAK TIDAK SEKOLAH BISA KAYA.....	113
TABEL 4.55 : MAMPU TAPI TIDAK MENYEKOLAHKAN ANAK.....	114
TABEL 4.56 : KEWAJIBAN MENYEKOLAHKAN ANAK.....	114
TABEL 4.57 : PERLUNYA KEGIATAN WAJIB BELAJAR.....	115
TABEL 4.58 : DORONGAN BERSEKOLAH TANPA UANG SAKU ....	116
TABEL 4.59 : PERASAAN MANTAP ANAKNYA BERSEKOLAH.....	117
TABEL 4.60 : PENDIDIKAN MERUPAKAN KEBUTUHAN POKOK...	117
TABEL 4.61 : TERDORONG ANAK ORANG LAIN BERSEKOLAH..	118
TABEL 4.62 : PANDANGAN POSITIF TERHADAP SEKOLAH ANAKNYA	119
TABEL 4.63 : PENDIDIKAN BAGUS BAGI ANAK.....	119
TABEL 4.64 : REKAPITULASI TINGKAT MOTIVASI.....	120
TABEL 4.65 : PENGHASILAN UNTUK BIAYA SEKOLAH.....	121
TABEL 4.66 : MENGUSAHAKAN BIAYA SEKOLAH.....	122
TABEL 4.67 : MENABUNG UNTUK BIAYA SEKOLAH.....	123
TABEL 4.68 : PERLUNYA ANAK Mencari nafkah tambahan	123
TABEL 4.69 : ANAK BERSEKOLAH Sambil mencari nafkah	124
TABEL 4.70 : SIKAP ADANYA PENDIDIKAN YANG TINGGI.....	125
TABEL 4.71 : SIKAP BILA ANAKNYA HARUS SEKOLAH .....	125
TABEL 4.72 : PENGHASILAN TIDAK CUKUP, TETAP BERSEKOLAH	126
TABEL 4.73 : PENDIDIKAN MENJAMIN KEHIDUPAN YANG BAIK	127
TABEL 4.74 : TANPA SEKOLAH ANAK BISA KAYA.....	127
TABEL 4.75 : JAMINAN UNTUK MENDAPAT PEKERJAAN .....	128
TABEL 4.76 : BEBAN BIAYA BAGI ORANG TUA.....	129
TABEL 4.77 : PERMASALAHAN TINGGINYA BIAYA PENDIDIKAN	129
TABEL 4.78 : MASALAH JARAK TEMPAT SEKOLAH .....	130



TABEL 4.79 : MASALAH BIAYA TRANSPORT .....	131
TABEL 4.80 : ANGGAPAN SEKOLAH TIDAK PENTING .....	131
TABEL 4.81 : SIKAP TERHADAP KEBERADAAN KEJAR PAKET A/B	132
TABEL 4.82 : PELAKSANAAN KEJAR PAKET A/B SIANG HARI.....	133
TABEL 4.83 : PERLUNYA MELANJUTKAN KE SLTP.....	133
TABEL 4.84 : SIKAP TERHADAP PERKAWINAN DINI.....	134
TABEL 4.85 : KAWIN DINI MENGHAMBAT WAJIB BELAJAR.....	135
TABEL 4.86 : KEPEDULIAN TERHADAP ANAK YANG TIDAK SEKOLAH.....	136
TABEL 4.87 : KEPEDULIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG.....	136
TABEL 4.88 : KEPEDULIAN TERHADAP PENDIDIKAN ANAK.....	137
TABEL 4.89 : TIDAK PENTINGNYA SEKOLAH.....	138
TABEL 4.90 : PERASAAN SEDIH BILA BANYAK ANAK TIDAK SEKOLAH.....	138
TABEL 4.91 : PENDAPAT TENTANG PROSPEK BERSEKOLAH.....	139
TABEL 4.92 : KEBERUNTUNGAN ANAK YANG BERSEKOLAH.....	140
TABEL 4.93 : KEPUASAN TERHADAP ANAK YANG BERSEKOLAH	140
TABEL 4.94 : KEBANGGAN ANAKNYA YANG BERSEKOLAH.....	141
TABEL 4.95 : KEBUTUHAN LEMBAGA PENDIDIKAN .....	142
TABEL 4.96 : KEWAJARAN BIAYA SEKOLAH.....	142
TABEL 4.97 : BANYAKNYA KEGIATAN BELAJAR BAGI ANAK .....	143
TABEL 4.98 : REKAPITULASI SIKAP TERHADAP PARTISIPASI.....	144
TABEL 4.99: HUBUNGAN ANTARA SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI.....	145
TABEL 4.100: KORELASI KENDALL SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI.....	147
TABEL 4.101 : HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN PARTISIPASI	148
TABEL 4.102: UJI KENDALL HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PARTISIPASI .....	149
TABEL 4.103: HUBUNGAN ANTARA SIKAP DENGAN PARTISIPASI	150



TABEL 4.104: UJI KENDALL HUBUNGAN SIKAP DENGAN PARTISIPASI	151
TABEL 4.105: HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DENGAN RUMUS KENDALL.....	153
TABEL 4.106: RANKING KENDALL'S W TEST.....	155
TABEL 4.107: KONKORDANSI KENDALL'S .....	156
TABEL 4.108: MODEL SUMMARY .....	157



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Teori Fit Model .....17
2. Gambar 2 : Visualisasi hubungan sosial ekonomi dengan motivasi .....45
3. Gabar 3 : Model Geomatrik ..... 51

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

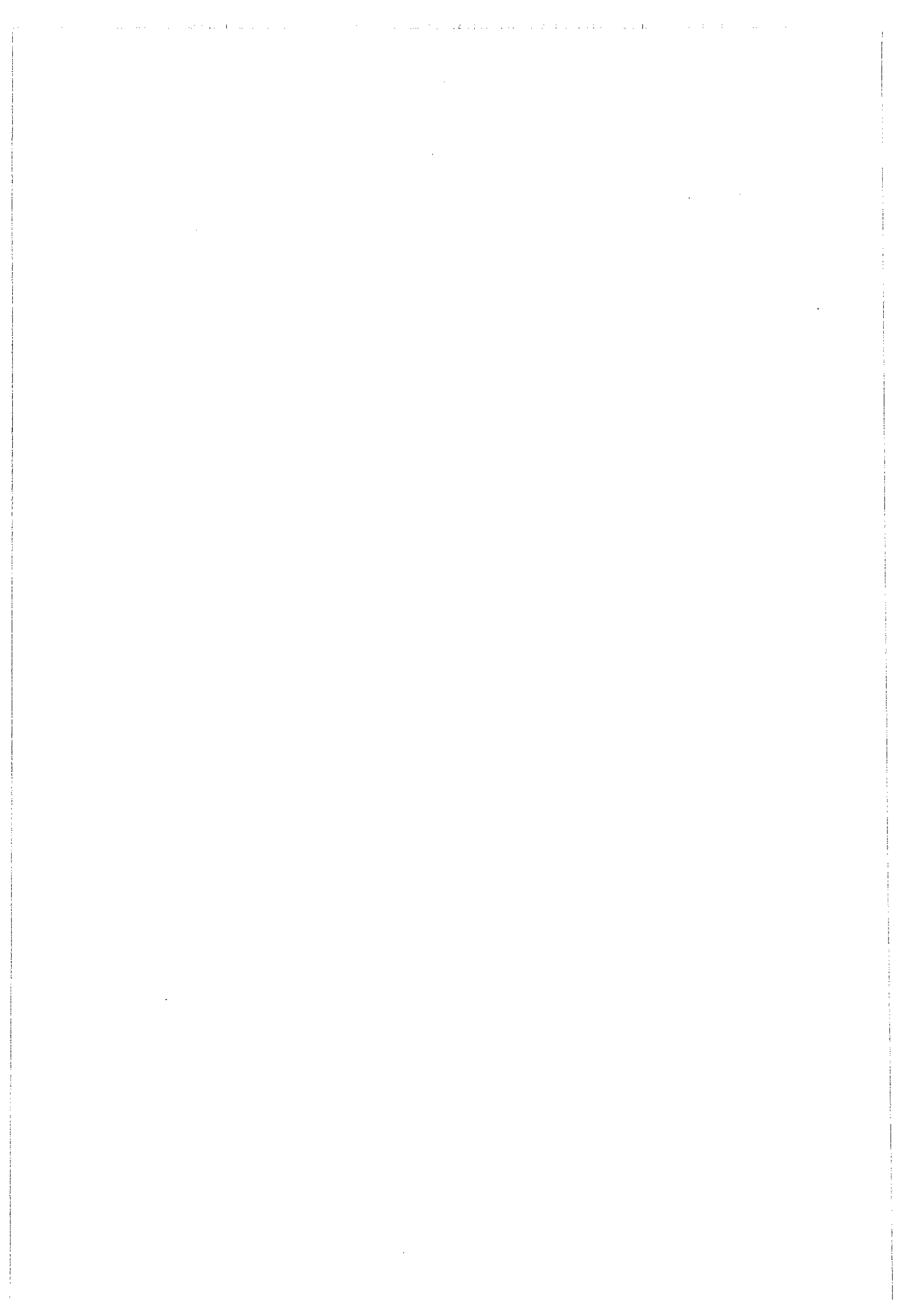
PH.D. THESIS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Interview guide
2. Lampiran 2 : Kuesener
3. Lampiran 3 : Tabel Induk



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembangunan bangsa, pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu upaya strategis dalam Pembangunan Nasional, dan diperlukan *critical mass*, di bidang pendidikan. Hal ini tertuang pada Garis-Garis Besar Haluan Negara 2001 – 2004, menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan di bidang pendidikan, diarahkan pada upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, secara tegas disebutkan bahwa pemerintah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan yang berarti. Lebih lanjut disebutkan juga pada angka 4, yaitu memberdayakan lembaga pendidikan sekolah, maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengupayakan adanya suatu prosentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu yang harus disiapkan oleh pemerintah, bersama-sama masyarakat agar pembangunan pendidikan

dapat meningkat dengan cepat, hal ini disebabkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh vital terhadap pengembangan bidang kultural dan politik. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, khususnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan dan pelatihan menjadi suatu kebutuhan untuk dapat membekali pengetahuan dan kemampuan dalam meningkatkan dan memberi nilai tambah pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Mubyarto (1993 : 19) mengatakan bahwa :

“ Agar setiap orang bisa memperoleh pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, maka ia harus memiliki ketrampilan yang bisa “dijual” ke dunia usaha. Oleh karena itu proses pendidikan dan pelatihan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses pembangunan”.

Untuk itu Pemerintah menginginkan agar penduduk Indonesia memiliki minimal tingkat pendidikan dasar setara SLTP, dan dengan melihat visi dan misi , serta tujuan nasional, maka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam era desentralisasi ini, pemerintah telah menetapkan program-program pembangunan pendidikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, yang dalam merealisasikan tujuan tersebut, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang pada bab V pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa warganegara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat. Pendidikan memegang peranan penting dalam mengubah perilaku manusia melalui pembentukan watak, pribadi dan mental sehingga tercipta kualitas manusia yang mampu menganalisa masalah dan mengaplikasikan dalam kehidupan.

Dalam melaksanakan hal tersebut, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yang merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, yang merupakan dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional yang perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan diharapkan dapat memberikan dukungan dari segenap lapisan masyarakat, terutama bagi orang tua yang mempunyai anak usia sekolah, untuk menyekolahkan anaknya.

Namun tantangan cukup banyak yang antara lain berupa krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga daya beli masyarakat menurun, yang dapat menurunkan kemampuan dan pencapaian hasil pembangunan di bidang pendidikan, terlebih pada era desentralisasi yang diperlukan perubahan manajemen demokratis dan partisipasi masyarakat.

Pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) telah dituangkan adanya permasalahan pendidikan yang antara lain pemerataan memperoleh pendidikan belum menyebar, dengan tujuan program yang meliputi penyediaan pelayanan bagi yang tidak atau belum memperoleh pendidikan formal dengan pelaksanaan program mempercepat penuntasan buta aksara, meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan, serta kualitas dan kuantitas warga belajar Kejar Paket A dan B untuk mendukung pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Di Jawa Tengah telah diupayakan beberapa kegiatan yang menunjang kegiatan Wajib Belajar, berupa pengadaan Unit Gedung Baru (UGB), penambahan Ruang Kelas

Baru (RKB), penyelenggaraan SLTP Terbuka, Kelompok Belajar Paket A (Kejar Paket A) setara Sekolah Dasar dan Kelompok Belajar Paket B setara SLTP. Sejak dicanagkannya Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, di Jawa Tengah sudah dilaksanakan secara maksimal, melalui berbagai kegiatan, dengan program utama pada pendidikan SLTP, dengan cara meningkatkan perluasan daya tampung melalui penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), baik negeri maupun swasta, Rahabilitasi gedung SLTP, Pemberian Bea Siswa bagi keluarga kurang mampu, maupun yang berbakat dengan dana yang cukup tinggi.

Namun demikian, dari penduduk sebanyak 30.761.221 jiwa ( Data Statistik Penduduk Tahun 2000) ternyata masih ada penduduk yang buta huruf sebanyak lebih kurang 2,5 % atau lebih kurang 739.749 jiwa. Dilihat dari persentasenya memang hanya sedikit, namun bila dilihat besarnya, maka diperlukan pemikiran yang serius, terpadu dan terkoordinasi, disertai dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dan sikap yang positif, sehingga ikut berpartisipasi terhadap keberhasilan Wajib Belajar dengan cara menyekolahkan anaknya.

Berdasarkan laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar di Kabupaten Brebes, dapat diketahui jumlah APK dan APM sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

## APK/APM JAWA TENGAH 2001/2002

No	Kab/Kota	Jumlah Pddk, Usia Sekolah	APK termasuk Paket B	APM Termasuk Paket B
1	Kab. Cilacap	111.669	78,68	59,53
2	Kab. Banyumas	87.823	87,36	75,64
3	Kab. Purbalingga	47.596	78,31	54,46
4	Kab. Banjarnegara	57.103	64,62	51,13
5	Kab. Kebumen	83.754	82,42	60,81
6	Kab. Purworejo	39.280	105,89	77,50
7	Kab. Wonosobo	44.975	74,29	67,52
8	Kab. Magelang	61.714	85,68	64,87
9	Kab. Boyolali	58.424	88,77	75,38
10	Kab. Klaten	80.732	77,95	53,46
11	Kab. Sukoharjo	36.174	98,46	75,53
12	Kab. Wonogiri	64.378	74,15	65,50
13	Kab. Karanganyar	48.873	87,45	69,35
14	Kab. Sragen	56.372	93,63	78,04
15	Kab. Grobogan	91.951	66,01	54,66
16	Kab. Blora	52.124	77,87	54,73
17	Kab. Rembang	39.802	66,32	49,78
18	Kab. Pati	72.148	81,48	73,05
19	Kab. Kudus	46.550	87,74	65,56
20	Kab. Jepara	60.729	75,64	59,74
21	Kab. Demak	56.377	98,87	75,68
22	Kab. Semarang	45.567	87,76	80,56
23	Kab. Temanggung	45.099	69,57	52,30
24	Kab. Kendal	55.331	86,31	64,11
25	Kab. Batang	42.491	69,90	48,57
26	Kab. Pekalongan	43.617	75,48	57,25
27	Kab. Pemalang	73.493	78,08	56,77
28	Kab. Tegal	107.351	66,78	55,33
29	<b>Kab. BREPES</b>	<b>103.501</b>	<b>63,64</b>	<b>47,05</b>
30	Kota Magelang	6.636	139,96	108,51
31	Kota Surakarta	31.275	119,73	80,87
32	Kota Salatiga	11.488	99,31	73,12
33	Kota Semarang	71.741	98,03	69,77
34	Kota Pekalongan	16.723	91,45	67,59
35	Kota Tegal	16.010	100,31	72,65
		<b>1.968.871</b>	<b>79,94</b>	<b>62,09</b>

Sumber : Data Wajib Belajar 2001 Dinas P dan K Propinsi

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Wajib Belajar Tahun 2001 di Brebes oleh Tim Koordinasi Wajib Belajar Tingkat Propinsi, beberapa alasan klasik kenapa para orang tua tidak menyekolahkan anaknya adalah keadaan sosial ekonomi, yang antara lain adalah tingkat ekonomi orang tua yang rendah, yang dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok, saja tidak mampu sehingga anak ikut mencari nafkah tambahan untuk membantu orang tua, banyaknya pemutusan hubungan kerja, serta adanya adat istiadat berupa kawin muda dan adanya tradisi ritual (rambut gembel, anak bajang) serta tingkat pendidikan orang tua yang rendah, sehingga tidak termotivasi berpartisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar.

Faktor lokasi sekolah yang cukup jauh dengan kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan umum, serta geografis yang tidak mendukung, merupakan alasan yang dapat diungkapkan untuk tidak menyekolahkan anaknya. Budaya masyarakat untuk mengawinkan anaknya pada usia sekolah, terutama anak perempuan, dikarenakan takut dikatakan perawan tua, mengakibatkan mereka tidak menyekolahkan anaknya.

Adanya sikap dari masyarakat yang tidak mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yang terlihat dari tingkat kepedulian adanya anak yang tidak bersekolah, kondisi sekolah yang tidak memadai, respon terhadap pelaksanaan Wajib Belajar

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Wajib Belajar, diperlukan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, oleh karena itu untuk mengetahui kesadaran tersebut, diperlukan pemahaman tentang pengetahuan, sikap dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terlaksananya kegiatan Wajib Belajar. Kesadaran

masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anak, yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan anggota masyarakat disertai dengan meningkatnya sikap positif, dan adanya partisipasi anggota masyarakat, atau keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan sesuatu tujuan. Keikutsertaan masyarakat terhadap pendidikan, merupakan kesadaran sosial masyarakat yang menurut J.S Roucek ( Soerjono Soekanto, 1986 :3) dikatakan bahwa : “Kesadaran masyarakat merupakan suatu kesadaran manusia akan setiap sikap tindakan pihak lain terhadapnya dan terhadap pelbagai jenis perilaku. Kesadaran adalah diartikan sebagai perasaan rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran masyarakat ditentukan pula oleh tingkat pengetahuan yang dalam hal ini berupa pemahaman terhadap pendidikan, karena dengan tingkat pemahaman terhadap pendidikan yang tinggi, mereka akan menyadari arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini sesuai dengan teori implementasi dari Grindle dalam buku Evaluasi kebijakan Publik (Samodra Wibowo, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto, 1994), bahwa dalam melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi, yang salah satunya adalah kepatuhan dan daya tanggap

Peneliti memilih lokasi di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Daerah tersebut paling rendah jumlah seluruh anak usia 13 – 18 tahun yang bersekolah di Sekolah yang ada di daerah tersebut, yaitu baru mencapai 63,64 %,

sedangkan Angka Partisipasi Murninya, yaitu jumlah anak usia sekolah (13– 15 tahun) , baru mencapai 47,05 %, sehingga dianggap belum berhasil, karena di bawah rata-rata Propinsi yaitu 79,94 %. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2  
APK/APM KABUPATEN BREBES

No.	Kecamatan	Pnddk. Usia Sekolah	APK Termasuk Kejar Paket B	APM termasuk Kejar Paket B
1	Brebes	6154	63,45	46,32
2	Wonosari	5737	64,52	47,10
3	Jatibarang	6032	65,40	49,05
4	Songgom	5546	63,34	48,87
5	Bulakamba	5429	64,42	48,04
6	<b>Tanjung</b>	<b>18704</b>	<b>61,79</b>	<b>45,38</b>
7	Losari	3724	63,45	46,39
8	Tersana	5816	62,54	46,04
9	Banjarmangu	7635	63,32	47,22
10	Ketanggungan	4622	64,46	48,08
11	Larangan	4763	63,54	47,37
12	Tonjong	5205	62,35	45,56
13	Bumiayu	6739	64,56	47,13
14	Sirampog	6428	64,66	47,22
15	Paguyangan	3219	64,38	46,98
16	Bantarkawung	3441	63,24	46,78
17	Salem	4307	63,46	46,32
		<b>103.501</b>	<b>63,64</b>	<b>47,05</b>

Sumber : Data Wajib Belajar Dinas P dan K Kab. Brebes 2001

Adapun APK di Kecamatan Tanjung, baru mencapai 61,79 % dan APM sebesar 44,38, yang secara khusus pada lima desa yang diteliti, masih terlalu rendah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

APK DAN APM DI KECAMATAN TANJUNG

No	Desa/Kelurahan	Penduduk Usia Sekolah	APK Termasuk Kejar Paket A (%)	APM Termasuk Kejar Paket B
1	2	3	4	5
1	Sarireja	1134	63,52	45,76
2	Kubangputat	1029	63,61	44,37
3	Luwung Gede	926	64,53	43,46
4	Mundu	1421	61,34	44,89
5	Luwungbata	673	60,62	46,57
6	Karangreja	686	60,43	42,45
7	Sidakaton	1274	62,47	42,67
8	<b>Sengon</b>	<b>1246</b>	60,34	42,23
9	Kedawung	736	63,11	44,56
10	Tegongan	897	61,92	44,78
11	Kemurang Wetan	684	60,67	45,14
12	<b>Kemurang Kulon</b>	<b>674</b>	60,44	43,52
13	Krakahan	1263	63,26	42,13
14	Pejagan	1376	62,51	42,43
15	Pengaradan	569	61,36	44,51
16	<b>Tanjung</b>	<b>1628</b>	61,46	43,16
17	<b>Lemah Abang</b>	<b>576</b>	60,48	42,36
18	<b>Tengguli</b>	<b>1267</b>	60,28	43,63
	Jumlah	18.704		
	Porsentase (%)	100 %	61,79 %	44,38 %

Sumber : Data Wajib Belajar Kecamatan Tanjung 2001

2. Daerah tersebut mempunyai variasi dalam mata pencaharian, yang meliputi : pemilik sawah, buruh tani, buruh memetik bawang , buruh pabrik dan lain-lain.
3. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Wajib Belajar, tingkat partisipasi yang rendah karena kondisi ekonomi yang kurang menunjang, dan adanya faktor geografis yang cukup menghambat, yaitu jarak sekolah yang cukup jauh, disamping itu walaupun orang tua mereka mampu, karena mereka berpendirian bahwa kaya tanpa sekolahpun bisa, karena adanya contoh, sehingga mereka enggan menyekolahkan anaknya.

Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat dikemukakan bahwa indikator ketidakberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung adalah sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah anak putus sekolah dan rawan putus sekolah;
2. Tingginya jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah ;
3. Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan angka Partisipasi Murni (APM) yang rendah
4. Jumlah daya tampung yang belum optimal;
5. Sedikitnya Jumlah anak usia sekolah yang belajar pada Kelompok Belajar Paket A atau B;
6. Tingkat sosial ekonomi yang rendah;
7. Tingkat motivasi menyekolahkan anaknya tidak tinggi
8. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama orang tua anak usia sekolah.

Dari indikator tersebut, perlu ditelusuri faktor apa saja yang menyebabkan berhasil tidaknya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, antara lain :

1. Masalah yang berhubungan dengan faktor sosial ekonomi, yang meliputi tingkat pendidikan orang tua anak usia sekolah, tingkat kemampuan ekonomi, faktor budaya dan adat istiadat setempat;
2. Tingkat motivasi orang tua anak usia sekolah untuk menyekolahkan anaknya
3. Sikap orang tua terhadap pelaksanaan Wajib Belajar, yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berpartisipasi untuk menyekolahkan anaknya.

Dari berbagai penyebab tersebut, diperlukan upaya-upaya yang diantaranya berupa pemberdayaan ekonomi rakyat, agar mampu menyekolahkan anaknya dan merubah pola pikir serta memotivasi para orangtua anak usia sekolah, agar ada perubahan sikap yang mengarah perubahan perilaku meningkatkan partisipasinya dalam ikut menjang keberhasilan Wajib Belajar.

## **B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH**

Dalam mencapai keberhasilan Wajib Belajar, dituntut untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu dengan kriteria tertentu. Proses keberhasilan tingkat pendidikan masyarakat merupakan keseluruhan aktivitas pelaksanaan Program Wajib Belajar dalam berbagai dimensi, baik internal maupun eksternal, termasuk di dalamnya faktor sosial ekonomi masyarakat, tingkat motivasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Wajib Belajar.

Dari hal tersebut, teridentifikasi beberapa masalah sebagai penyebab anak tidak bersekolah antara lain:

## **1. Faktor Sosial Ekonomi**

- a. Ekonomi orang tua lemah, karena pada umumnya buruhtani, kuli, buruh nelayan, sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya;
- b. Anak ikut membantu orang tua untuk mencari nafkah di sawah/ladang/laut, sehingga anak tidak sempat bersekolah;
- c. Adanya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan dimana orang tua tersebut bekerja, sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah (putus sekolah) atau tidak mampu menyekolahkan anaknya.
- d. Masyarakat setempat berpandangan bahwa anak perempuan berusia 13 tahun harus sudah menikah, bahkan di bawah usia tersebut ada yang sudah menikah, sehingga mereka tidak bersekolah.
- e. Adanya tradisi ritual, yang menyebabkan mereka tidak bersekolah.
- f. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah.

## **2. Faktor Motivasi**

- a. Karena tingkat pemahaman terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anak sangat kurang, maka tidak termotivasi untuk menyekolahkan anaknya,
- b. Walaupun mampu, namun dikarenakan merasa bahwa tanpa sekolah sudah dapat kaya, maka tidak ada motivasi untuk menyekolahkan anaknya.
- c. Adanya contoh yang tidak sekolah tetapi dapat sebagai juragan, maka tidak termotivasi untuk menyekolahkan anaknya.

- d. Pemberian motivasi dari aparat sangat kurang, terlebih ada warga yang sudah lulus perguruan tinggi tetapi tidak dapat bekerja, sehingga mereka lebih baik tidak sekolah tetapi bekerja.

### **3. Faktor Sikap:**

- a. Sikap terhadap pelaksanaan Wajib Belajar yang ditandai dengan ada atau tidak adanya partisipasi
- b. Sikap orang tua anak usia sekolah terhadap program-program kegiatan Wajib Belajar
- c. Dukungan atau tidak adanya dukungan terhadap program Wajib Belajar
- d. Tanggapan positif atau negatif terhadap pelaksanaan Wajib Belajar.

### **4. Faktor Partisipasi**

- a. Kurang adanya partisipasi dari warga terhadap pelaksanaan Wajib Belajar dalam hal ikut menyekolahkan anaknya.
- b. Kurang adanya turut serta dalam memberikan sumbangsih (tenaga, pikiran maupun material) terhadap pelaksanaan Wajib Belajar.
- c. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan Wajar, sehingga mereka tidak mengetahui tujuan yang sebenarnya.
- d. Masyarakat terutama pengusaha kurang berpartisipasi dari pemanfaatan hasil, karena tidak bersekolah maupun yang sudah lulus SD/SLTP upah mereka tetap sama, karena pekerjaannya tidak memerlukan kependaian intelektual, tetapi ketrampilan.

Faktor-faktor tersebut, akan diuji secara kuantitatif, dengan didukung oleh penelitian, dan ditambah informasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, agar lebih memperjelas pemecahan permasalahan yang ada, terutama adanya faktor-faktor lain di luar ketiga hal tersebut., sehingga hipotesa yang terbentuk dapat lebih teruji kebenarannya.

Dari hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“ Apakah rendahnya partisipasi dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh rendahnya tingkat Sosial ekonomi, tingkat motivasi dan sikap terhadap program Wajib Belajar yang selama ini ada ? “

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka secara umum, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar di kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial ekonomi orang tua anak usia sekolah dengan partisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar;
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan motivasi dengan partisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sikap dengan partisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara sosial ekonomi, motivasi dan sikap terhadap partisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Praktis.**

- a. Sebagai masukan bagi pelaksanaan Wajib Belajar, agar dapat melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, berupa kondisi tingkat sosial ekonomi, yang meliputi tingkat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, adat isitadat, budaya, tingkat motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan sikap terhadap perilaku partisipasi, berupa variabel-variabel yang mempengaruhi, sehingga diharapkan dapat mengambil kebijakan manajerial dalam melaksanakan kegiatan Wajib Belajar.
- b. Memberi masukan kepada Tim Koordinasi Penuntasan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung, agar lebih meningkatkan kinerja, agar keberhasilan Wajib Belajar di wilayah tersebut dapat berhasil dengan lebih baik.

##### **2. Manfaat Akademis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada para peneliti ilmiah khususnya masalah pendidikan, agar dapat terangsang untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi

keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan dasar, dan diharapkan dapat menemukan cara yang efektif untuk mengatasi kendala keberhasilannya.

- b. Menghasilkan bahan pustaka, khususnya tentang Wajib Belajar, yang mungkin dapat bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu sosial dan diharapkan ikut menjadi salah satu kekayaan dalam ilmu sosial sebagai acuan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

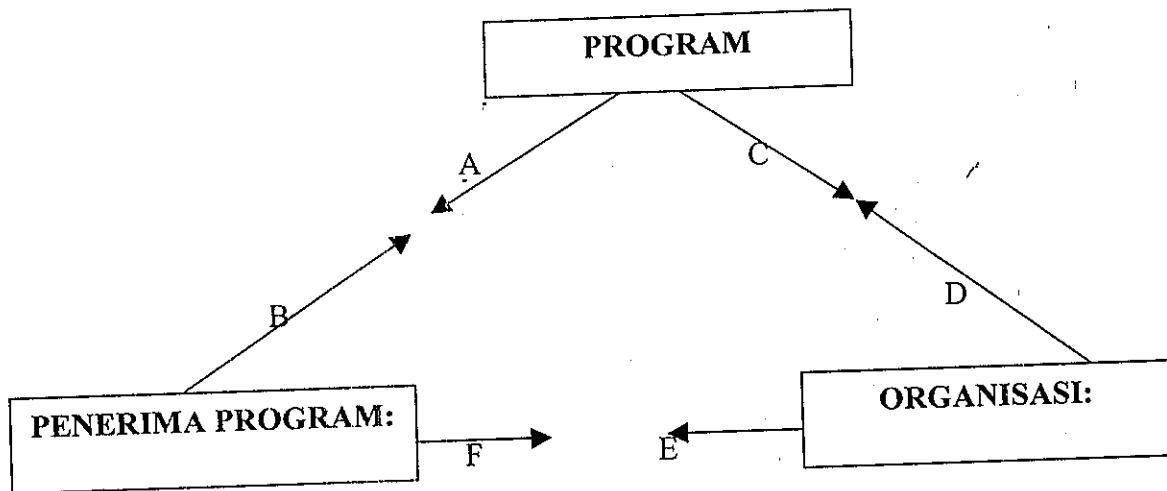
##### 1. Teori Yang Mendasari Penelitian

Berbicara tentang keberhasilan Wajib Belajar, tidak lepas dari masalah seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Wajib Belajar yang dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, tingkat motivasi, dan sikap.

##### a. Partisipasi ( Y )

Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Wajib Belajar, diperlukan adanya fungsi kesesuaian antara mereka yang dikenakan program tersebut, yaitu masyarakat yang dalam hal ini adalah orang tua yang mempunyai anak usia sekolah, program itu sendiri yaitu Wajib Belajar, dan organisasi yang membantu program yang dalam hal ini adalah pemerintah melalui Dinas P dan K dengan Tim Koordinasi Wajar, Keberhasilan program tersebut akan tidak dapat dicapai secara optimal, bila tidak ada hubungan yang erat antara pihak penerima bantuan dengan hasil program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu, dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari Tim Koordinasi Wajib belajar. Hal tersebut akan lebih jelas bila dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1 : Teori Fit Model



Sumber : David C Korten , 1988 : hal 24

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan program adalah Wajib Belajar, dan hasil-hasil program berupa keberhasilan Wajib Belajar, yaitu anak usia sekolah 7 – 15 tahun semua bersekolah
2. Penerima program adalah masyarakat, dengan kebutuhan-kebutuhan berupa biaya yang murah, adanya penyuluhan secara intensip, daya tampung yang memadai, adanya anjuran secara tegas
3. Dalam hubungannya dengan organisasi yang dalam hal ini adlah Dinas P dan K dan aparat pemerintah, maka persyaratan tugas yang dibebankan kepada Tim Koordinasi Wajib Belajar, diharapkan mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi dan penanaman sikap dan pemberian pengertian bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan anaknya.

Menurut D.C. Korten, (1988:240) daya kerja suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian mereka yang dibantu. Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan, terutama pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, diperlukan pemahaman tentang pengetahuan, sikap dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terlaksananya kegiatan Wajib Belajar. Kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anak, yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan anggota masyarakat disertai dengan meningkatnya sikap positif, dan adanya partisipasi anggota masyarakat, atau keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan terlaksananya Wajib Belajar tersebut.

Keikutsertaan masyarakat terhadap pendidikan merupakan kesadaran sosial masyarakat, yang menurut J.S. Roucek (Soerjono Soekanto, 1986 :3) dikatakan bahwa:

‘Kesadaran Masyarakat merupakan suatu kesadaran manusia akan setiap sikap, tindak pihak lain terhadapnya, dan terhadap pelbagai jenis perilaku’  
Hal ini mencakup suatu pengetahuan terhadap fakta bahwa pihak lain bereaksi terhadap obyek dan situasi yang sama, serta ada perbedaan dan persamaan antara reaksi mereka dengan reaksinya. Kesadaran salah satunya adalah merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Lebih lanjut diartikan sebagai perasaan rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran masyarakat ditentukan pula oleh tingkat pengetahuan yang dalam hal ini pemahaman terhadap pendidikan, karena

dengan tingkat pemahaman terhadap pendidikan yang tinggi, mereka akan dapat menyadari arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya. Dengan demikian kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap arti pentingnya pendidikan, dapat memberikan dorongan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Kunci keberhasilan pembangunan, terletak pada kesadaran masyarakat untuk siapa pembangunan itu dilakukan, dan terletak pada keterlibatan masyarakat dalam mendukung berbagai proses pembangunan berlangsung. Yang pertama, kesadaran akan memberikan dasar bagi partisipasi yang mengarahkan pada pendayagunaan masyarakat bagi kekuatan pembangunan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah keberhasilan Wajib Belajar.

Implementasi kebijakan program menurut Grindle (1980 Samodra Wibawa et.al / 1994 : 22) bahwa dalam melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh :

1. Isi Kebijakan yang meliputi:
  - a. Kepentingan yang dipengaruhi,;
  - b. Tipe manfaat
  - c. Derajat perubahan yang diharapkan
  - d. Letak pengambilan Keputusan
  - e. Pelaksana Program
  - f. Sumber daya yang dilibatkan

2. Konteks Implementasi yang meliputi :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dari masyarakat terhadap program tersebut, terlihat dari tinggi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap anjuran pemerintah dan partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu program Wajib belajar. Partisipasi diartikan sebagai peran serta individu atau kelompok dalam suatu kegiatan kehidupan kelompoknya pada program tertentu, yang dalam hal ini adalah Wajib Belajar. Disini dapat juga diartikan sebagai respon terhadap lingkungan (pendidikan) dalam bentuk persepsi (pandangan)

Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat mobilisasi. Partisipasi swakarsa muncul dari kesadaran (motivasi), kemauan sendiri, sukarela, sedangkan partisipasi mobilisasi digerakkan bahkan dipaksakan.

Istilah partisipasi dapat dikatakan sudah menjadi konsep umum yang perwujudannya dalam proses pembangunan sangat diinginkan orang banyak. Secara umum, "partisipasi" adalah keikutsertaan untuk mengambil peranan tertentu dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat mempunyai definisi yang mencakup tiga kategori sebagai berikut: Partisipasi sebagai keterlibatan aktif dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan

kemasyarakatan dan pengalokasian sumber untuk mencapai tujuan, pelaksanaan program secara sukarela dan pemanfaatan hasil - hasil dari suatu program atau proyek (Y. Slamet, 1994)

Sumitro (1995) menjelaskan bahwa dalam partisipasi masyarakat, banyak sekali faktor yang menentukan, diantaranya :

- 1). Kebutuhan masyarakat
- 2). Interes masyarakat
- 3). Adat istiadat dan, sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain.

Tidak jarang terjadi bahwa masyarakat lebih tahu permasalahan yang dihadapi, tetapi tidak mampu mengatasinya, karena keterbatasan-keterbatasan oleh karakter dan kemampuan masyarakat itu sendiri, atau adanya hambatan lingkungan alamnya.

Fairchild (1962, ) mengartikan partisipasi sebagai *sharing* dalam proses interaksi secara sadar, karena rasa kesetiaan dan tanggung jawab terhadap kelompok masyarakat. Sedangkan Susetiawan (1999) mengatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, bukan bagaimana masyarakat menentukan program untuk dirinya sendiri, yang dibantu oleh pemerintah yang memfasilitasinya. Hal itu dilakukan karena anggapan bahwa masyarakat masih bodoh, belum mampu membuat program.

Midgley membedakan partisipasi menjadi dua macam yaitu :

- 1). Partisipasi penduduk (*Popular Participation*), yang diartikan dengan pembangunan sosial dalam lingkup yang luas, serta menciptakan kesempatan bagi ketertiban masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, kehidupan sosial bangsa
- 2). Partisipasi masyarakat (*Community Participation*), diartikan sebagai keterlibatan masyarakat langsung dalam peristiwa lokal.

Tiga bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1990)

adalah :

- 1). Partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan proses, arah, strategi dan kebijakan pembangunan;
- 2). Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan;
- 3). Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Sedangkan Sayogo (1979) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat khususnya golongan petani adalah tidak hanya ikut melaksanakan dan mengenyam hasil, tetapi ada tiga hal yang lain yaitu ikut menentukan kebijakan pembangunan, ikut merencanakan pelaksanaan pembangunan dan ikut menilai hasil pembangunan.

Selanjutnya, Sayoga mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya pada tahap pelaksanaan program pembangunan, tetapi mulai dari rentang kontinum yang semuanya dilakukan oleh masyarakat sampai pada tingkat semua yang ditentukan oleh pihak di luar masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Sayoga bahwa ada tiga prasyarat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, yaitu:

- a. Adanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan
- b. Adanya kemauan anggota masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan anggota masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan yang ada.

Kaitannya dengan hal tersebut, adanya partisipasi dalam masyarakat harus dimulai dari proses perencanaan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan. Disini kelompok miskin kurang berpartisipasi karena tidak punya modal, rendahnya pendidikan dan nilai-nilai tradisional masih dianut.

Davis mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental atau emosional yang mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan kepada tujuan cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab terhadapnya (S. Sastropetro, 1988 :18)

Menurut Winardi (1981: 64) mengemukakan bahwa turut sertanya seseorang baik secara mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan, dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan hal tersebut.

John M. Cohen dan Norman Uphoff, membedakan partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
4. Partisipasi dalam penilaian (I Syamsi, 1988 : 143)

Sedangkan Sastrosaputro (1985) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi dengan pikiran
- b. Partisipasi dengan tenaga
- c. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga
- d. Partisipasi dengan keahlian
- e. Partisipasi dengan barang
- f. Partisipasi dengan uang
- g. Partisipasi dengan jasa-jasa.

Selanjutnya Sastrosaputra mengatakan bahwa sebagai sebuah representasi dari kumpulan faktor yang mempengaruhi, partisipasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang perlu untuk dikaji lebih mendalam, sehingga dapat diketahui tingkat signifikansi faktor tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dapat diklasifikasi sebagai berikut :

a. Tingkat Pemahaman

Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap program Wajib Belajar merupakan faktor pengaruh terhadap tingkat partisipasinya. Pemahaman

tersebut merupakan wujud dari proses mempelajari dan mengamati terhadap fenomena pembangunan yang dihadapi.

b. Tingkat Pendidikan

Bahwa makin tinggi pendidikan masyarakat, semakin kritis, dalam menangkap pesan pembangunan. Dengan demikian dikarenakan mereka lebih mengerti, maka partisipasi yang muncul berupa menyekolahkan anaknya, walaupun kurang mampu, dilandasi oleh kesadaran dan tulus, sehingga tidak hanya tenaga, dana melainkan ide-ide yang kreatif.

c. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat

Faktor kepentingan dan kebutuhan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembangunan Masyarakat yang mempunyai kepentingan, akan aktif untuk berpartisipasi

d. Kesadaran yang timbul dari diri sendiri maupun yang didorong dari luar.

e. Intensitas sosialisasi guna memahami dan mengerti dengan sebenarnya kebijakan dan program yang sedang dilaksanakan.

Partisipasi adalah keterlibatan mental atau emosional yang mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok, atau turut bertanggungjawab terhadapnya. Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses, terutama mengenai persoalan, dimana keterlibatannya dengan kegiatan yang ada. Istilah partisipasi secara umum adalah keikutsertaan untuk mengambil peranan tertentu dalam suatu kegiatan.

## **b. Sosial Ekonomi (X 1)**

Berbicara mengenai tingkat sosial ekonomi, kita harus mengetahui bagaimana pembangunan di bidang ekonomi tersebut, karena tingkat sosial ekonomi terkait erat dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan adalah sebuah upaya perubahan dari sebuah kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik, menurut kaidah-kaidah dalam kehidupan manusia. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam melaksanakan Wajib Belajar, diperlukan adanya perubahan dan proses pembangunan, yaitu perubahan dari sebuah kondisi, dari tidak bersekolah menjadi bersekolah, yang tidak mampu diberdayakan untuk menjadi mampu.

Hal tersebut

menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang ada terutama pada masyarakat pedesaan, kondisi masyarakat buruh tani, dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, papan, hidup sehat pendidikan dan sebagainya. Penduduk yang sosial ekonominya kurang, tidak berdaya memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, melainkan juga karena struktur sosial ekonomi, budaya dan sosial politik, tidak membuka peluang bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan (Mubyarto, 1997, 34)

Dengan demikian diharapkan bahwa masyarakat yang sosial ekonominya bagus, dapat membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama kemampuan untuk menyekolahkan anaknya.

Dalam kehidupan perekonomian, manusia merasa hidup berkekurangan, sehingga mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, berupa upaya untuk meningkatkan perekonomian, melalui perbuatan-perbuatan ekonomi, antara lain berladang, menangkap ikan, buruh tani, dan bekerja di pabrik dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Tingkat kemakmuran seseorang tergantung pada jumlah dan banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhinya. Semakin besar jumlah dan keanekaragaman kebutuhan yang dapat dipenuhi, maka semakin makmurlah mereka. Seseorang dikatakan makmur adalah situasi atau keadaan dimana seluruh kebutuhan yang beraneka ragam telah terpenuhi, berupa jasmani maupun rohani. Untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut, harus berupaya keras dengan berbagai cara antara lain menambah tenaga kerja di keluarga, yang dalam hal ini anak umur sekolah disuruh mencari kayu, buruh sehingga akhirnya mereka tidak sekolah, karena orang tua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Bryant dan White dalam Pramono (1999), menyebutkan bahwa pembangunan mencakup pengertian menjadikan menjadikan (*being*) dan mengerjakan (*doing*) artinya program pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan-perubahan fisik yang nyata, melainkan juga menghasilkan suatu hal

tertentu, misalnya menjadikan lebih pandai, trampil melalui sekolah. Disini harus diperhatikan kemampuan dan potensi individu-individu, disamping memperhatikan otonomi mereka secara pribadi. Dengan demikian posisi dan fungsi masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan pendidikan berkaitan dengan hasil dari pembangunan itu sendiri, yaitu berpusat pada manusia. Pendapat lain tentang pembangunan adalah usaha untuk mengurangi atau meniadakan kemiskinan atau suatu proses untuk mencapai kehidupan manusia yang adil dan makmur.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, dalam bukunya "*Ekonomi Pembangunan* (1955:39) yang dimuat dalam buku *PDE Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem* untuk proyek pembangunan, oleh Drs. Firman B Aji dan Drs. Martin Sirait, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita, dan menaikkan produktivitas per kapita dengan cara menambah peralatan, modal dan menambah skill

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam bukunya "*Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, melihat pembangunan dari sisi sikap mental, dan melihat bahwa manusia sebagai individu pelaku pembangunan membutuhkan lima konsep, yaitu :

- a. Untuk menghadapi hidup, setiap orang harus menilai tinggi unsur-unsur yang menggembirakan dari hidup.
- b. Setiap orang harus dapat bersikap aktif dan tidak pasif.
- c. Setiap orang harus berusaha menguasai alam serta kaidah-kaidahnya
- d. Setiap orang dalam aktivitasnya harus berorientasi ke masa depan

- e. Dalam membuat keputusan, orang harus berorientasi kepada sesamanya, menilai tinggi kerjasama dengan orang lain tanpa menghindari tanggung jawab sendiri.

Pembangunan adalah suatu proses perbaikan kualitas semua segi kehidupan manusia yang mencakup tiga aspek penting yaitu aspek peningkatan taraf hidup masyarakat, melalui proses pertumbuhan ekonomi, aspek penciptaan kondisi yang mendukung perkembangan harga diri melalui sistem ekonomi, politik dan sosial yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia, aspek perluasan kebebasan rakyat dalam memilih, melalui daerah pilihan yang diperlebar dengan memperbanyak varitas barang konsumsi dan jasa yang tersedia (Todaro, 1981 : 524. Jadi lewat pembangunan, yang dalam hal ini adalah pembangunan pendidikan dapat ditingkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi pendidikan diharapkan meningkatnya status pendidikan dan pengetahuan masyarakat, melalui peningkatan sarana dan prasarana fisik, maupun melalui kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada peningkatan status sosial tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa sosial ekonomi yang pada hakekatnya adalah kondisi kemampuan masyarakat, dalam mencukupi kebutuhan hidup terhadap keterlibatannya dalam mendukung berbagai proses kegiatan dalam masyarakat.

Indikator dari tingkat sosial ekonomi adalah:

1) tingkat penghasilan /Pendapatan yang meliputi :

- b). Kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup.

c). Pengeluaran

2) Kondisi sosial yang menyangkut masalah tingkat pendidikan

**c. Motivasi (X 2)**

Setiap manusia melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, pada dasarnya karena didorong oleh suatu motivasi tertentu. Motivasi adalah alasan-alasan, dorongan-dorongan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu. Motivasi berhubungan dengan faktor psikologis seseorang, yang mencerminkan hubungan atau interaksi antara sikap, kebutuhan dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia.

Motivasi adalah dorongan-dorongan atau alasan-alasan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu. **Gibson** memberikan batasan bahwa motivasi adalah konsep yang menguraikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang, yang menilai dan mengarahkan perilaku (Gibson, 1984: 94) Motivasi berhubungan dengan (a) arah perilaku (b). kekuatan respon (c) Ketahanan perilaku. Motivasi berhubungan erat dengan bagaimana perilaku itu dimulai, dikuatkan dan disokong dan diarahkan, dihentikan dan reaksi subyektif macam apaakah yang timbul pada saat adanya kegiatan.

Dari hal yang demikian kondisi sosial ekonomi yang didalamnya termasuk tingkat pendidikan, tingkat pekerjaannya, tingkat pendapatan dan faktor budaya akan mempengaruhi motivasi seseorang, sikap dan menimbulkan perilaku berpartisipasi dalam segala bentuk untuk keberhasilan Wajib Belajar dengan menyekolahkan anaknya.

Motivasi timbul karena dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri manusia, yang dapat berupa sikap, kepribadian, pendidikan pengalaman, pengetahuan dan cita-cita. Sedangkan faktor dari luar, dapat berupa rangsangan-rangsangan atau keinginan-keinginan sama dengan kelompok masyarakat yang ada, misalnya kepingin kaya, karena melihat orang lain sukses, kepingin pintar dan sekolah karena melihat orang lain bersekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya motivasi, maka dapat mendukung keberhasilan suatu program.

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan motivasi yang memberikan gambaran bahwa motivasi adalah dorongan atau kekuatan sebagai akibat dari keinginan seseorang untuk memenuhi dari berbagai macam kebutuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sondang P Siagian (1997 : 36,) yang mendefinisikan motivasi adalah dorongan yang berasal dari dalam dan luar individu untuk melakukan aktivitas tertentu. Pendapat tersebut dapat ditafsirkan bahwa motivasi yang ada pada diri seseorang dapat bersumber dari diri sendiri maupun yang disebabkan dari luar. Atkinson dalam Cofer (1991 : 8) menyatakan bahwa motivasi adalah kecenderungan seseorang untuk bereaksi sesuai dengan harapan yang dimiliki akibat sesuatu stimulus yang diterimanya.

Menurut George Terry dan LW Rue, mendefinisikan motivasi sebagai membuat seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat, karena orang itu ingin melakukannya (GR Terry, 1988, 168)

Sedangkan Gibson memberikan batasan motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang, yang menilai dan mengarahkan perilaku (Gibson, 1984, 94), dan menurut Duncan, motivasi adalah suatu usaha sadar untuk mempengaruhi perilaku seseorang, agar supaya mengarah tercapainya tujuan (Wahjosumidjo, 1984, 178)

Dari definisi-definisi tersebut, dapat diketahui bahwa motivasi merupakan dorongan yang berada dalam pribadi seseorang, yang dalam hal ini adalah dorongan untuk menyekolahkan anaknya, dimana hal ini akan mewujudkan keanekaragaman perilaku yang diarahkan pada satu tujuan tertentu, yaitu kepada masalah pendidikan, khususnya pelaksanaan Wajib Belajar.

Motivasi terbentuk dari persepsi individu, yang dalam hal ini adalah persepsi tentang arti pentingnya pendidikan bagi anaknya, kearah perilaku yang mendorong dan mengarahkan kegiatan seseorang, sehingga dampak motivasi mempunyai pengaruh langsung dengan kebutuhan yang diperlukan individu, yaitu pendidikan

Dengan kata lain adanya kebutuhan dimaksud, mendorong manusia untuk bertindak mencapai kebutuhannya tersebut. Dorongan inilah yang dalam istilah psikologi dan manajemen, dikenal sebagai motif. Dengan adanya motif tersebut, seseorang akan melakukan kegiatan sesuai dengan dorongan yang ada. Manusia dalam berperilaku ada yang

mendasari, menggerakkan dan mengarahkan karena adanya dorongan kebutuhan.

Menurut Alport, yang dikutip Prof. Dr. Kasmiran Wuryo, MA dan Drs. Ali Syaifullah Motif adalah minat, dan minat selalu mengalami perkembangan sampai tercapainya suatu kemantapan dan yang akan menentukan kemantapan kepribadiannya, tujuan hidupnya dan tingkah laku perbuatannya. Dalam hal ini, niat atau motif yang menentukan pola tingkah laku perbuatannya merupakan inti kepribadian seseorang. Kemantapan motif dipandang Alport sebagai kemantapan kepribadian.

Menurut Atkinson dan Reitman 1958 dalam bukunya Siti Rahayu Hadinoto Hal 7 dikatakan bahwa : Motif adalah keadaan umum yang merupakan sifat bawaan seseorang. Hal ini merupakan dorongan, sedangkan motivasi adalah aktualisasi dari dorongan yang secara umum dapat terlihat dalam penampilan. Motif itu merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan alasan, dorongan dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan dia berbuat sesuatu. Motif adalah sesuatu kekuatan atau dorongan dari dalam individu yang masih terpendam dengan sifat potensial untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada suatu tujuan tertentu. Sedangkan motivasi adalah aktualisasi dari motif.

Dari beberapa pengertian dapat dikemukakan bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam maupun luar sehingga orang mau melakukan kegiatan, yang didasari adanya motif tertentu.

Indikator dari motivasi tersebut adalah :

a. Dorongan dari dalam yang meliputi :

- 1). Tingkat pemahaman terhadap arti penting program
- 2). Tingkat ketaatan terhadap kewajiban mengikuti program
- 3). Tingkat kebutuhan akan pendidikan
- 4). Tingkat kepuasan terhadap pendidikan
- 5). Tingkat minat dan keinginan untuk mengikuti program
- 6). Persepsi terhadap arti pentingnya program.
- 7). Tingkat kemantapan terhadap program

b. Dorongan dari luar meliputi :

- 1). Adanya Himbauan oleh orang luar, Pemerintah atau tokoh masyarakat
- 2). Adanya contoh yang positif dari luar, yaitu contoh orang sukses, kaya terhormat, pekrejaan yang baik, karena pendidikannya tinggi
- 3). Adanya harapan positif karena adanya stimulus
- 4). Adanya persepsi

**d. Sikap (X3)**

Menurut Gibson (1984 :57) Sikap merupakan faktor yang menentukan perilaku, karena sikap berhubungan dengan persepsi, kepribadian, belajar dan motivasi. Sikap adalah kesiap siagaan mental yang diorganisasi lewat pengalaman, yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan seseorang terhadap orang, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya.

Sikap mempunyai pengaruh tertentu pada seseorang, karena sikap menentukan kecenderungan orang terhadap segi tertentu, sikap memberikan dasar emosional yang berhubungan dengan interpersonal. Sikap merupakan bagian hakiki dari kepribadian seseorang, karena mencari kesesuaian antara kepercayaan dan perasaan mereka terhadap obyek., yang bisa berubah-ubah yang disebabkan karena adanya perasaan dan kepercayaan. Partisipasi berkaitan erat dengan perilaku, yang menurut James L Gibson dalam bukunya Organisasi dan Manajemen 1984, perilaku adalah apa yang dilakukan orang tertentu, sehingga menimbulkan perbedaan individual, yang merupakan suatu ciri dari manusia perseorangan. Perbedaan tersebut mempunyai tiga asumsi bahwa :

- (1) Individu yang satu berbeda dengan yang lain dengan cara yang mencolok
- (2) bahwa setiap perbedaan individual yang khusus berlaku dalam banyak situasi,
- (3) bahwa setiap individu mempertahankan perbedaannya dalam waktu yang lama.

Beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku dalam buku Organisasi dan Manajemen (Gibson 1984) adalah:

**a. Variabel Fisiologis yang meliputi :**

- 1). Kemampuan fisik .
- 2). Kemampuan mental individu

**b. Variabel Lingkungan yang meliputi :**

- 1). Keluarga,
- 2). Kebudayaan .
- 3). Klas sosial,

**c. Variabel Psikologis yang meliputi:**

- 1). Persepsi,
- 2). Sikap
- 3) Kepribadian
- 4) Motivasi.

Orang mempunyai sikap yang tersusun, yang terdiri dari berbagai macam komponen afektif dan kognitif yang keduanya saling ketergantungan. Gerungan (1996:149) menjelaskan tentang sikap sebagai berikut :

“ Sikap ( attitude) dapat diterjemahkan sebagai sikap terhadap obyek tertentu, yang berupa sikap pandangan atau sikap perasaan. Sikap itu disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap obyek tersebut.”

Prof. Dr. Mar'at, mengemukakan bahwa sikap adalah kesiapan atau kesediaan bertindak (Effendi, 1989 : 121). Sedangkan Berkowitz (Aswar, 1988 : 3) mengemukakan bahwa sikap adalah sikap seseorang terhadap obyek adalah perasaan mendukung atau memihak ataupun perasaan tidak mendukung terhadap obyeknya. Menurut Edward, bahwa sikap seseorang, merupakan faktor penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana

berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau persepsinya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya (Purweni, 1991 : 30) Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan DC Korten & Sjahrir , ( 1988 : 240) dalam buku Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, bahwa keberhasilan program tersebut tidak akan tercapai secara optimal bila tidak ada hubungan yang erat antara pihak penerima dengan pemberi bantuan yaitu yang mempunyai program.

Menurut Rosenberg (Gibson 1984 :58) bahwa afek, kognisi dan perilaku menentukan sikap, sedangkan sikap menentukan afek, kognisi dan perilaku. Afek adalah komponen perasaan dari sikap yang dapat dipelajari lewat teman, keluarga, sedangkan kognisi sikap terdiri dari persepsi, pendapat dan kepercayaan. Komponen perilaku dari sikap berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak

Sikap dibentuk dari keluarga, teman sejawat masyarakat dan pengalaman pribadi sebelumnya, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat dan bahasa dari masyarakat

Faktor-faktor pembentuk sikap adalah :

1). Keyakinan atau nilai.

Keyakinan yang dimaksud adalah pengertian atau informasi yang dianggap benar oleh subyek tentang lingkungannya.. Sedangkan nilai adalah pendapat umum tentang apa yang diinginkan. Informasi yang

diperoleh subyek, akan mempengaruhi sikap subyek terhadap hal tersebut. Dan Sikap digunakan untuk menyatakan nilai dasar dan memberi kesan kepada orang lain. Kepuasan didapatkan bila subyek konsisten dalam mengambil dan menyatakan sikap sesuai dengan nilai identitasnya. Dengan demikian orang akan berusaha menjada hubungan yang konsisten antara keyakinan, nilai dan sikap.

## 2). Kebutuhan pribadi

Kebutuhan pribadi adalah hal yang merangsang atau mendorong subyek sehingga melandasi pengambilan sikap antara lain :

- a). Kebutuhan akan imbalan
- b). Kebutuhan untuk mempertahankan diri
- c). Pengertian dan pemahaman akan lingkungan.

Dampak perilaku terhadap sikap dapat dilihat dengan cara tertentu untuk menyesuaikan sikap dengan perilaku tersebut. Oleh karena itu, perilaku dalam keadaan tertentu akan mempengaruhi sikap, dan sikap itu sendiri dapat diubah agar konsisten dengan perilaku. Oleh karena itu strategi untuk mengubah sikap adalah :

- a). Mengubah keyakinan dan nilai yang ada;
- b). Menciptakan kebutuhan dan aspirasi pribadi yang baru
- c). Menggunakan pengaruh kelompok
- d). Memahami faktor pengaruh.

Dari beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sikap adalah suatu perasaan, pandangan, maupun kecenderungan bertindak terhadap orang, kelompok, atau gagasan atau obyek lain.

Indikator dari sikap adalah :

- a). Kepedulian terhadap program
- b). Respon terhadap kondisi pendidikan
- c). Keyakinan masa depan
- d). Kepuasan dan kebanggaan
- e). Kebutuhan
- f). Sikap dari masyarakat

#### **e. Wajib Belajar**

Berbicara mengenai Wajib Belajar mau tidak mau harus mengerti dengan sebenarnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan.

Pendidikan berasal dari kata edukasi, yang berasal dari bahasa latin *educatio*, yang secara harfiah berarti memimpin atau menarik keluar, sehingga dapat diartikan pembebasan dan emansipasi pribadi atau masyarakat dari kebodohan, kemiskinan dan berbagai macam bentuk perbudakan, dengan demikian pendidikan bukanlah sekedar masalah teknis, melainkan etis. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai, melainkan pribadi-pribadi atau masyarakat yang berwatak.

Sebagai mediasi, pendidikan diharapkan menjadi proses yang mengarah pada perubahan sosial. Oleh karena itu lingkungan pendidikan

diharapkan menjadi tempat yang subur bagi munculnya pelaku-pelaku perubahan sosial. Itu berarti bahwa melalui proses pendidikan diharapkan tertanam nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki dalam semua orang, selanjutnya mereka diharapkan mempunyai pengaruh dalam proses transformasi sosial (Van Lith, SJ, 1863 – 1926)

Pengertian pendidikan dari segi etimologis, berasal dari bahasa Yunani, *Paedagogike* yang terdiri dari kata *Paes/Pais* yang artinya anak, dan kata *Ago/Again* yang berarti aku membimbing, sehingga pendidikan diartikan aku membimbing anak dengan perbuatan inti mendidik, tugasnya hanya mendidik, yang suatu saat harus melepaskan anak itu kembali.

Menurut John Dewey dalam Abu Achmadi, (1991, 69) dikatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental, secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.

Sedangkan SA Bratanata dkk (Abu Achmadi, 1991, 69) mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang disengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya untuk mencapai kedewasaannya.

Menurut Ensiklopedi Pendidikan (Munandir, 2001, 229) bahwa pendidikan adalah usaha sadar memfasilitasi orang sebagai pribadi yang utuh sehingga teraktualisasi dan dikembangkan potensinya mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang dikehendaki melalui belajar.

Pendidikan adalah proses mengaktualisasi potensi insani (Robert Zais, 1976)

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pada hakekatnya merupakan perwujudan nyata tema pemerataan memperoleh pendidikan dasar bagi anak-anak yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun.

Dalam pemerataan kesempatan ini terkandung tiga pengertian yaitu :

1. Ekuualitas, yang berarti setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan. Disini penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan, diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Aksebilitas, yang berarti bahwa setiap anak tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, bahkan yang memiliki kelainan fisikpun mendapat hak untuk memperoleh pendidikan ditempat yang khusus, berupa pendidikan luar biasa ;

3. Keadilan atau Akuitas, yang berarti bahwa setiap anak akan diperlakukan menurut kemampuan dan potensi yang ada, tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap anak yang kurang mampu.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun mengandung arti sebagai "*basic universal education*," yaitu terbukanya secara luas bagi semua peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur yang mengikuti pendidikan dengan ciri-ciri :

- a. Tidak bersifat paksaan melainkan persuasif;
- b. Tidak ada sanksi hukum, dan yang lebih menonjol adalah aspek moral, yakni orang tua dan peserta didik merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan dasar;
- c. Tidak diatur dengan undang-undang tersendiri;
- d. Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi dalam pendidikan dasar.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Gerakan Wajib Belajar merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia, yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, agar tujuan pembangunan dapat dicapai.

## **2 . Konsep – konsep Penelitian**

### **a. Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi ( X1 – Y)**

Tingkat Sosial Ekonomi masyarakat yang meliputi kemampuan ekonomi, interaksi sosial, tingkat pendidikan seseorang, akan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi. Seseorang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, akan tidak ada kemampuan untuk berpartisipasi, kecuali mereka yang mempunyai motivasi tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka hanya berfikir untuk memenuhi kebutuhan pokok minimalnya, sehingga tingkat partisipasi akan rendah

### **b. Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap motivasi. (X1 – X2)**

Sosial ekonomi yang dimaksud adalah meliputi bidang kemampuan materi, yaaitu penghasilan dan pengeluaran, tingkat pendidikan, termasuk budaya. Seseorang dikatakan makmur, adalah keadaan dimana mereka dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang beraneka ragam, berupa kepuasan jasmani dan rokhani, sehingga untuk mencapai derajat tersebut, seseorang kebanyakan bekerja keras untuk memenuhi keadaan tersebut. Penduduk yang sosial ekonominya kurang tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhannya walaupun kebutuhan dasar sekalipun, yaitu sandang papan, pangan, kesehatan dan pendidikan. Dan biasanya orang miskin dikarenakan struktur ekonomi, politik maupun budaya, tidak membuka peluang bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinannya (Mubyarto, 1997 : 34) Dengan demikian bila mereka tidak mampu, namun dapat memahami arti pentingnya pendidikan, mereka akan termotivasi, begitu

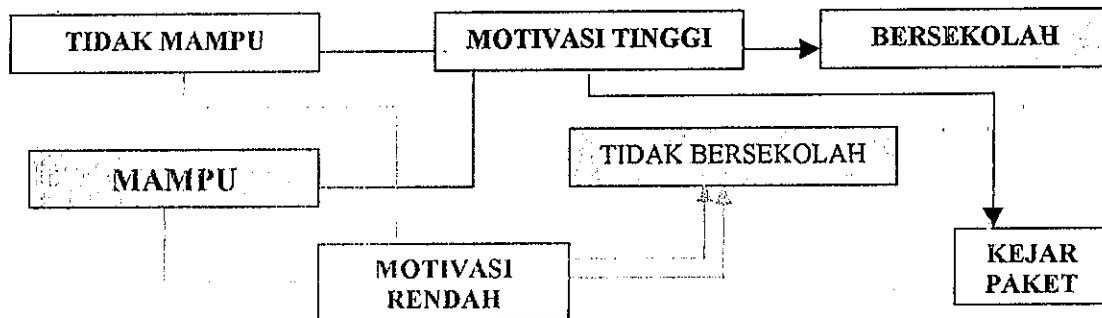
pula bila mereka yang tadinya tidak mampu, tetapi mengetahui bahwa dengan pendidikan yang tinggi, akan dapat meningkatkan sosial ekonominya, maka mereka akan termotivasi.

Beberapa kemungkinan hubungan/pengaruh sosial ekonomi terhadap motivasi untuk menyekolahkan anaknya.:

- 1). Mereka tidak mampu, tetapi mereka tetap menyekolahkan anaknya, berarti dorongan dari dalam sangat kuat, karena tidak terpengaruh oleh kondisi sosial ekonominya. Disamping itu kemungkinan faktor eksternal dominan juga, walaupun tidak mampu mereka menyekolahkan anaknya, yang dimungkinkan adanya pengaruh tokoh masyarakat ataupun seringnya diadakan sosialisasi.
- 2) Tidak mampu tetapi mempunyai keinginan menyekolahkan anaknya tetapi tidak dapat, akhirnya memilih kursus pada Kelompok Belajar Paket A atau Paket B.
- 3) Mampu, dan menyekolahkan anaknya, disebabkan adanya motivasi ingin menjadikan anaknya seperti dirinya., yaitu kaya, berpendidikan, ataupun dia menginginkan anaknya lebih tinggi status sosial ekonominya daripada orang tuanya.
- 4) Mampu tetapi tidak mau menyekolahkan anaknya,. Disini motivasinya rendah, sehingga tidak menyekolahkan anaknya, tetapi termotivasi secara negatif dikarenakan adanya contoh dirinya, yaitu walaupun tidak sekolah tetapi dapat kaya, sehingga perhatian terhadap masalah-masalah pendidikan sangat kurang.

Visualisasi hubungan sosial ekonomi tersebut dapat lebih dijelaskan pada gambar berikut

Gambar 2  
Visualisasi hubungan Sosial Ekonomi dengan Motivasi



Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sosial ekonomi berpengaruh terhadap motivasi

**c. Pengaruh Motivasi terhadap partisipasi (X2 – Y)**

Motivasi adalah dorongan yang berada dalam diri manusia untuk mencapai tujuannya, sehingga manusia berusaha memenuhi. Dorongan inilah (dari dalam maupun dari luar) yang mendorong mereka melakukan kegiatan sesuai dengan programnya, sesuai dengan keahliannya, kemampuannya, berupa partisipasi dalam bentuk apapun, tenaga, uang pemikiran dan lain sebagainya, Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi.

Menurut Davis, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan kepada tujuan cita-cita kelompok. Disini keberhasilan Wajib Belajar yang sudah dipahami menimbulkan dorongan mereka untuk berpartisipasi dalam hal apapun untuk keberhasilan wajar, karena mereka memahami betapa pentingnya pendidikan. Tanpa didasari adanya

partisipasi, keberhasilan Wajib Belajar tidak akan tercapai. Dengan demikian motivasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan wajar, yaitu partisipasi dalam ikut menyekolahkan anaknya.

**d. Pengaruh Motivasi terhadap Sikap (X2 –X3)**

Sikap sangat dipengaruhi oleh faktor faktor yang datangnya dari luar maupun dari dalam, yang dalam hal ini adalah motivasi, karena dengan termotivasinya seseorang terhadap suatu kegiatan, maka ia akan memiliki sikap ikut serta dalam program tersebut. Seseorang dengan motivasi tinggi, akan bersikap partisipasi, sedang orang yang motivasinya rendah, mereka akan bersikap acuh, terlebih adanya faktor luar yang tidak mendukung sikap, misalnya kondisi ekonomi.

Motif memberikan landasan bagi subyek untuk melakukan sesuatu, dan motivasi memberikan daya atau kekuatan intrinsik maupun ekstrinsik pada subyek dalam melakukan tindakan. Selanjutnya baik motif maupun motivasi memberikan arah dari suatu perbuatan untuk mengontrol, mengendalikan dan mengarahkan perilaku.

**e. Pengaruh Sikap terhadap Partisipasi. (X3 – Y)**

Sikap merupakan faktor yang menentukan perilaku, yang dapat menentukan kecenderungan seseorang terhadap kegiatan sesuatu. Karena sikap mengandung komponen afektif, kognitif dan perilaku, maka dapat menimbulkan partisipasi, karena sikap dan perilaku merupakan komponen tindakan. Sikap adalah suatu perasaan, pandangan maupun kecenderungan untuk bertindak terhadap sesuatu, orang, kelompok atau gagasan, dimana

faktor-faktor pembentuk sikap adalah keyakinan atau nilai dan kebutuhan pribadi, sedangkan perilaku adalah tanggapan atau reaksi subyek baik gerakan fisik maupun pernyataan verbal berupa lisan maupun tulisan

Dari hal tersebut akan terbentuk dalil-dalil sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat sosial ekonomi dengan partisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan Partisipasi pelaksanaan Wajib Belajar;
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap dengan partisipasi pelaksanaan Wajib Belajar.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sosial ekonomi, motivasi dan sikap terhadap perilaku partisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar.

## **B. PEMBAHASAN PENELITIAN YANG RELEVAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Wajib Belajar di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes dan lebih khusus di Kecamatan Tanjung, telah diadakan evaluasi pelaksanaan Wajib Belajar Oleh Tim Koordinasi Wajib Belajar Propinsi Jawa Tengah, dengan melibatkan berbagai unsur/instansi yang tergabung dalam Tim Koordinasi Wajib Belajar Kabupaten Brebes secara rutin setiap tahun untuk mengetahui perkembangan di lapangan dari sisi pemebri bantuan, organisasi maupun dari sisi penerima bantuan/program. Hasil tersebut pada tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Dari sisi kelembagaan di tingkat Desa, telah dibentuk dimana Kepala Desa sebagai Ketua Tim Koordinasi Wajib Belajar Tingkat Desa, dengan dibantu oleh Tokoh Masyarakat dan Guru di wilayah tersebut.
2. Telah diadakan rapat koordinasi secara rutin setiap tiga bulan sekali, namun hasilnya belum menggembirakan, dan kinerja tim dinilai masih rendah.
3. Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Tanjung adalah :
  - a. Faktor ekonomi, berupa lemahnya ekonomi orang tua, karena pada umumnya mereka adalah buruh tani, nelayan dan lain sebagainya
  - b. Anak sering membantu orang tua bekerja di sawah, ladang maupun sebagai nelayan
  - c. Anak membantu orang tua untuk mencari tambahan nafkah berupa buruh butik yaitu memotong daun bawang
  - d. Adanya pemutusan hubungan kerja, karena kondisi lahan
4. Letak sekolah yang sangat jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau dengan kendaraan, dan pada umumnya penduduk tidak punya.
5. Faktor adat istiadat, berupa masih adanya orang tua yang menikahkan anaknya pada usia sekolah, dan adanya tradisi ritual, yang menyebabkan anak tidak bersekolah
6. Adanya beberapa contoh di Kecamatan Tanjung, walaupun tidak bersekolah, namun menjadi pengusaha kaya.
7. Faktor Sarana prasarana, berupa daya tampung belum seimbang, penyediaan tanah sangat sulit, terutama yang sesuai dengan pemetaan soleah, kurangnya modul dan tutor

8. Faktor Drop Out akibat krisis ekonomi, anak membantu orang tua untuk mencari nafkah

### C. HIPOTESIS

Penelitian yang penulis lakukan sebenarnya tidak semata-mata ditujukan untuk menguji hipotesis yang diajukan, akan tetapi penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan jawaban sementara, fakta tentang pengaruh sosial ekonomi, motivasi dan sikap terhadap partisipasi pelaksanaan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung. Hubungannya dengan hipotesis adalah, apakah fakta yang ditemukan di lapangan itu mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti, dan apakah dapat diterima atau ditolak. Jika fakta yang ditemukan di lapangan setelah diuji melalui statistik hasilnya berlawanan dengan rumusan hipotesis (dalam arti tidak mendukung), maka hipotesis yang diajukan peneliti tidak diterima atau ditolak. Pernyataan diterima atau ditolaknya hipotesis, tidak dapat diartikan dengan pernyataan keberhasilan atau kegagalan penelitian. Perumusan hipotesis ditujukan untuk landasan logis dan pemberi arah kepada proses pengumpulan data, serta proses penyelidikan itu sendiri ( John W. Best, dalam Sanapiah Faisal, 1982)

Hipotesis dirumuskan, utamanya berdasarkan hasil telaah pustaka. Dengan demikian bentuk rumusannya harus sejalan dengan hasil telaah pustaka atau bahasan teoritik dan relevan dengan rumusan masalah.

## 1. Model Verbal

### a. Hipotesis Minor

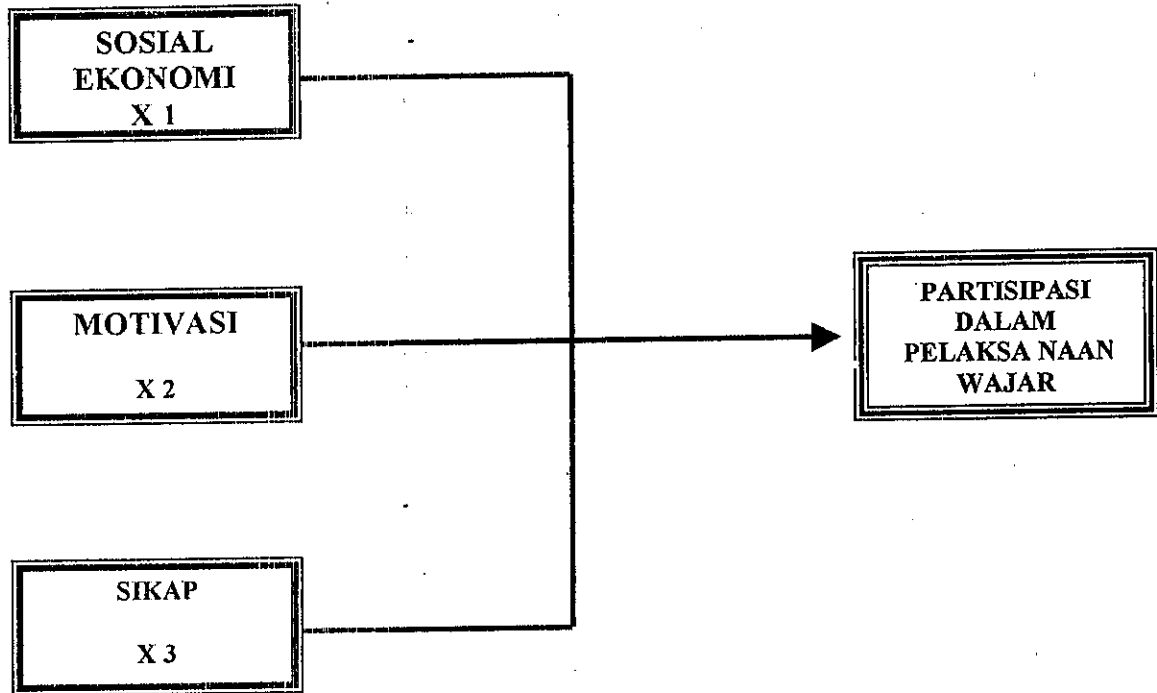
Hipotesis minor adalah hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor, jabarannya sebagai berikut :

- 1) Ada hubungan positif dan signifikan antara tingkat Sosial Ekonomi dengan partisipasi pelaksanaan Wajib Belajar
- 2) Ada hubungan positif dan signifikan antara tingkat Motivasi dengan Partisipasi
- 3) Ada hubungan positif dan signifikan antara Sikap , dengan Partisipasi
- 4) Ada hubungan positif dan signifikan antara Sosial Ekonomi, Motivasi dan Sikap dengan Partisipasi

### b. Hipotesis Mayor

Hipotesis mayor adalah hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh subyek penelitian, sehingga dalam analisis terdapat simpulan sementara yaitu ada hubungan positif dan signifikan antara sosial ekonomi , motivasi dan sikap, terhadap partisipasi masyarakat berkaitan dengan Wajar Pendidikan Dasar

## 2. Model Geomatik



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. RANCANGAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif Explanatori, yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan, antara variabel yang diteliti. Agar dapat mempunyai gambaran yang menyeluruh mengenai tahapan-tahapan yang akan peneliti laksanakan, yang secara garis besar ada 3 hal pokok yaitu :

1. Pengertian perilaku sosial sebagai obyek ilmiah
2. Pendekatan yang mungkin dalam menanggapi perilaku sosial,
3. tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ilmiah.

Langkah langkah atau tahapan yang akan peneliti tempuh adalah :

1. Perumusan permasalahan yang sudah ditentukan dalam Bab Kesatu, yaitu rumusan yang terarah dan terinci mengenai apakah kurang berhasilnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh rendahnya tingkat sosial ekonomi, tingkat motivasi, sikap terhadap partisipasi dalam melaksanakan program Wajib Belajar
2. Penyusunan desain penelitian yang berupa asumsi asumsi (anggapan dasar) peneliti mengenai judul yang peneliti ketengahkan, dan adanya dugaan mengenai jawaban (hipotesis) yang diperkuat dengan studi kepustakaan sebagai landasan teori.

3. Penetapan sampel, yang berpedoman pada teknik sampel, yang dalam hal ini menggunakan teknik *Two Stages Random Sampling*, dengan skala ordinal, sehingga menggunakan rumus korelasi Rank Kendall.
4. Penyusunan dan teknik pengumpulan data, yaitu merupakan cara pengumpulan sampel dari responden, melalui kuesener, dengan pedoman wawancara.
5. Apabila seluruh data terkumpul, maka akan di analisis data tersebut, yaitu uraian tentang variabel apa yang hendak peneliti analisis, dan tabel yang dihasilkan.
6. Teknis analisis dengan menggunakan statistik, untuk mengukur kekuatan hubungan variabel. Disini variabel dalam data dipelajari dengan melihat penyebaran jawaban responden, untuk masing-masing kategori variabel yang bersangkutan, juga hubungan yang terdapat diantara variabel variabel di dalam data.
7. Penyajian data secara obyektif dari hasil penelitian lapangan, secara prosedural dan wajar, dilengkapi dengan tabel, serta penjelasan, sehingga hasil penelitian akan dapat terbaca dengan mudah.

Dengan demikian dalam merancang penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, agar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dalam penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat mengambil kesimpulan populasi dengan penentuan sampel, yang dalam hal ini adalah orang tua anak usia sekolah yang

bersekolah yang diharapkan dapat memenuhi persyaratan populasi yang mendekati kebenaran.

## **B. RUANG LINGKUP PENELITIAN/FOKUS PENELITIAN.**

Sebenarnya masalah-masalah yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan Wajib Belajar, sangatlah banyak, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor sosial ekonomi, yang meliputi tingkat kemampuan ekonomi orang tua dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, serta faktor pola pikir dan budaya masyarakat, faktor geografi, sarana mobilitas, jarak pemukiman dengan sekolah, jumlah sekolah yang tidak memenuhi daya tampung, sistem, sosialisasi, serta faktor lain, yang dapat menghambat keberhasilan Wajib Belajar.

Oleh karena itu, agar dalam pembahasan tidak terlalu terbias dengan faktor yang terlalu banyak tersebut, maka penelitian ini lebih difokuskan pada faktor sosial ekonomi, tingkat motivasi, sikap yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, yang dapat menghambat atau mendukung keberhasilan Wajib Belajar.

## **C. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tanjung merupakan kecamatan yang Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) nya, rendah.

2. Daerahnya bervariasi dari sisi kehidupan dengan masyarakat nelayan yang tingkat ekonominya bervariasi, dan ada petani bawang dan pengusaha, serta buruh.
3. Banyaknya anak usia sekolah yang membantu orang tua dalam mencari nafkah, sebagai buruh butik (menggunting daun bawang) dengan penghasilan yang cukup tinggi sehingga lebih senang tidak bersekolah, disamping ada dorongan dari orang tua.
4. Budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat motivasi, sikap dan partisipasi terhadap Wajib Belajar.
5. Banyaknya orang tua anak usia sekolah yang pendidikannya rendah sehingga pola pikir mereka terhadap pendidikan, tidak mendukung.

Alasan-alasan tersebut yang mendasari penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tanjung.

#### **D. VARIABEL PENELITIAN**

Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai, atau konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel dapat diartikan pula sebagai suatu konsep yang memiliki nilai ganda, atau dengan perkataan lain adalah suatu faktor yang jika diukur akan menghasilkan skor yang bervariasi.

Variabel penelitian merupakan gejala yang menjadi obyek penelitian. Menurut Frankael dan Wallen (1990 :36) variabel adalah suatu konsep benda yang bervariasi. Setelah mengemukakan berbagai preposisi berdasarkan konsep dan teori tertentu, penulis akan menentukan variabel-variabel penelitian dan

selanjutnya merupakan hipotesa berdasarkan hubungan variabel, karena inti penelitian adalah mencari hubungan antara variabel, dimana hubungan yang paling besar. Adalah hubungan antara dua variabel pengaruh (variabel bebas) yang pada umumnya merupakan hubungan kausal, yang lebih cenderung digunakan dalam penelitian sosial.

Variabel dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, dan dilihat dari fungsinya maka terdapat variabel bebas (independent variable), variabel tak bebas atau tergantung, atau terikat (dependent variable) dan variabel perantara atau intervening variable.

### **1. Klasifikasi variabel**

- a. Partisipasi sebagai variabel tergantung.
- b. Sosial ekonomi sebagai variabel bebas pertama
- c. Motivasi sebagai variabel bebas kedua
- d. Sikap sebagai variabel bebas ketiga.

### **2. Definisi Konseptual**

Konsep merupakan unsur penelitian yang sangat penting, disamping merupakan definisi yang selalu dipakai oleh peneliti, guna menggambarkan secara abstrak fenomena sosial akan gejala yang diamati.

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.

Dalam kenyataan, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep dengan realita, semakin mudah konsep itu diukur.

Oleh Masri Singarimbun (1985 : 67) dikemukakan bahwa konsep adalah unsur penelitian yang penting , menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alam. Sedangkan definisi adalah pernyataan yang dapat mengartikan atau untuk memberi makna suatu istilah atau konsep tertentu. Dengan demikian, definisi konsep adalah penjelasan mengenai pembatasan pengertian suatu fenomena yang menggunakan suatu abstraksi dari hal hal yang diamati, yaitu variabel-variabel yang ada dalam hipotesa sebagai berikut :

- a. Sosial ekonomi, adalah kondisi kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup terhadap keterlibatannya dalam berbagai proses kegiatan masyarakat
- b. Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang, yang menilai dan mengarahkan perilaku , yang merupakan dorongan yang berada dalam diri seseorang, yang dalam hal ini adalah dorongan untuk berpartisipasi.
- c. Sikap adalah suatu perasaan, pandangan, maupun kecenderungan bertindak terhadap orang, kelompok, atau gagasan atau obyek lain.
- d. Partisipasi adalah keterlibatan, keikutsertaan untuk mengambil peran tertentu dalam suatu kegiatan, yang dapat timbul dari diri sendiri yang dianggap berguna, maupun dipengaruhi adanya motivasi dari luar, yang berpengaruh terhadap dirinya. . Sedangkan

- e. Keberhasilan Wajib Belajar adalah tercapainya target tertentu dalam pelaksanaan kegiatan, dengan indikator APK dan APM yang realisasinya sesuai dengan target.

### **3. Definisi operasional**

Definisi operasional adalah merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. Disamping itu juga, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran yang dilakukan dalam rangka operasional. Menurut Koentjaraningrat (1985 :23), definisi operasional adalah konsep-konsep yang merupakan konstruksi, yang dengan kata lain menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, dapat diuji, dapat diukur dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penulisan ini adalah :

#### **a. Indikator Partisipasi masyarakat adalah :**

- 1). Tingkat keterlibatan dalam pendidikan diukur dengan:
  - a) Peran serta dalam perencanaan program, yang meliputi tingkat kehadiran, tingkat aktivitas, tingkat keikutsertaan orang tua dalam mendukung program Wajib Belajar
  - b) Peran serta dalam pelaksanaan program yang meliputi keikutsertaan dan keterlibatan orang tua dalam menyekolahkan anaknya.
- 2) Tingkat kontribusi orang tua dalam hal uang, tenaga, pikiran terhadap penyelenggaraan Wajib Belajar.

- 3) Intensitas dalam memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga, yang diukur dengan banyaknya kegiatan pertemuan.
- 4) Intensitas dalam menggunakan hasil pendidikan, yang diukur dengan jumlah yang melanjutkan.
- 5) Tingkat Keikutsertaan dalam menempuh pendidikan formal.
- 6). Tingkat dukungan terhadap lingkungan pendidikan

**b. Indikator Sosial Ekonomi adalah :**

- 1). Kemampuan mencukupi kebutuhan dasar hidup, diukur dengan :
  - a) Penghasilan setiap bulan/minggu/hari.
  - b) Pengeluaran
- 2). Tingkat Pendidikan

**b. Indikator motivasi , adalah**

- 1) Dorongan dari dalam yang meliputi :
  - a) Tingkat Pemahaman terhadap arti pentingnya program
  - b) Tingkat ketaatan terhadap kewajiban mengikuti program
  - c) Tingkat kebutuhan akan pendidikan
  - d) Tingkat kepuasan terhadap pendidikan
  - e) Tingkat minat dan keinginan untuk mengikuti program
  - f) Persepsi terhadap arti pentingnya program
  - g) Tingkat kemantapan dari program
- 2).. Dorongan dari luar, meliputi :
  - a). Adanya himbauan oleh orang luar, Pemerintah atau tokoh masyarakat

- b). Adanya contoh positif yaitu contoh orang sukses, kaya, terhormat pekerjaan baik karena berpendidikan
- c). Adanya harapan karena adanya stimulus
- d). Adanya persepsi

**c. Indikator Sikap terhadap program Wajib Belajar adalah**

- 1). Tingkat kepedulian terhadap obyek/kegiatan program
- 2) Respon positif terhadap kondisi pendidikan
- 3) Tingkat pemahaman terhadap program pendidikan
- 4) Tingkat pandangan terhadap pendidikan,
- 5) Tingkat kepuasan, kebanggaan terhadap kepentingan pendidikan

**E. JENIS DAN SUMBER DATA**

Data yang digunakan pada analisa data adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu :

- 1. Data primer berasal dari Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes berupa:
  - a). data penduduk dari masing-masing desa;
  - b). data penduduk usia sekolah yang bersekolah maupun tidak bersekolah
  - c). data penghasilan, pekerjaan orang tua
  - d). data tingkat pendidikan orang tua
  - e). data APK dan APM
  - f). hasil wawancara melalui kuesener
- 2. Data sekunder didapat dari membaca buku, literatur, hasil penelitian deskriptif, Laporan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Wajar Kecamatan

Tanjung, SK tentang Wajib Belajar dari tingkat Kecamatan maupun Provinsi., SK Bupati maupun dokumen lainnya.

## F. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian adalah kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden, supaya diisi sesuai dengan jawaban lewat berbagai alternatif yang meliputi pertanyaan tentang:

1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman responden terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anaknya, bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.
2. Tingkat kemampuan responden dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok yang meliputi kemampuan untuk menyediakan sandang, pangan dan papan.
3. Kemampuan responden untuk menyekolahkan anaknya, motivasi orang tua, serta alasan-alasan mengapa menyekolahkan atau tidak menyekolahkan anaknya
4. Sikap dan pandangan responden terhadap masalah-masalah pendidikan;
5. Tingkat motivasi responden
6. Keaktifan responden dalam mengikuti kegiatan, keterlibatan dan partisipasinya.
7. Aspek-aspek lain yang dapat mendukung penelitian.

Untuk keperluan tersebut, dibantu dengan adanya *interview guide*, yaitu pedoman secara berstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan penulis untuk menggali lebih dalam mengenai pendapat, pandangan responden terhadap kegiatan pendidikan.

## **G. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL**

### **1. Populasi**

Dalam hal ini populasi penelitian adalah seluruh Kepala keluarga yang mempunyai anak usia sekolah dalam lingkup program wajib belajar, (usia 7 – 15 tahun) di 5 (lima) Desa, Kecamatan Tanjung, Tahun 2002, yakni sebanyak 357 keluarga. yang kesemuanya berpeluang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian.

### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi, Jenis sampel yang diambil yaitu orang tua yang mempunyai anak usia sekolah, mencerminkan populasi. Sampel didefinisikan sebagai sembarang himpunan, yang merupakan bagian dari satu populasi. Data yang dianalisis dalam suatu penelitian merupakan data data yang diperoleh dari sampel. Data yang diperoleh dari Kecamatan Tanjung tersebut, merupakan satu bagian dari rangkaian proses penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau pengajuan hipotesis, seperti yang ditetapkan pada desain penelitian. Temuan informasi yang didapat pada sampel, merupakan temuan juga dalam populasi, sehingga simpulan yang diambil dari hasil pengamatan sampel, secara generalisasi, akan menuju pada populasi, sehingga dapat dikatakan pengukuran sampel, hakikatnya merupakan pengukuran populasi juga, baik bagi individu yang diukur, maupun dari hasil pengukurannya, jika parameter keduanya sama. Jadi sampel merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dengan

populasi, yang merupakan cermin dari populasi. Potret sampel itulah wajah populasi.

Untuk itu penulis telah memperkirakan sampel sebanyak 80 orang yaitu orang tua anak usia sekolah, dari 5 desa., yaitu Desa Tanjung, Sengon, Kemurang Kulon, Lemahabang dan Tengguli.

Penentuan besarnya sampel tersebut didasarkan atas pertimbangan yang menyangkut masalah :

- a). Fungsi Ketepatan dalam membuat estimasi yang ingin penulis capai;
- b). Variabilitas atau variasi populasi, yaitu berupa orang tua anak usia sekolah dari berbagai pekerjaan yang ada.
- c). Tingkat Keyakinan Penulis.

Dan untuk menguji kerepresentatifan sampel, penulis akan menggunakan patokan-patokan umum, yang penulis tentukan :

- a). Homogenitas populasi;
- b). Jumlah dan besarnya sampel;
- c). Banyaknya karakteristik subyek yang akan dipilih;
- d). Ketepatan teknik pemilihan sampel.

Dengan demikian kerepresentatifan bergayut pada kadar homogenitas populasi, sehingga semakin banyak kemiripan suatu sampel terhadap populasi, akan menekan jumlah individu sampel yang semakin kecil. Demikian jumlah subyek yang dijadikan sampel, semakin besar ukuran sampel akan semakin tinggi tingkat representatifnya, karena banyaknya subyek akan meningkatkan proporsi sampel terhadap populasi,

sehingga peluang meraup karakteristik populasi akan semakin dicapai oleh sampel

### 3. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel Random sampling (Random Sampling Sederhana), dengan teknik *Two Stages Random Sampling* karena penulis menganggap teknik ini sangat mudah, dan hasilnya lebih mantap, karena memiliki tingkat representatif yang tinggi, yang mewakili polulasinya. Adapun dasar pengambilan sampel adalah sebagaimana dalam tabel dengan ketentuan setiap anggota populasi berpeluang sama untuk dipilih menjadi sampel, dan polupasi yang dihadapi merupakan suatu populasi yang terbatas, dan bisa dihitung, sebagaimana dalam tabel:

Tabel 3.1

#### PENGAMBILAN SAMPEL

No	Tahap	Populasi	N' sampel	Teknik
1	Kecamatan	17Desa	5 Desa 29,41 %	Sampel Random Sampling
2	Desa	367 KK dari 5 Desa	80 Kel. /21,79	Quota Random Sampling
	Tanjung	76 KK	16 KK / 21.05 %	
	Sengon	74 KK	16 KK/ 20.27 %	
	Kemurang Kulon	68 KK	16 KK/ 23.52%	
	Lemahabang	76 KK	16 KK / 21,05 %	
	Tengguli	73 KK	16 KK / 21.91 %	

## H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Kuesioner, yaitu alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar pertanyaan, yang diampaikan kepada responden, dengan membagikan kuesioner untuk dijawab oleh responden. Dalam kesempatan ini peneliti menggunakan kuesioner langsung, karena kuesioner tersebut dikirimkan langsung kepada responden. Adapun kuesioner tersebut akan dibuat secara tertutup dengan 4 (empat) opsi, sehingga responden hanya memilih apa yang menjadi pilihannya. . Agar responden dapat lebih mudah memahami maksud dan tujuan peneliti, maka dalam menyusun kuesioner, peneliti akan menggunakan prinsip-prinsip yang ada, sehingga dapat diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan agar pertanyaan mudah dipahami oleh responden.
2. Interview atau wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung dengan responden dengan cara menyusun kalimat berupa pertanyaan yang dipadu dengan alat bantu kuesioner. Dalam pelaksanaan interview, peneliti tidak menggunakan wawancara berstruktur, tetapi menggunakan wawancara tak berstruktur, karena lebih bersifat informal, agar dapat lebih menggali pandangan, sikap, dan keyakinan subyek dalam berpartisipasi melaksanakan Wajib Belajar. Disini subyek diberi kebebasan untuk menguraikan jawabannya serta mengajukan pandangan sesuka hati, sehingga penulisan secara kualitatif dapat diperoleh kualitas dan ketegasan jawaban yang dapat

mempertegas penelitian kuantitatif tersebut. Beberapa pertimbangan mengapa penulis menggunakan metode interview :

- a. Dapat memperoleh informasi yang lebih kompleks, dan tidak terikat dengan umur, pendidikan, disamping agar dapat menggali data pribadi responden.
  - b. Metode ini tidak mengalami kesulitan, walaupun responden buta huruf, dan rendahnya tingkat pendidikan, karena peneliti menggunakan bahasa verbal dan berusaha mengikuti dialek daerah.
  - c. Dapat dipakai sebagai verifikasi data, terhadap data yang diperoleh dengan cara observasi maupun angket, karena keluwesan dan fleksibilitasnya.
  - d. Metode ini oleh peneliti dianggap cocok untuk dipergunakan dalam pengumpulan data sosial.
3. Menggunakan interview guide, dengan cara menyusun kalimat berupa pertanyaan yang dipandu dengan alat bantu kuesioner.

## **I. TEKNIK ANALISIS DATA**

Data yang diperoleh dari penelitian, dianalisis, yang merupakan suatu langkah yang sangat kritis. Disini peneliti akan menggunakan analisis statistik sesuai dengan karakteristik data, dengan skala data ordinal

Adapun model atau rumus data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan Rumus Korelasi Rank Kendall , dan dengan

pengolahakan data kuantitatif melalui, editing, coding, tabulating dan scoring

dengan skala likert yaitu :

- untuk jawaban yang sangat mendukung diberi score 4
- untuk jawaban yang mendukung diberi score 3
- untuk jawaban yang cukup mendukung diberi score 2
- untuk jawaban yang kurang mendukung diberi score 1

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. DESKRIPSI WILAYAH

Untuk dapat mengetahui kondisi Pelaksanaan Wajib Belajar di wilayah penelitian, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, maka diperlukan diskripsi wilayah penelitian yang meliputi keadaan geografi, keadaan penduduk, sosial ekonomi termasuk pendidikan dan kondisi lainnya sebagai berikut :

##### 1. Keadaan Geografi dan wilayah

Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Brebes yang jumlahnya 18 Kecamatan, terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Brebes jurusan Brebes Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Kersana
- Sebelah Barat : Kecamatan Losari
- Sebelah Timur : Kecamatan Bulakamba

Wilayah Kecamatan Tanjung yang luasnya 6.819 Ha, terdiri atas :

- a. Lahan Sawah seluas 4.342 Ha, yang sebagian besar merupakan sawah tadah hujan/pasang surut dengan luas 2,570 Ha, selebihnya berupa sawah pengairan teknis, sawah pengairan setengah teknis, dan pengairan sederhana.

- b. Lahan bukan sawah seluas 2,477 Ha, terdiri atas tanah pekarangan, tegalan, kebun rakyat, tambak / kolam seluas 1.149 Ha, serta untuk peruntukan lainnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut

Tabel 4.1  
LUAS LAHAN KECAMATAN TANJUNG

No	Desa/Kelurahan	Luas Sawah (Ha)	Luas Lahan Bukan Sawah (Ha)	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sarireja	200	90	290
2	Kubangputat	177	26	203
3	Luwung Gede	190	83	273
4	Mundu	181	32	213
5	Luwungbata	674	63	737
6	Karangreja	163	19	182
7	Sidakaton	148	13	161
8	Sengon	283	268	551
9	Kedawung	77	13	90
10	Tegongan	95	19	114
11	Kemurang Wetan	246	113	359
12	Kemurang Kulon	125	47	172
13	Krakahan	715	420	1.135
14	Pejagan	106	27	133
15	Pengaradan	200	1.085	1.285
16	Tanjung	279	54	333
17	Lemah Abang	109	46	155
18	Tengguli	374	59	433
	Jumlah	4.342	2.477	6.819

Sumber : BPS Kabupaten Brebés 2002

## 2. Pemerintahan

Wilayah Kecamatan Tanjung terdiri dari 18 Desa/Kelurahan, yang meliputi 30 Dukuh, 338 RT dan 79 RW sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.2  
JUMLAH DUKUH, RT DAN RW

No	Desa/Kelurahan	Dukuh	RT	RW
	2	3	4	5
1	Sarireja	1	17	2
2	Kubangputat	2	9	3
3	Luwung Gede	1	24	4
4	Mundu	0	10	2
5	Luwungbata	1	23	4
6	Karangreja	0	8	4
7	Sidakaton	3	9	2
8	Sengon	3	53	9
9	Kedawung	0	7	3
10	Tegongan	1	16	5
11	Kemurang Wetan	4	42	8
12	Kemurang Kulon	1	23	5
13	Krakahan	1	10	5
14	Pejagan	0	10	4
15	Pengaradan	2	17	5
16	Tanjung	3	27	5
17	Lemah Abang	3	20	5
18	Tengguli	4	13	4
	Jumlah	30	338	79

Sumber : BPS Kab. Brebes 2002

### 3. Demografi

Penduduk Kecamatan Tanjung pada posisi bulan Juni 2002, adalah berjumlah 88.161 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 43.860, perempuan 44.301, beserta pembagian jumlah penduduk per kelompok umur sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

#### JUMLAH PENUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2002

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sarireja	2118	2043	4161
2	Kubangputat	1136	1153	2289
3	Luwung Gede	3176	3025	6201
4	Mundu	1475	1388	2863
5	Luwungbata	3233	3086	6319
6	Karangreja	982	1071	2053
7	Sidakaton	814	832	1646
8	Sengon	5892	6112	12004
9	Kedawung	839	879	1718
10	Tegongan	1703	1973	3676
11	Kemurang Wetan	4334	4348	8682
12	Kemurang Kulon	3220	3325	6545
13	Krakahan	1805	1776	3581
14	Pejagan	1789	1882	3671
15	Pengaradan	3322	3351	6673
16	Tanjung	3228	3204	6432
17	Lemah Abang	2362	2458	4820
18	Tengguli	2432	2395	4827
	Jumlah	43.860	44301	88161
	Porsentase (%)	49,74 %	59,26 %	100 %

Sumber : BPS Brebes 2002

Pengelompokan penduduk menurut kelompok umur dari BPS tidak sama dengan pengelompokan umur dari P dan K, namun kelompok umur di BPS dijadikan sumber data untuk mengasumsikan jumlah anak usia sekolah yaitu kelompok umur 4 – 9 tahun dan 10 – 14, terdapat jumlah 20.803 atau sebesar 23,59 % seperti dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

JUMLAH PENDUDUK PER KELOMPOK UMUR/ JENIS KELAMIN

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0 – 4 tahun	4497	4928	9425
2	5 – 9 tahun	5416	5193	10609
3	10 – 14 tahun	5124	5070	10194
4	15 – 19 tahun	5383	4600	9983
5	20 – 24 tahun	4291	4125	8416
6	25 – 29 tahun	3441	3774	7215
7	30 – 34 tahun	3117	2770	5887
8	35 – 39 tahun	2538	3077	5615
9	40 – 44 tahun	2452	2526	4978
10	45 – 49 tahun	1976	2035	4011
11	50 – 54 tahun	1566	1786	3352
12	55 – 59 tahun	1186	1324	2510
13	60 – 64 tahun	1343	1205	2548
14	65 tahun ke atas	1530	1889	3419
	Jumlah	43860	44301	88161
	Prosentase (%)	49,74 %	59,26 %	100 %

Sumber : BPS Brebes 2002

Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjung sebesar 1.293 penduduk per kilometer persegi/jiwa, termasuk daerah yang tidak terlalu padat, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5  
TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK

No	Desa/Kelurahan	Luas Desa Km 2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Km/Jiwa
1	2	3	4	5
1	Sarireja	2.90	4161	1435
2	Kubangputat	2.03	2289	1128
3	Luwung Gede	2.73	6201	2271
4	Mundu	2.13	2863	1344
5	Luwungbata	7.37	6319	857
6	Karangreja	1.82	2053	1128
7	Sidakaton	1.61	1646	1022
8	Sengon	5.51	12004	2179
9	Kedawung	0.90	1718	1969
10	Tegongan	1.14	3676	3225
11	Kemurang Wetan	3.59	8682	2418
12	Kemurang Kulon	1.72	6545	3805
13	Krakahan	11.35	3581	316
14	Pejagan	1.33	3671	2760
15	Pengaradan	12.85	6673	519
16	Tanjung	3.33	6432	1932
17	Lemah Abang	1.55	4820	3110
18	Tengguli	4.33	4827	1115
	Jumlah	68.19	88161	1293

Sumber : Laporan Monografi Kec. Tanjung 2002

Dari jumlah penduduk yang ada tersebut, penduduk usia di atas 10 tahun keatas yang mencari mata pencaharian adalah 45.332 orang, dengan ragam pekerjaan yang berbeda-beda. Sebanyak 30.599 orang, atau 67,41 % sebagai buruh tani, nelayan, buruh industri, buruh bangunan, buruh angkutan dan buruh lain-lain. Sedangkan sejumlah 8.206 orang atau 18,22 % sebagai petani atau peternak, dan sejumlah 4.028 orang , atau 8,89 % sebagai pedagang, sejumlah 163 orang sebagai pengusaha, dan sebanyak 908 sebagai Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Pensiunan maupun Purnawirawan. Ada sebagian penduduk yang pekerjaannya tidak menentu secara serabutan , sebanyak 1.374 orang. Berdasarkan keterangan dari aparat Kelurahan di Kecamatan Tanjung, yaitu Kelurahan Tanjung, Kemurang Kulon, Sengon, Lemahabang dan Tengguli, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh cukup banyak, sehingga penghasilan mereka rata-rata di bawah standart, yang tentunya sangat mempengaruhi pelaksanaan Wajib Belajar yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah, karena anak usia sekolahpun diikutsertakan oleh orang tuanya untuk mencari nafkah tambahan berupa buruh mbutik yaitu memotong daun bawang merah yang telah dipanen. Hal tersebut disebabkan penghasilan mereka dibanding dengan pengeluaran, masih belum memadai. Untuk jelasnya mengenai komposisi pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

## PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA

No.	Desa/Kelurahan	Buruh	Peta ni	Da gang	PNS/ Pens.	Pengu saha	Lain- lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sarireja	992	485	7	26	0	165	1675
2	Kubangputat	2086	95	11	7	0	25	2224
3	Luwung Gede	3527	487	10	70	0	193	4287
4	Mundu	986	313	114	28	0	485	1926
5	Luwungbata	2164	1092	7	28	0	101	3392
6	Karangreja	1070	800	25	7	0	25	1927
7	Sidakaton	926	160	75	9	0	30	1200
8	Sengon	2570	115	15	40	10	10	2760
9	Kedawung	604	46	7	16	2	9	694
10	Tegongan	763	265	50	7	0	10	1095
11	Kemurang Wetan	3646	1950	170	47	5	19	5837
12	Kemurang Kulon	2083	1280	73	34	1	17	3488
13	Krakahan	859	150	15	31	15	14	1084
14	Pejagan	703	452	130	82	20	26	1413
15	Pengaradan	1908	175	75	29	0	24	2211
16	Tanjung	1883	122	2773	250	10	15	5053
17	Lemah Abang	2222	106	332	152	75	126	3013
18	Tengguli	1597	167	139	45	25	80	2053
	Jumlah	30599	8260	4.028	908	163	1374	45332
	Prosentase (%)	67,41 %	18,22 %	8,89 %	2,0 %	0,36 %	3,03 %	100 %

Sumber Data : Laporan Monografi Kecamatan Tanjung 2002

Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tanjung , khususnya pada 5 desa yang diteliti,. Berdasarkan data yang ada , maka terdapat 23326 penduduk, dan yang tidak tamat SD sebanyak 8423 orang atau 36,11 %, yang tamat SD sebanyak 9110 atau 39,06 %, tamat SLTP sebanyak 3403 orang atau 14,59 %, tamat SLTA sebanyak 1.956 orang atau 8,39 %, tamat Diploma 3, sebanyak 213 orang atau 0,91 % sedangkan yang tamat sarjana sebanyak 221 orang atau 0,94 %, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.7

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

No	Des/Kelurahan	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Diploma	Tamat Sarjana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanjung	827	2850	1153	1032	38	63	5963
2	Kemurang Kl.	1759	1476	160	86	20	31	3532
3	Lemahabang	1989	1565	322	126	77	86	4165
4	Sengon	2672	2700	1515	445	43	21	7396
5	Tengguli	1176	519	253	267	35	20	2270
	Jumlah	8423	9110	3403	1956	213	221	23326
	Prosentase	36,11 %	39,06 %	14,59%	8,39 %	0,91 %	0,94 %	100 %

Sumber : data masing masing Kel/Desa th. 2002

### 3. Daya Tampung

Berdasarkan jumlah yang ada, jumlah sarana pendidikan pada SD, SLTP, termasuk di dalamnya adalah SD Negeri, Swasta, Madrasah, SLTP, MTS negeri maupun swasta, pada lima desa yang di teliti, yaitu Tanjung, Sengon, Kemurang Kulon, Lemahabang dan tengguli, maka daya tampung yang ada, tidak mencukupi dibanding dengan jumlah anak usia sekolah di 5 desa tersebut, karena secara total baru mencapai 85,53 %, namun untuk daerah Tanjung sebagai ibukota Kecamatan, mencapai 88,45, sedangkan yang tertinggi desa Lemahabang mencapai 97,22 % seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.8

DAYA TAMPUNG SD dan SLTP

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Sekolah		Daya Tampung		Prosentase Daya tampung (*)
			SD	SLTP	SD	SLTP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanjung	1628	3	2	960	480	88,45
2	Sengon	1246	2	1	560	240	64,20
3	Kemurang Kulon	674	2	-	560	-	83,08
4	Lemahabang	576	2	-	560	-	97,22
5	Tengguli	1267	3	1	960	240	94,71
		5391	12	4	3600	960	85,53

Sumber : Dinas P dan K Kec. Tanjung 2002

Keterangan : \*) Jumlah kolom 6 dan 7 dibanding kolom 3

## B. HASIL PENELITIAN

Data yang yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan metode kuesioner, observasi dan wawancara. dengan hasil sebagai berikut :

### 1. Identitas Responden

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden sebanyak 80 orang dari 5 (lima ) Desa di Kecamatan Tanjung dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9

#### PEKERJAAN RESPONDEN

No	Jenis Pekerjaan Responden	Frekuensi	%
1	Bengkel motor	2	2.5
2	Bengkel Sepeda	2	2.5
3	Buruh	22	27.5
4	Dagang	17	21.3
5	Penjaga Sekolah	3	3.7
6	Pensiunan PJKA	4	5.0
7	Petani	13	16.3
8	Tukang Becak	4	5.0
9	Tukang Kayu	3	3.7
10	Tukang Ojek	7	8.8
11	Wiraswasta	3	3.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 4

Berdasarkan tabel 4.9 tentang pekerjaan responden, sebesar 27, 5 %, mata pencahariannya sebagai buruh , 21,3 % sebagai pedagang, Petani 16,3 % ,

Tukang ojek 8,8 %, Tukang becak dan Pensiunan masing-masing 5%, Wiraswasta, Penjaga sekolah dan tukang kayu masing-masing 3, 7 %, sedangkan selebihnya bengkel sepeda motor, bengkel sepeda masing-masing 2 orang atau 2,5%.

Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa pekerjaan responden cukup bervariasi namun sebagian besar merupakan pekerjaan yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan obsevasi dan wawancara, pekerjaan mereka tidak tetap, karena ada ketergantungan dari pemilik, maupun pemberi pekerjaan.

Tabel 4. 10

TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

No	Pendidikan Responden	Frekuensi	%
1	SD	52	65.0
2	SLTP	20	25.0
3	SLTA	8	10.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 5

Berdasarkan tabel 4.10 tentang pendidikan responden, yang lulus atau tamat Sekolah Dasar ada 65 %, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 25 %, sedangkan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 10 %.

Dari gambaran tersebut dimana jumlah yang tamat SD cukup banyak, karena mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan itu tidak penting, sehingga mereka tidak bersekolah, disamping bahwa kebutuhan tenaga kerja di desa belum memerlukan pendidikan tinggi, karena sebagai buruh di ladang bawang merah.

Tabel 4. 11

## JUMLAH ANAK YANG DIMILIKI

No	Jumlah anak	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Satu anak	2	2.5
2	Dua anak	33	41.3
3	Tiga anak	29	36.3
4	Empat anak	16	20.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 6

Berdasarkan tabel 4.11 tentang jumlah anak yang dimiliki, ternyata yang mempunyai anak dua sebesar 41,3 % . Dari jumlah anak yang ada, dapat dikatakan bahwa mereka kurang mentaati anjuran Pemerintah untuk Keluarga berencana, karena masih banyak orang yang mempunyai anak lebih dari dua.

Tabel 4. 12

## ANAK RESPONDEN YANG BERSEKOLAH DI SD

No	Anak yang bersekolah di SD	Frekuensi	Prosentas (%)
1	Tidak ada	4	5.0
2	Satu anak	67	83.7
3	Dua anak	9	11.3
4	Tiga anak	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 7

Dari tabel 4.12 tentang anak responden yang bersekolah di Sekolah Dasar, terlihat bahwa yang bersekolah di Sekolah Dasar satu anak, sebanyak 83,7 %, sedangkan yang dua anaknya sekolah di SD adalah 11,3 %, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mereka memperhatikan pendidikan bagi anaknya walau kebanyakan baru di Sekolah Dasar Hal ini dikarenakan kebanyakan usia anak mereka masih berumur usia sekolah atau 7 – 15 tahun.

Tabel 4. 13

ANAK YANG BERSEKOLAH DI SLTP

No	Anak yang bersekolah di SLTP	Frekuensi	Prosentase(%)
0	Tidak ada	11	13.7
1	Satu anak	64	80.0
2	Dua anak	3	3.8
3	Tiga anak	0	0.0
4	Empat anak	2	2.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 7

Berdasarkan tabel 4.13 tentang anak mereka yang bersekolah di SLTP, terdapat jumlah tertinggi dari responden mempunyai satu anak yang bersekolah di SLTP yaitu sebanyak 80 %.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada lembaga Pendidikan Dasar cukup positif sehingga dapat mendukung pelaksanaan Wajib Belajar

Tabel 4.14

ANAK YANG BERSEKOLAH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN LAINNYA

No	Jumlah anak	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Tidak ada	30	37.5
2	Satu anak	37	46.3
3	Dua anak	11	13.8
4	Tiga anak	2	2.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.7

Berdasarkan tabel 4.14 terdapat 46,3 % responden yang menyekolahkan satu anak di lembaga pendidikan lainnya namun namun ada responden yang tidak menyekolahkan pada lembaga lainnya sebanyak 37,5 %. Ini menunjukkan bahwa mereka menyekolahkan anaknya di pendidikan formal.

Disamping pada pendidikan formal Tingkat Dasar, responden juga menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan lainnya seperti SLTA, Madrasah, Kelompok Belajar Paket A dan Paket B, Pondok Pesantren dan lain sebagainya

Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa responden juga mempercayakan pendidikan di luar lembaga pendidikan yang ada., hal ini mau tidak mau akan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar

## 2. Partisipasi

Penelitian mengenai partisipasi yang merupakan variabel tergantung, yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, motivasi dan sikap, diteliti masalah Keterlibatan dalam pelaksanaan Wajib Belajar, yang meliputi frekuensi kehadiran dalam pertemuan Wajib Belajar, keaktifan mendukung program, dan intensitasnya, dan dukungan positif berupa bantuan kepada orang lain baik tenaga, pikiran uang maupun lainnya, serta keaktifan menghadiri pertemuan, dan kesediaan untuk terlibat langsung dalam wajar maupun kesediaan untuk menyekolahkan anaknya, yang akan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.15

### KETERLIBATAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

No	Keterlibatan	Frekuensi	%
1	Tidak	64	80.0
4	Ya	16	20.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P1

Berdasarkan tabel 4.15 tentang keterlibatan responden dalam pelaksanaan Wajib Belajar, maka dari 80 responden, sebanyak 80 % tidak terlibat.

Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa keterlibatan mereka terhadap pelaksanaan Wajib Belajar masih kurang, padahal dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, diharapkan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat.

Tabel 4.16

## FREKUENSI KEHADIRAN RESPONDEN

No	Frekuensi Responden	Frekuensi	%
0	Tidak terlibat	64	80.0
1	Kurang dari 2 kali	11	13.8
2	2 sampai 3 kali	5	6.3
3	4 kali	0	0.0
4	Lebih dari 4 kali	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P2

Berdasarkan tabel tersebut, yaitu tabel 4.16 tentang frekuensi kehadiran dalam perencanaan program, sebesar 80 % tidak terlibat dalam perencanaan program, Dari gambaran di atas, menunjukkan bahwa mereka masih banyak yang tidak terlibat, atau tidak dilibatkan. Disini ketidak terlibatan mereka, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, mereka merasa bahwa Wajib Belajar sudah ditangani oleh pemerintah, disamping memang waktu mereka dicurahkan untuk mencari penghasilan, sebab sistem upah adalah tergantung kegiatan hari itu, bila mereka terlalu sering tidak bekerja, maka tidak dibayar, hal ini disebabkan karena pada umumnya pekerjaannya buruh

Tabel 4.17

## KEAKTIFAN DALAM MENDUKUNG WAJAR

No	Tingkat Keaktifan Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak aktif	19	23.8
2	Tidak aktif	49	61.3
3	Aktif	12	15.0
4	Sangat Aktif	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P3

Dari tingkat keaktifan dalam mendukung program Wajib Belajar, berdasarkan tabel 4.17 terlihat bahwa sejumlah 61,3 % tidak aktif, dan yang aktif hanya 15 %. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa keterlibatan atau tingkat keaktifan responden terhadap wajib belajar masih rendah. Ini terkait dengan pekerjaan dan penghasilan, sehingga mereka lebih baik bekerja, dan masalah pendidikan sudah ada yang mengurus.

Tabel 4.18

## INTENSITAS DUKUNGAN TERHADAP WAJIB BELAJAR

No	Intensitas Dukungan	Frekuensi	%
1	Jarang	54	67.5
2	Kadang-kadang	16	20.0
3	Sering	10	12.5
4	Sangat sering	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P4

Berdasarkan tabel 4.18 tentang intensitas dukungan terhadap pelaksanaan Wajib Belajar, maka sebanyak 67.5 % menyatakan jarang mendukung. Dari gambaran yang demikian itu, menunjukkan bahwa intensitas mereka dalam mendukung pelaksanaan Wajib Belajar kurang tinggi.

Tabel 4.19

FREKUENSI DUKUNGAN SATU TAHUN

No	Dukungan Positif	Frekuensi	%
1	Kurang dari 4 kali	68	85.0
2	4 -7 kali	10	12.5
3	8 - 12 kali	2	2.5
4	Lebih dari 12 kali	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P5

Berdasarkan tabel 4.19 tentang frekuensi dukungan dalam membantu Wajib Belajar dalam satu tahun, terbanyak rata-rata mendukung kurang dari 4 kali sebesar 85 % selebihnya mendukung berkisar antara 4 kali sampai 12 kali lebih yang jumlahnya sangat sedikit

Dari gambaran yang demikian, menunjukkan bahwa tingkat dukungan dalam membantu wajib belajar masih kurang. Hal ini disebabkan mereka kurang memahani arti pendidikan bagi masa depan anaknya, disamping pekerjaan mereka yang rata-rata buruh.

Tabel 4.20

## BENTUK BANTUAN KEPADA PROGRAM WAJAR

No	Bentuk Bantuan	Frekuensi	%
1	Tenaga	44	55.0
2	Uang	5	6.3
3	Uang dan tenaga	18	22.5
4	Uang, tenaga, dan pikiran	13	16.2
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P6

Berdasarkan tabel 4.20 Tentang bentuk bantuan yang diberikan dalam mendukung program wajib belajar, terdapat 55 % yang membantu berupa tenaga, selebihnya bentuk bantuannya berupa pikiran, uang dan secara total yang jumlahnya hanya sedikit. Dari gambaran yang demikian, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dengan uang, dan pikiran atau secara total belum tinggi. Mereka kebanyakan membantu berupa tenaga, dikarenakan mereka tidak cukup mampu untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk membantu wajib belajar. Hal ini disebabkan mereka kemampuan ekonominya tidak tinggi. Bantuan tenaga merekapun tidak terlalu sering, yang disebabkan mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, dikarenakan butuh uang.

Tabel 4.21

## BESARNYA BANTUAN DANA PARTISIPASI WAJAR

No	Besarnya Bantuan Dana	Frekuensi	%
1	Kurang dari Rp. 2.000,-	59	73.8
2	Rp. 2.000,- - Rp. 5.000,-	16	20.0
3	Rp. 5.001 – Rp. 10.000,-	3	3.7
4	Lebih dari Rp. 10.000,-	2	2.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P7

Berdasarkan tabel 4.21 Tentang besarnya bantuan/partisipasi dana , terdapat sebesar 73, 8 % yang membantu kurang dari Rp. 2.000,-- per bulan , sedangkan lainnya yang di atas Rp. 2000,-- per bulan masih sangat sedikit. Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa bantuan uang yang diberikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan masih kurang tinggi. Hal ini disebabkan karena penghasilan mereka yang pas-pasan sudah digunakan untuk pengeluaran setiap hari yang membutuhkan biaya, terlebih dalam menyekolahkan anaknya. Hal ini terkait pula dengan tingkat penghasilan yang berdasarkan pengamatan penulis, rata-rata kehidupannya di bawah standar. Hal tersebut dikarenakan pad umumnya pekerjaan mereka buruh harian, dimana satu hari tidak bekerja mereka tidak mendapatkan uang, sehingga untuk membiayai anak untuk sekolah cukup berat.

Tabel 4.22

## FREKUENSI BANTUAN TENAGA UNTUK PENDIDIKAN

No	Frekuensi Bantuan Tenaga	Frekuensi	%
1	Jarang	44	55.0
2	Kadang-kadang	26	32.5
3	Sering	10	12.5
4	Sangat sering	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P8

Dalam tabel 4.22 tentang bantuan tenaga yang diberikan, terlihat bahwa bantuan tenaga yang diberikan ternyata jarang sekali, karena sebanyak 55 % menyatakan jarang, dan selebihnya juga tidak sering. Hal ini memang dalam penyelenggaraan wajar, partisipasi yang dibutuhkan jarang sekali berupa tenaga, melainkan dalam bentuk ikut menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan yang ada.

Tabel 4.23

## KEIKUT SERTAAN MEMBANTU PEMIKIRAN

No	Keikutsertaan Responden	Frekuensi	%
1	Tidak	67	83.7
4	Ya	13	16.3
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P9

Dari tabel 4.23 Tentang keikutsertaan membantu berupa pemikiran, responden sebanyak 83,8 % tidak pernah membantu, sedangkan lainnya menyatakan pernah berpartisipasi dalam pemikiran, namun jumlahnya hanya sedikit

Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa mereka kurang peduli dalam memikirkan masalah pendidikan. Kekurangpedulian mereka disebabkan banyak yang belum memahami arti pentingnya pendidikan, dan tingkat pendidikan mereka kebanyakan tamat SD

Tabel 4.24

VOLUME BANTUAN PEMIKIRAN

No	Volume Bantuan Pemikiran	Frekuensi	%
0	Tidak membantu	67	83.7
1	Jarang	3	3.8
2	Kadang-kadang	7	8.7
3	Sering	3	3.8
4	Sangat sering	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P10

Berdasarkan tabel 4.24 tentang volume bantuan pemikiran, sebanyak 83,8 % responden menyatakan tidak membantu. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan keikutsertaan dalam pemikiran pada tabel sebelumnya. Dari sejumlah responden lainnya yang menyatakan membantu, hanya dalam prosentase yang sedikit.

Dari gambaran yang demikian, menunjukkan bahwa volume bantuan pemikiran tidak tinggi. Hal ini didasari karena tingkat pendidikan responden tidak tinggi, dan masih berpendapat bahwa pemikiran mengenai Wajib Belajar menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tabel 4.25

KEAKTIFAN MENGHADIRI PERTEMUAN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Tidak	70	87.5
4	Ya	10	12.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P11

Berdasarkan tabel 4.25 Tentang keaktifan dalam menghadiri pertemuan. responden sebesar 87,5 % menyatakan tidak pernah menghadiri, sedangkan lainnya menyatakan pernah. Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa keaktifan menghadiri pertemuan dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar masih kurang tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka kurang menyadari arti pentingnya pertemuan, dalam rangka ikut memikirkan keberhasilan pendidikan anaknya. Hal tersebut dapat mengakibatkan perkembangan anak tidak dapat terpantau dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah mereka terlalu disibukkan untuk mencari uang untuk kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.26

## FREKUENSI MENGHADIRI PERTEMUAN PER TAHUN

No	Frekuensi Kehadiran Responden	Frekuensi	%
1	Kurang dari 4 kali	66	82.5
2	4 – 7 kali	9	11.2
3	8 – 12 kali	5	6.3
4	Lebih dari 12 kali	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P12

Berdasarkan tabel 4.26 tentang frekuensi menghadiri pertemuan selama satu tahun, responden sebesar 82,5 % kurang dari 4 kali menghadiri pertemuan. lainnya yang lebih dari itu hanya sedikit. Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa tingkat intensitas kehadiran mereka dalam pertemuan masih belum tinggi, sebab mereka belum menyadari pentingnya pertemuan bagi pengembangan pendidikan.

Tabel 4.27

## KEIKUTSERTAAN AMBIL PERAN

No	Keikutsertaan Ambil Peran	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	5	6.3
2	Tidak setuju	39	48.7
3	Setuju	29	36.3
4	Sangat setuju	7	8.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P13

Berdasarkan tabel 4.27 tentang keikutsertaan ambil peran dalam pelaksanaan Wajib Belajar, terdapat sebesar 48,8 % responden yang menyatakan tidak setuju, dan 36,3 % menyatakan setuju. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar mereka belum sepenuhnya setuju untuk dilibatkan atau ambil peran dalam pelaksanaan Wajib Belajar. Hal ini disebabkan mereka kebanyakan buruh dengan tingkat pendidikan yang tidak tinggi.

Tabel 4.28

KESADARAN MENYEKOLAHKAN ANAKNYA

No	Kesadaran Responden	Frek	%
1	Sangat tidak setuju	3	3.8
2	Tidak setuju	2	2.5
3	Setuju	60	75.0
4	Sangat setuju	15	18.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P14

Terhadap kesadaran dan kerelaan menyekolahkan anaknya, berdasarkan tabel 4.28 terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 6,3 % , berarti sebagian besar, kerelaan responden anaknya bersekolahcukup tinggi Hal ini terbukti jawaban yang setuju sebanyak 75 %. Dari hal yang demikian menunjukkan bahwa prosentase yang setuju mencapai jumlah 93,8 %, berarti mereka dapat dikatakan mendukung pelaksanaan Wajib Belajar

Tabel 4.29

## KETERLIBATAN LANGSUNG

No	Keterlibatan Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	6	7.5
2	Tidak setuju	34	42.5
3	Setuju	34	42.5
4	Sangat setuju	6	7.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P15

Terhadap keterlibatan secara langsung dalam program Wajib belajar, berdasarkan tabel 4.29 yang menyatakan tidak setuju, dan yang setuju masing-masing sebanyak 50 % Dari kondisi tersebut, berarti berimbang antara yang setuju dan tidak setuju.

Tabel 4.30

## PARTISIPASI TERHADAP ANJURAN PEMERINTAH

No	Partisipasi Terhadap Anjuran	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	19	23.7
3	Setuju	50	62.5
4	Sangat setuju	11	13.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P16

Berdasarkan tabel 4.30 tentang persetujuan anjuran pemerintah untuk berpartisipasi, yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, namun yang menyatakan setuju sebesar 62,5 % dan ada yang menyatakan sangat setuju. Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa sebenarnya mereka setuju untuk berpartisipasi cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan wawancara, mereka ingin anaknya pintar, dan sungkan terhadap pemerintah.

Tabel 4.31

KETERLIBATAN MENDORONG KEBERHASILAN

No	Keterlibatan Responden	Frek	%
1	Sangat tidak setuju	2	2.5
2	Tidak setuju	27	33.8
3	Setuju	43	53.8
4	Sangat setuju	8	10.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.P17

Berdasarkan tabel 4.31 tentang keterlibatan dalam mendorong keberhasilan wajib belajar, ada yang menyatakan sangat tidak setuju dan yang tidak setuju. Sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 53,8 %, Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa persetujuan mereka terhadap ikut serta mendorong keberhasilan wajib belajar masih cukup tinggi.

Dari seluruh jawaban responden pada variabel partisipasi, bila dikelompokkan ke dalam k'lasifikasi rendah, cukup tinggi , tinggi dan sangat tinggi, maka dapat disusun dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.32

REKAPITULASI TINGKAT PARTISIPASI

No.	Kategori Tingkat Partisipasi	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat Rendah	48	60.0
2.	Rendah	24	30.0
3.	Tinggi	8	10.0
4.	Sangat Tinggi	0	0.0
	Total	80	100

Sumber : Jawaban Responden dari Variabel PARTISIPASI

Berdasarkan tabel 4.32 di atas, mengenai tingkat partisipasi di Kecamatan Tanjung, khususnya terhadap pelaksanaan Wajib Belajar, dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban pertanyaan pada variabel partisipasi, maka terdapat responden sebanyak 90 % yang partisipasinya sangat rendah dan rendah, sedangkan selebihnya partisipasinya tinggi. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa pada umumnya masih belum banyak yang berpartisipasi secara optimal, hal ini dikarenakan mereka masih menganggap bawa pendidikan merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Disamping itu, tingkat penghasilan yang rendah, kurangnya motivasi serta sikap yang tidak mendukung Wajib Belajar.

### 3. Sosial Ekonomi

Penelitian mengenai sosial ekonomi sebagai variabel bebas pertama, kaitannya dengan pengaruhnya terhadap partisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar, meliputi penelitian tentang tingkat keterlibatan dalam pelaksanaan Wajib Belajar, tingkat kontribusi, tingkat intensitas dalam menyumbang, dan menggunakan hasil pendidikan serta tingkat dukungan terhadap lingkungan pendidikan, diarahkan untuk mencaari fakta dari kondisi riil tingkat sosial ekonomi responden, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel – tabel berikut.

Tabel 4.33

#### TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Keikutsertaan Responden	Frekiuensi	%
1	Tidak pernah	7	8.7
4	Pernah	73	91.3
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 1a1. pada sosek

Berdasarkan tabel 4.3 tentang keikutsertaan dalam pendidikan formal, maka dari responden sebanyak 80, terdapat sebesar 91,3 % yang pernah mengikuti pendidikan formal, sedangkan yang 7 responden atau sebesar 8,7 % tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setidaknya-tidaknya mengenal pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah walaupun hanya pada tingkat pendidikan dasar.

Tabel 4.34

## PENDIDIKAN FORMAL YANG PERNAH DIIKUTI

No	Pendidikan Formal Responden	Frekuensi	%
1	Tidak tamat SD	7	8,7
2	Tamat SD	47	58,8
3	SLTP	14	17,5
4	SLTA	5	6,3
	Total	73	100,0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 1a2 pada sosek

Pendidikan yang pernah diikuti oleh 73 responden, berdasarkan tabel 4.34 tentang keikutsertaan pada pendidikan formal, ternyata sebagian besar responden adalah tamat SD yaitu sebesar 58,8 %, sedangkan yang terkecil adalah SLTA hanya sebesar 6,3 %

Dari gambaran yang ada tersebut, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden pada umumnya cukup rendah yaitu tamat SD, walaupun ada yang tamat SLTA namun persentasenya sedikit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerjaan mereka tidak tinggi, dan ini terlihat pada jawaban pada tabel sebelumnya bahwa sebagian pekerjaan mereka adalah buruh, petani dan sejenisnya. Akibat dari hal tersebut, maka harapan untuk ikut menyumbangkan pemikiran dalam meningkatkan Wajib Belajar akan sulit.

Tabel 4.35

## KEIKUTSERTAAN DALAM PENDIDIKAN NON FORMAL

No	Keikutsertaan Responden	Frekuensi	%
1	Tidak pernah	69	86.3
4	Pernah	11	13.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.1b1 pada Sosek

Berdasarkan tabel 4.35 bahwa pada umumnya responden sedikit sekali yang mengikuti pendidikan non formal hal ini terlihat bahwa sebesar 86,3 % tidak pernah mengikuti pendidikan non formal. Hal ini menunjukkan bahwa setelah tamat Sekolah Dasar, tidak pernah terfikir untuk mencari tambahan pengetahuan, melainkan langsung bekerja. Keadaan tersebut menyebabkan mereka hanya dapat bekerja pada sektor tertentu sajamisalnya burh, petani atau sejenisnya.

Tabel 4.36

## PENDIDIKAN NON FORMAL YANG PERNAH DIKUTI

No	Pendidikan Non Formal Responden	Frekuensi	%
1	Tidak pernah mengikuti	69	86.3
2	Penataran	0	0.0
3	Kursus	9	11.2
4	Lain-lain	2	2.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.1b2 pada sosek

Berdasarkan tabel 4.36 tentang pendidikan Non Formal yang diikuti responden, maka sebagian besar responden yaitu sebesar 86,3 %, tidak pernah mengikuti pendidikan non formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memikirkan bahwa dengan tidak memiliki pendidikan non formal berupa keterampilan, dan hanya mengandalkan tamat SD, akan sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Tabel 4.37

PENGHASILAN PER HARI

No	Penghasilan Responden	Frekuensi	%
1	Kurang dari Rp. 15.000,-	24	30.0
2	Rp. 15.000,- - Rp. 25.000,-	42	52.5
3	Rp. 25.001,- - Rp. 36.000,-	9	11.2
4	Diatas Rp. 36.000,-	5	6.3
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.1 pada sosek

Berdasarkan tabel 4.37 Tentang penghasilan per hari, responden yang mempunyai penghasilan antara Rp. 15.000,- - Rp. 25.000,- sebanyak 52,5 % dan responden sebesar 30 % berpenghasilan kurang dari Rp. 15.000,- selebihnya di luar dari kedua kategori tersebut.

Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa tingkat penghasilan mereka tidak terlalu tinggi, dan mayoritas hanya cukup untuk penghidupan secara sederhana. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mereka adalah buruh, tukang becak dan lain sebagainya

Tabel 4.38

## PENGHASILAN PER MINGGU

No	Penghasilan Per Minggu	Frekuensi	%
1	< Rp. 75.000,-	24	30.0
2	Rp. 76.000,- - Rp. 100.000,-	25	31.3
3	Rp. 101.000,- - Rp. 125.000,-	17	21.2
4	Diatas 125.000,-	14	17.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.1 pada sosek

Berdasarkan tabel 4.38 tentang penghasilan per minggu, sebagian kecil dari responden yaitu 30 % mempunyai penghasilan di bawah Rp. 75.000,-- selebihnya sebesar 70 % mempunyai penghasilan di atas Rp. 76.000,-- per minggu. Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa penghasilan mereka hanya cukup untuk hidup secara sederhana.

Tabel 4.39

## PENGHASILAN PER BULAN

No	Penghasilan Responden	Frek	%
1	< Rp. 200.000,-	5	6.2
2	Rp. 201.000,- - Rp. 300.000,-	19	23.8
3	Rp. 301.000,- - Rp. Rp. 400.000,-	25	31.2
4	> Rp. 400.000,-	31	38.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.1 pada sosek

Berdasarkan tabel 4. 39 tentang penghasilan per bulan, maka responden yang berpenghasilan di atas Rp. 400.000,-- hanya sebesar 38,8 % sedangkan yang di bawah Rp. 400.000,-- bahkan sampai di bawah Rp. 200.000,-- total sebesar 61,2 % Dari gambaran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan mereka agak rendah. Rendahnya penghasilan mereka tersebut, disebabkan karena pekerjaannya hanya buruh tani.

Tabel 4.40

PENGHASILAN PER SEMESTER

No	Penghasilan Responden	Frekuensi	%
1	< Rp. 1.000.000,-	5	6.3
2	Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,-	19	23.8
3	Rp. 1.501.000 – Rp. 2.000.000,-	42	52.5
4	> Rp. 2.000.000.-	14	17.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.1 pada sosek

Berdasarkan tabel 4.40 tentang penghasilan per Semester terdapat 52,5 % yang berpenghasilan Rp. 1.501.000,-- sampai dengan Rp. 2.000.000,-- dan yang di atas Rp. 2.000.000,-- sebanyak 17,5 % Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa penghasilan mereka tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya mereka hanya sebagai buruh, dan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyekolahkan anaknya.

Tabel 4.41

## PENGELUARAN PER HARI

No	Pengeluaran Responden	Frekuensi	%
1	Kurang dari Rp. 15.000,-	24	30.0
2	Rp. 15.000,- - Rp. 25.000,-	45	56.3
3	Rp. 25.001,- - Rp. 36.000,-	8	10.0
4	Diatas Rp. 36.000,-	3	3.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 2 pada sosek

Dari sisi pengeluaran untuk kebutuhan hidup, dapat dilihat dalam tabel 4.41 Di atas tentang pengeluaran per hari. Berdasarkan tabel tersebut, pengeluaran terbanyak adalah yang berkisar antara Rp. 15.000,-- sampai dengan Rp. 25.000,- yaitu sebesar 56,3 %, Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa pengeluaran setiap harinya cukup tinggi, karena yang di bawah Rp. 15.000,-- hanya 30 %.

Tabel 4.42

## PENGELUARAN PER MINGGU

No	Pengeluaran Responden	Frekuensi	%
1	Rp. 50.000,- - Rp. 75.000,-	24	30.0
2	Rp. 76.000,- - Rp. 100.000,-	36	45.0
3	Rp. 101.000,- - Rp. 125.000,-	9	11.2
4	Diatas 125.000,-	11	13.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 2 pada sosek

Berdasarkan tabel 4.42 Tentang pengeluaran per minggu, maka responden yang pengeluarannya Rp. 76.000,-- sampai dengan Rp. 100.000,-- menempati jumlah yang tertinggi yaitu sebesar 45 %, Dari gambaran pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pengeluaran per minggunya mereka cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena desa dari responden cukup jauh dari pusat kota sehingga biaya transport yang cukup tinggi.

Tabel 4.43.

PENGELUARAN PER BULAN

No	Pengeluaran Responden	Frekuensi	%
1	< Rp. 200.000,-	7	8.7
2	Rp. 201.000,- - Rp. 300.000,-	17	21.3
3	Rp. 301.000,- - Rp. 400.000,-	36	45.0
4	> Rp. 400.000,-	20	25.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 2 pada sosek

Dari tabel 4.43 tentang pengeluaran per bulan, dapat di lihat bahwa yang pengeluarannya Rp. 301.000,-- sampai dengan Rp. 400.000,-- mencapai 45% sedangkan lainnya kurang dari Rp. 200.000,-- sampai dengan Rp. 300.000,--, sedangkan yang di atas Rp. 400.000,-- hanya 25 % Dari hasil tabel tersebut pengeluaran mereka per bulan cukup tinggi, sehingga bila dibanding dengan pendapatan, termasuk pas-pasan. Dalam kaitannya dengan upaya menyekolahkan anaknya, akan terbentur pada biaya pendidikan yang relatif tinggi.

Tabel 4. 44  
PENGELUARAN PER SEMESTER

No	Pengeluaran Responden	Frekuensi	%
1	< Rp. 1.000.000,-	7	8.8
2	Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,-	22	27.5
3	Rp. 1.501.000 – Rp. 2.000.000,-	40	50.0
4	> Rp. 2.000.000.-	11	13.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. 2 pada Sosek

Berdasarkan tabel 4.44 Tentang pengeluaran per semester, hasil terbanyak adalah pengeluaran antara Rp. 1.501.000,-- sampai dengan Rp. 2.000.000,-- yaitu sebesar 50 %, sedangkan lainnya di bawah atau di atas jumlah tersebut. Dengan demikian menunjukkan bahwa pengeluaran per semester responden cukup tinggi

Dari keseluruhan nilai variabel Sosial Ekonomi, yang dijawab oleh responden, dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tinggi rendahnya tingkat sosial ekonomi, dengan empat klasifikasi yaitu rendah, cukup tinggi, tinggi, dan sangat tinggi, maka dapat disusun seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.45

## REKAPITULASI TINGKAT SOSIAL EKONOMI

No.	Tingkat Sosial Ekonomi	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat Rendah	31	38.8
2.	Rendah	40	50.0
3.	Tinggi	9	11.2
4.	Sangat Tinggi	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari variabel SOSIAL EKONOMI

Berdasarkan tabel 4.45 tentang rekapitulasi tingkat Sosial Ekonomi, ternyata separo dari responden atau 50 %, tingkat Sosial ekonominya rendah, bahkan sebanyak 38,7 %, tingkat sosial ekonominya sangat rendah. Hanya sebagian kecil yaitu 11.2% yang tingkat sosial ekonominya tinggi. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden tingkat sosial ekonominya rendah. Hal tersebut disebabkan karena mereka sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar, dan pekerjaan mereka sebagian besar adalah buruh, serta penghasilan mereka yang cukup rendah, disertai dengan pengeluaran yang cukup tinggi. Dari kondisi tersebut, dikarenakan tingkat sosial ekonomi yang rendah, dapat menyebabkan mereka tidak menyekolahkan anaknya. Dengan demikian akan mengurangi tercapainya keberhasilan Wajib Belajar.

#### 4. Motivasi

Penelitian mengenai motivasi sebagai variabel bebas kedua dalam mempengaruhi partisipasi terhadap keberhasilan Wajib Belajar, meliputi dorongan-dorongan baik dorongan dari dalam maupun dorongan dari luar, yang meliputi ketidak tahuan terhadap program, pemahaman terhadap arti penting Wajib Belajar, serta dorongan dari diri sendiri untuk menyekolahkan anaknya, serta adanya anjuran, contoh dari orang lain sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap partisipasi tersebut, akan dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 4.46

#### KETIDAK TAHUAN PROGRAM WAJAR

No	Ketidak tahuan Program	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	5	6.3
2	Tidak setuju	10	12.5
3	Setuju	55	68.7
4	Sangat setuju	10	12.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M1

Berdasarkan tabel 4.46 tentang tidak menyekolahkan anaknya karena tidak tahu program Wajib Belajar, responden yang tidak mengetahui program wajar ternyata cukup tinggi yaitu sebesar 68,7 % Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa pada umumnya mereka belum mengetahui dengan jelas tentang adanya

program Wajib Belajar. Hal tersebut disebabkan mereka menganggap bahwa program tersebut bukan merupakan kepentingan mereka, namun menjadi kepentingan pemerintah.

Tabel 4.47

PEMAHAMAN TERHADAP ARTI PENTING PENDIDIKAN

No	/ Pentingnya Pendidikan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	18	22.5
3	Setuju	48	60.0
4	Sangat setuju	14	17.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M2

Berdasarkan tabel 4.47 mengenai pertanyaan tidak menyekolahkan anaknya karena tidak tahu arti pentingnya pendidikan bagi anak, maka terdapat 60 % responden yang menyatakan setuju. Dengan demikian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak melalui program Wajar, belum banyak dipahami oleh responden. Mereka tidak mengetahui bahwa dengan memahami masalah pendidikan, berarti memahami tentang program Wajar. Hal tersebut disebabkan karena penyuluhan tentang Wajib belajar tidak dilakukan secara massal.

Tabel 4.48

## PERLUNYA DORONGAN DIRI SENDIRI UNTUK MENYEKOLAHKAN

No	Perlunya Dorongan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	65	81.3
4	Sangat setuju	15	18.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M3

Berdasarkan tabel 4.48 tentang perlunya dorongan dari diri sendiri untuk menyekolahkan anaknya, maka tidak ada yang tidak setuju, sehingga seluruhnya menyatakan setuju. Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa dalam menyekolahkan anaknya diperlukan dorongan dari diri sendiri, atau diperlukan motivasi dari dalam.

Tabel 4.49

## KEWAJIBAN MENYEKOLAHKAN ANAK

No	Kewajiban Menyekolahkan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	60	75.0
4	Sangat setuju	20	25.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M4

Berdasarkan tabel 4.49 tentang kewajiban menyekolahkan anaknya, maka yang tidak setuju ternyata tidak ada. Sedangkan yang menyatakan setuju dan sangat setuju sebesar 100 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka menyadari kewajiban menyekolahkan anaknya adalah menjadi tanggung jawabnya. Dengan motivasi yang terlihat tersebut, akan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam mendukung program

Tabel 4.50

ADANYA KEINGINAN ANAKNYA PINTAR

No	Pendapat Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	51	63.7
4	Sangat setuju	29	36.3
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M5

Berdasarkan tabel 4.50 tentang keinginan menyekolahkan anaknya agar anaknya pintar, maka tidak ada responden yang tidak menyetujui sehingga kesemua responden menyatakan setuju atau sangat setuju. Dari gambaran yang demikian dapat dikatakan bahwa mereka menginginkan agar anaknya pintar. Ini merupakan dorongan dari diri sendiri yang dapat mendukung partisipasi keberhasilan program.

Tabel 4.51

## TUJUAN MENYEKOLAHKAN ANAKNYA

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	6	7.5
3	Setuju	59	73.7
4	Sangat setuju	15	18.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M6

Berdasarkan tabel 4.51 tentang tujuan tertentu dalam menyekolahkan anaknya walaupun ada responden yang menyatakan tidak setuju, namun yang setuju sebanyak 73,8 % Dari gambaran yang demikian menunjukkan bahwa pada umumnya dalam menyekolahkan anaknya mereka mempunyai tujuan tertentu, yaitu ingin anaknya pintar.

Tabel 4.52

## PERLUNYA DORONGAN DARI LUAR

No	Perlunya Dorongan	Frek	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	5	6.3
3	Setuju	52	65.0
4	Sangat setuju	23	28.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M7

Berdasarkan tabel 4.54 tentang perlunya dorongan dari luar untuk menyekolahkan anaknya, ada yang menjawab tidak setuju, namun jumlahnya relatif kecil yaitu sebesar 6,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa responden tersebut tidak memerlukan dorongan dari luar. Adapun yang menjawab setuju sebesar 65 %, dan ada juga yang menyatakan sangat setuju menunjukkan bahwa yang menyadari akan pentingnya pendidikan hanya sedikit, sehingga memerlukan motivasi yang berupa dorongan dari luar diperlukan agar mereka berpartisipasi terhadap Wajib Belajar

Tabel 4.53

MASA DEPAN ANAK BERSEKOLAH

No	Masa Depan Anak Bersekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	9	11.3
3	Setuju	51	63.7
4	Sangat setuju	20	25.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M8

Berdasarkan tabel 4.53 mengenai masa depan anaknya bila bersekolah, maka sebagian besar dari responden yang total sebesar 88,7 % menyatakan setuju bahwa anak yang bersekolah, masa depannya baik. Hal tersebut disebabkan mereka berfikir bahwa anak-anaknya, jangan sampai seperti orang tuanya yang hanya berpendidikan SD yang akhirnya hanya sebagai buruh, dan tidak mampu.

Tabel 4.54

## ANAK TIDAK SEKOLAH BISA KAYA

No	Pendapat Responden	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0	0.0
2	Setuju	31	38.7
3	Tidak setuju	35	43.8
4	Sangat tidak setuju	14	17.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M9

Berdasarkan tabel 4.54 tentang pandangan terhadap kekayaan karena tidak bersekolah maka terdapat jawaban yang setuju sebesar 38,7 %. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa mereka menganggap peranan sekolah tidak penting, karena mereka berpendapat bahwa tidak bersekolahpun dapat kaya , dan pendapat demikian masih cukup dominan, serta banyak contohnya di daerah tersebut, yang saat ini justru menjadi pengusaha bawang merah yang sukses. Sedangkan sebagian besar responden menyatakan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju terhadap pandangan demikian yaitu sebanyak 61,3 %, . Dari jumlah tersebut dikarenakan sebagian besar responden mempunyai pandangan yang positif, dan mempunyai motivasi yang tinggi dan mendukung secara positif pelaksanaan Wajib Belajar.

Tabel 4.55

## MAMPU TETAPI TIDAK MENYEKOLAHKAN ANAK

No	Pendapat responden	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0	0.0
2	Setuju	22	27.5
3	Tidak setuju	40	50.0
4	Sangat tidak setuju	18	22.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M10

Dari tabel 4.55 di atas terlihat bahwa yang mampu tetapi tidak menyekolahkan anaknya mencapai 27,5 % Sedangkan sebagian besar menyatakan yang tidak setuju artinya mampu dan menyekolahkan anaknya, yaitu total sebanyak 72,5 % Dari gambaran yang demikian, menunjukkan bahwa mereka yang mampu akan menyekolahkan anaknya, dan ini masih cukup banyak.

Tabel 4.56

## KEWAJIBAN MENYEKOLAHKAN ANAKNYA

No	Kewajiban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	5	6.3
3	Setuju	60	75.0
4	Sangat setuju	15	18.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M11

Berdasarkan tabel 4.56 tentang pernyataan bahwa menyekolahkan anaknya adalah kewajiban orang tua, ada sebagian kecil responden yang menyatakan tidak setuju. Dari 80 responden yang ada, sebanyak 75 % menyatakan setuju, bahkan menyatakan sangat setuju. Dari gambaran yang demikian, masih banyak yang mempunyai pandangan yang positif terhadap peran orang tua dalam pendidikan anak. Kondisi yang demikian dapat mendukung keberhasilan Wajib Belajar.

Tabel 4.57

PERLUNYA KEGIATAN WAJIB BELAJAR

No	Perlunya Kegiatan Wajar	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	62	77.5
4	Sangat setuju	18	22.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M12

Berdasarkan tabel 4.57 tentang perlunya kegiatan Wajib Belajar dari 80 responden tidak ada yang tidak setuju atau 0 % hal ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya mereka menyetujui adanya kegiatan Wajib belajar. Hal ini didukung dengan jawaban sebanyak 77,5 % menyatakan setuju, dan sebesar 22,5 % menyatakan sangat setuju. Dari hasil yang demikian menunjukkan bahwa mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar, dengan menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang ada.

Tabel 4.58

## DORONGAN BERSEKOLAH TANPA UANG SAKU

No	Sekolah Tanpa Uang Saku	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	32	40.0
3	Setuju	33	41.3
4	Sangat setuju	15	18.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M13

Pandangan terhadap perlunya uang saku sebagai dorongan terhadap anak untuk bersekolah, berdasarkan tabel 4.58 terdapat responden yang tidak setuju adanya uang saku hal tersebut menandakan bahwa dalam menyekolahkan anaknya harus diperlukan uang saku. Namun kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga akhirnya mereka tidak menyekolahkan anaknya. Kondisi yang demikian dapat menghambat keberhasilan program. Sedangkan sebagian besar responden atau total sebesar 60 % menyatakan setuju bahwa anaknya sekolah tanpa uang saku. Dengan demikian menunjukkan bahwa mereka memberi motivasi yang tinggi terhadap anak, walau tanpa uang saku mereka tetap bersekolah. Kondisi yang demikian sangat mendukung pelaksanaan Wajib Belajar

Tabel 4.59

## PERASAAN MANTAP ANAKNYA BERSEKOLAH

No	Kemantapan Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	7	8.7
3	Setuju	61	76.3
4	Sangat setuju	12	15.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M14

Adanya perasaan mantap dari orang tua bila anaknya bersekolah, dapat dilihat pada tabel 4.59 dimana sebagian kecil menyatakan tidak setuju, yang berarti masih kurang mantap, sedangkan sebesar 76,3 % menyatakan setuju, dan ada yang menyatakan sangat setuju. Dengan demikian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mereka mendukung program pemerintah dalam hal Wajib Belajar.

Tabel 4.60

## PENDIDIKAN MERUPAKAN KEBUTUHAN POKOK .

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	2	2.5
3	Setuju	67	83.7
4	Sangat setuju	11	13.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M15

Berdasarkan tabel 4.60, bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok, maka terdapat 83,7 % yang menyatakan setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka cukup memahami arti pentingnya pendidikan, dengan demikian akan mendukung pelaksanaan Wajib Belajar, karena dengan memahami arti pentingnya pendidikan, mereka akan mau menyekolahkan anaknya, walaupun tidak mampu.

Tabel 4. 61

TERDORONG ANAK ORANG LAIN BERSEKOLAH

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	2	2.5
2	Tidak setuju	10	12.5
3	Setuju	65	81.3
4	Sangat setuju	3	3.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M16

Berdasarkan tabel 4.61 tentang adanya dorongan dari luar berupa anak orang lain yang sekolah sehingga mereka menyekolahkan anaknya, maka terdapat 81,3 % yang menyatakan setuju. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa mereka termotivasi bila melihat anak orang lain bersekolah. Dengan adanya motivasi tersebut, mereka akan segera menyekolahkan anaknya, walau tidak mampu sekalipun. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa motivasi mereka cukup tinggi, sehingga dapat mendukung pelaksanaan Wajib Belajar.

Tabel 4.62

## PANDANGAN TERHADAP SEKOLAH ANAKNYA

No	Pandangan Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	2	2.5
3	Setuju	68	85.0
4	Sangat setuju	10	12.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M17

Berdasarkan tabel 4.62 tentang adanya pandangan positif terhadap keberhasilan pendidikan sehingga mereka menyekolahkan, maka terdapat 85 % yang menyatakan setuju. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa mereka memahami arti pentingnya pendidikan bagi anak, serta memahami dampak positif bila anaknya bersekolah.

Tabel 4.63

## PENDIDIKAN BAGUS BAGI ANAK

No	Pendidikan Bagus bagi Anak	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	2	2.5
3	Setuju	63	78.8
4	Sangat setuju	15	18.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.M18

Pandangan responden bahwa pendidikan itu bagus bagi anak, ternyata ada yang tidak setuju hal ini dapat dilihat pada tabel 4.63. Namun sejumlah 78,8 % menyatakan setuju dan ada yang menyatakan sangat setuju. Dari hal yang demikian, menunjukkan bahwa mereka mempunyai pandangan yang positif terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anak

Pertanyaan mengenai motivasi, sebagai variabel bebas kedua, yang mempunyai indikator-indikator yang ditanyakan pada responden, bila dikelompokkan berdasarkan klasifikasi meliputi tinggi rendahnya motivasi, maka dapat disusun dalam tabel berikut.

Tabel 4.64

REKAPITULASI TINGKAT MOTIVASI

No.	Tingkat Motivasi	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat Rendah	0	0.0
2	Rendah	0	0.0
3	Tinggi	65	81.3
4	Sangat Tinggi	16	18.7
		80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari variabel MOTIVASI

Berdasarkan tabel 4.64 mengenai rekapitulasi jawaban responden yang menyangkut motivasi, ternyata dari jumlah 80 responden, sebanyak 81,3 % mempunyai motivasi

yang tinggi, dan sebesar 18,7 % motivasinya sangat tinggi. Dari gambaran yang demikian, dikarenakan mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyekolahkan anak, maka mampu, tidak mampu, mereka akan tetap menyekolahkan anaknya, sehingga akhirnya program Wasjar dapat berjalan

### 5. Sikap

Sikap merupakan variabel bebas ketiga yang menjadi obyek penelitian, yang dalam hal ini adalah sikap masyarakat pada lima desa yang diteliti, meliputi tingkat kepedulian terhadap pendidikan, tingkat respon yang positif, tingkat pemahaman terhadap program pendidikan, yang dalam hal ini adalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar, sikap terhadap lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, kesemuanya akan terdapat dalam tabel-tabel berikut, beserta hasil analisisnya.

Tabel 4.65

#### PENGHASILAN UNTUK BIAYA SEKOLAH

No	Penghasilan untuk Biaya	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	4	5.0
2	Tidak setuju	41	51.2
3	Setuju	35	43.8
4	Sangat setuju	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK1

Berdasarkan tabel 4.65 tentang pertanyaan mengenai penghasilannya untuk biaya sekolah, maka terdapat 51,2 % yang menyatakan tidak setuju. Kondisi yang diharapkan sebenarnya mereka menyetujui bahwa penghasilannya yang pas-pasan juga digunakan untuk biaya pendidikan. Prosentase tersebut tidak terlalu mencolok perbedaannya dibanding yang menyetujui yaitu 43,8 %. Hal ini disebabkan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga mereka menginginkan sekolah tanpa pendidikan

Tabel 4.66

MENGUSAHAKAN BIAYA SEKOLAH

No	Mengusahakan Biaya Sekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	26	32.5
3	Setuju	46	57.5
4	Sangat setuju	8	10.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK2

Berdasarkan tabel 4.66 mengenai diusahakannya biaya sekolah meskipun penghasilan tidak mencukupi, maka hal ini sesuai dengan kondisi yang peneliti harapkan yaitu lebih dari 50 %, hal ini terbukti dari yang menjawab setuju maupun sangat setuju, seluruhnya sebesar 67,5 %. Hal ini menggembirakan bagi pelaksanaan pendidikan karena mereka cukup memberikan respon yang positif.

Tabel 4.67

## MENABUNG UNTUK BIAYA SEKOLAH

No	Menabung untuk Biaya Sekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	3	3.8
2	Tidak setuju	29	36.2
3	Setuju	40	50.0
4	Sangat setuju	8	10.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK4

Pertanyaan tentang setuju tidaknya sebagian penghasilannya yang pas-pasan ditabung untuk biaya sekolah, maka pada tabel 4.67 terlihat bahwa sebanyak 60 % menyatakan setuju dan sangat setuju. Kondisi ini sesuai dari harapan terhadap respon positif dari responden untuk ikut mendukung pendidikan melalui ikut menyekolahkan anaknya.

Tabel 4.68

## PERLUNYA ANAK Mencari NAFKAH TAMBAHAN

No	Anak Mencari Nafkah Tambahan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	41	51.2
3	Setuju	36	45.0
4	Sangat setuju	3	3.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK5

Berdasarkan tabel 4.68 yang menanyakan bila anaknya tetap sekolah, namun mencari nafkah tambahan, maka dari hasil tersebut sebesar 51,2 % menyatakan tidak setuju. Ketidak setujuan mereka berdasarkan dari wawancara adalah didasari adanya pertimbangan bahwa anak mereka hanya mencari nafkah saja, dan tidak sekolah. Namun dari hasil yang menyetujui, bahwa masih cukup banyak yang menghendaki anaknya tetap sekolah namun ikut membantu orang tua mencari nafkah seusai pulang sekolah. Kondisi ini masih cukup menggembirakan bagi perkembangan pelaksanaan Wajib Belajar

Tabel 4.69

ANAK BERSEKOLAH SAMBIL MENCARI NAFKAH

No	Sekolah dan Mencari Nafkah	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	3	3.8
2	setuju	58	72.4
3	Tidak Setuju	16	20.0
4	Sangat Tidak setuju	3	3.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK6

Berdasarkan tabel 4.69 mengenai ketegasan terhadap sikap orang tua bahwa mereka setuju atau tidak anaknya bersekolah sambil mencari nafkah, maka terdapat 72,4 % yang menyatakan setuju. Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa sikap mereka positif akan berpengaruh terhadap partisipasi keberhasilan Wajib Belajar.

Tabel 4.70

## SIKAP ADANYA PENDIDIKAN YANG TINGGI

No	Sikap Terhadap Pendidikan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	64	80.0
4	Sangat setuju	16	20.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK7

Berdasarkan tabel 4.70 mengenai pertanyaan terhadap sikap responden tentang adanya lembaga pendidikan yang lebih tinggi di daerahnya, tidak ada yang menyatakan tidak setuju, dan sebesar 80 % menyatakan setuju, bahkan ada yang menyatakan sangat setuju. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap keberadaan pendidikan sangat positif.

Tabel 4.71

## SIKAP BILA ANAKNYA HARUS SEKOLAH

No	Sikap bila. Anak bersekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	7	8.8
2	Tidak setuju	2	2.5
3	Setuju	60	75.0
4	Sangat setuju	11	13.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK7a

Berdasarkan tabel 4.71 tentang sikap responden bila anaknya bersekolah, maka terdapat sebesar 75 % menyatakan setuju. Gambaran tersebut merupakan sikap positif terhadap pendidikan anaknya. Kondisi seperti yang tergambar tersebut, akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan

Tabel 4.72

PENGHASILAN TIDAK CUKUP, ANAK TETAP SEKOLAH

No	Anak Tetap Sekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	4	5.0
2	Tidak setuju	4	5.0
3	Setuju	59	73.8
4	Sangat setuju	13	16.2
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK8

Dari sikap responden, walaupun penghasilannya tidak mencukupi, namun biaya sekolah tetap harus diadakan, maka berdasarkan tabel 4.72 tersebut, bahwa sebesar 73,8 % menyatakan setuju, bahkan secara total mencapai jumlah 90 % Kondisi ini sesuai yang diharapkan, karena dengan tetap mengusahakan biaya walau penghasilannya tidak cukup, tetap membiayai anaknya untuk sekolah. Hal ini berarti motivasinya tinggi, dan sikap mereka positif untuk ikut berpartisipasi dalam menyekolahkan anaknya.

Tabel 4.73

## PENDIDIKAN MENJAMIN KEHIDUPAN YANG BAIK

No	Pendapat Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	7	8.7
2	Tidak setuju	23	28.8
3	Setuju	48	60.0
4	Sangat setuju	2	2.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK9

Berdasarkan tabel 4.73, tentang pendidikan anak yang dapat menjamin kehidupan, ternyata ada yang belum yakin terhadap masa depan anaknya bila mengenyam pendidikan, namun sebesar 60 % menyatakan setuju. Kondisi demikian menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih mempercayai bahwa tanpa pendidikan, masa depan anaknya akan tidak terjamin.

Tabel 4.74

## TANPA SEKOLAH ANAK BISA KAYA

No	Pendapat anak Sekolah kaya	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0	0.0
2	Setuju	27	33.8
3	Tidak setuju	44	55.0
4	Sangat tidak setuju	9	11.2
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK10

Masih adanya pandangan bahwa tanpa sekolah bisa kaya, dapat dilihat pada tabel 4.74 , karena masih ada yang menyatakan setuju. Namun responden yang menyatakan tidak setuju, yang berarti pendidikan merupakan sarana untuk bisa mempunyai masa depan yang lebih baik, masih cukup banyak yaitu sebesar 55 %. Kondisi ini menunjukkan sikap yang positif terhadap masa depan pendidikan

Tabel 4.75

JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN

No	Jaminan Mendapat Pekerjaan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	38	47.5
3	Setuju	36	45.0
4	Sangat setuju	6	7.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK11

Sebagian responden masih mempunyai pandangan bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini terlihat pada tabel 4.75 dimana responden sebesar 47,5 % menyatakan tidak setuju. Ketidak setujuan mereka didasarkan adanya fakta di daerahnya, yaitu adanya anak lulusan SLTA yang menganggur. Namun masih ada sebagian besar responden yang menunjukkan sikap positif terhadap jaminan bahwa pendidikan akan memudahkan mendapat pekerjaan, yang jumlahnya juga mencapai 52,5 %

Tabel 4.76

## BEBAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI ORANG TUA

No	Pembebanan Biaya Pendidikan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	3	3.8
2	Tidak setuju	48	60.0
3	Setuju	29	36.2
4	Sangat setuju	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK12

Sikap responden terhadap pembebanan biaya, , pada tabel 4.76 menunjukkan adanya responden sebesar 60 % yang menyatakan tidak setuju. Kondisi ini disebabkan karena kemampuan responden untuk membiayai hidupnya masih kurang , dikarenakan pekerjaannya sebagian besar adalah buruh.

Tabel 4.77

## PERMASALAHAN TINGGINYA BIAYA PENDIDIKAN

No	Tingginya Biaya Pendidikan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	18	22.5
2	Tidak setuju	45	56.2
3	Setuju	17	21.3
4	Sangat setuju	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK13

Beban biaya pendidikan yang cukup tinggi, masih menjadi masalah bagi responden yang secara keseluruhan mempunyai tingkat penghasilan yang kurang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.77 tentang pertanyaan mengenai beban biaya, dan terlihat bahwa sebesar 56,2 % menyatakan tidak setuju. Ini berarti bahwa mereka merasa bahwa beban biaya pendidikan yang bagi mereka cukup tinggi, menjadi masalah tersendiri. Untuk itu dalam pelaksanaan Wajib Belajar, perlu diperhitungkan adanya kemungkinan tersebut.

Tabel 4.78

MASALAH JARAK TEMPAT SEKOLAH

No	Jarak Tempat Sekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	4	5.0
2	Tidak setuju	41	51.3
3	Setuju	33	41.2
4	Sangat setuju	2	2.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK14

Berdasarkan tabel 4.78 tentang pertanyaan yang berkaitan dengan jarak antara rumah dengan lokasi sekolah, ternyata sebesar 51,3 % menyatakan tidak setuju, dan ini berarti bagi mereka, permasalahan jarak, yang mau tidak mau menyangkut biaya transportasi akan menjadi masalah, karena pada umumnya mereka berpenghasilan rendah

Tabel 4.79

## MASALAH BIAYA TRANSPORT

No	Biaya Transport	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	11	13.7
2	Tidak setuju	48	60.0
3	Setuju	21	26.3
4	Sangat setuju	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK15

Pertanyaan mengenai permasalahan biaya transport, kaitannya dengan lokasi sekolah yang jauh, berdasarkan tabel 4.79, yang menyatakan tidak setuju sebesar 60 %. Dari hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa permasalahan transport menjadi masalah, dalam kaitannya dengan tingkat penghasilan mereka yang tidak tinggi.

Tabel 4.80

## ANGGAPAN SEKOLAH TIDAK PENTING

No	Terhadap. Pentingnya Sekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	6	7.5
3	Setuju	55	68.8
4	Sangat setuju	19	23.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK16

Berdasarkan tabel 4.80 mengenai pertanyaan kepada responden terhadap arti pentingnya sekolah sehingga mereka mau atau tidak mau menyekolahkan anaknya, maka terdapat sebesar 68,8 % yang menyatakan setuju. Gambaran tersebut bahwa mereka belum mengetahui arti pentingnya pendidikan bagi anaknya. Kalaupun mereka menyekolahkan anaknya, hanya sekedar menurut anjuran pemerintah saja. Kondisi sikap seperti ini perlu diubah agar pelaksanaan pendidikan berjalan lebih bergairah.

Tabel 4.81

SIKAP TERHADAP KEBERADAAN KEJAR PAKET A DAN B

No	Sikap Terhadap Kejar Paket	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	2	2.5
2	Tidak setuju	5	6.3
3	Setuju	73	91.2
4	Sangat setuju	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK17

Sikap responden mengenai keberadaan Kelompok Belajar Paket A maupun B sebagai alternatif dalam upaya menjangkau anak usia sekolah untuk mempunyai pendidikan dasar setara SLTP, disambut positif. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.81, ternyata yang menyatakan setuju sebanyak 91,2 % dari responden yang ada. Kondisi demikian sangat positif dalam menunjang keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Tabel 4.82

## PELAKSANAAN KEJAR PAKET A/B SIANG HARI

No	Sikap Terhadap Waktu Belajar	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	70	87.5
4	Sangat setuju	10	12.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK18

Sebagai alternatif bagi anak usia yang tidak bersekolah di sekolah formal, dikarenakan diminta untuk membantu orang tua mencari nafkah, maka pada tabel 4.82 terdapat 87,5 % yang menyatakan setuju dikarenakan tidak mengganggu sosial ekonomi mereka, terlebih dalam pelaksanaan Kejar Paket ini tidak dipungut biaya sepeserpun, dan letaknya di tempat pemukiman.

Tabel 4.83

## PERLUNYA MELANJUTKAN KE SLTP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	62	77.5
4	Sangat setuju	18	22.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK19

Berdasarkan tabel 4.83 pertanyaan mengenai apakah responden mempunyai keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, pada umumnya mereka menyetujui. Hal ini terlihat pada responden sebesar 77,5 % yang menyatakan setuju, dan ada juga yang menyatakan sangat setuju, dan tidak ada sama sekali yang menyatakan tidak setuju. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap keikutsertaan melaksanakan pendidikan dengan menyekolahkan anaknya sangat positif.

Tabel 4.84

SIKAP TERHADAP PERKAWINAN DINI BAGI PEREMPUAN

No	Sikap Terhadap Perkawinan Dini	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	3	3.8
2	Tidak setuju	24	30.0
3	Setuju	45	56.2
4	Sangat setuju	8	10.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK20

Pandangan bahwa anak perempuan yang sudah mencapai usia 12 - 13 tahun harus dikawinkan, karena bila tidak dianggap sebagai perawan kasep, ternyata masih banyak, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.84 bahwa yang menyatakan setuju ternyata mencapai sebesar 56,2 %. Hal ini sangat menyedihkan, karena harapan pemerintah, pelaksanaan Wajib belajar dapat diikuti oleh seluruh warganegara, laki- laki atau perempuan.

Tabel 4.85

## KAWIN DINI MENGHAMBAT WAJIB BELAJAR

No	Pandangan Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	5	6.3
3	Setuju	63	78.7
4	Sangat setuju	12	15.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK21

Berdasarkan tabel 4.85 tentang pertanyaan bahwa kawin dini menghambat pelaksanaan Wajib Belajar, ternyata yang menyetujui sebanyak 78,7 %. Dari hal tersebut berarti mereka seharusnya tidak melakukan kawin dini terhadap anak perempuannya. Namun dalam tabel 4.85 ternyata mereka menyetujui adanya kawin dini sebesar 56,2 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya ingin melaksanakan kegiatan wajib belajar dengan menyekolahkan anak perempuannya, tapi disisi lain mereka dibatasi adanya budaya yang menyebabkan mereka mengawinkan anaknya dalam usia relatif muda. Kondisi tersebut menyebabkan adanya anak yang telah lulus Sekolah Dasar, tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun dari jawaban tersebut, sikap mereka positif terhadap pelaksanaan wajib belajar, yaitu dengan adanya pandangan bahwa kawin dini menghambat pelaksanaan Wajib Belajar

Tabel 4.86

## KEPEDULIAN TERHADAP ANAK YANG TIDAK SEKOLAH

No	Kepedulian Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	66	82.5
4	Sangat setuju	14	17.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK22

Tingkat kepedulian responden terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah, ternyata sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.86 dimana tidak ada sama sekali yang menyatakan tidak setuju, sedangkan sebesar 82,5 % menyatakan setuju. Ini membuktikan bahwa sikap peduli mereka terhadap masalah pendidikan cukup tinggi

Tabel 4.87

## KEPEDULIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG

No	Tingkat Kepedulian	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	27	33.7
3	Setuju	46	57.5
4	Sangat setuju	7	8.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK23

Daya tampung yang kurang memadai dapat menyebabkan pelaksanaan Wajib Belajar kurang optimal. Sikap peduli terhadap masalah tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.87, yang berisi pertanyaan kepedulian terhadap daya tampung yang kurang, yang terdapat sebesar 57,5 % menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya sedikit. Dari gambaran tersebut, bahwa mereka masih peduli terhadap masalah pendidikan yang memang menjadi tanggung jawab bersama.

Tabel 4.88

KEPEDULIAN TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

No	Kepedulian Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	20	25.0
3	Setuju	42	52.5
4	Sangat setuju	18	22.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK24

Tingkat kepedulian terhadap pendidikan anak, dapat dilihat pada tabel 4.88, walaupun ada yang setuju tidak peduli, karena itu tanggung jawab pemerintah, namun ada sebesar 52,5 % yang menyatakan setuju. Ini menunjukkan bahwa sikap peduli responden terhadap pendidikan anaknya masih cukup tinggi. Kondisi inilah yang kita harapkan, yaitu sikap positif yang mendukung pelaksanaan pendidikan.

Tabel 4.89

## TIDAK PENTINGNYA SEKOLAH

No	Sekolah Tidak Penting	Frekuensi	%
1	Sangat setuju	0	0.0
2	Setuju	31	38.7
3	Tidak Setuju	27	33.8
4	Sangat tidak setuju	22	27.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK25

Masih adanya sikap yang kurang mendukung terhadap pendidikan, karena mereka memandang bahwa sekolah atau tidak sekolah itu tidak penting, hal ini terlihat pada tabel 4.89 dimana responden yang menyatakan setuju sebanyak 38,7 %. Dari jumlah yang ada tersebut, walau kurang dari separo, namun kondisi sikap tersebut cukup memprihatinkan terhadap partisipasi keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar

Tabel 4.90

## PERASAAN SEDIH BILA BANYAK ANAK

No	Perasaan Sedih Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	10	12.5
2	Tidak setuju	28	35.0
3	Setuju	31	38.8
4	Sangat setuju	11	13.7
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK26

Berdasarkan tabel 4.90 tentang pertanyaan apakah responden merasa sedih bila banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah, maka terdapat 38,8 % yang menyatakan setuju. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap kondisi pendidikan sangat positif, karena merasa sedih bila ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Namun juga ada sebagian yang belum peduli, mereka bersikap apatis, apakah anak usia sekolah bersekolah atau tidak. Kondisi yang demikian disebabkan mereka disibukkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tabel 4.91

PENDAPAT TENTANG PROSPEK BERSEKOLAH

No	Pendapat Prospek Sekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	64	80.0
4	Sangat setuju	16	20.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK27

Adanya pandangan terhadap arti pentingnya pendidikan baagi masa depan anak, dapat dilihat dalam tabel 4.91 dimana sebanyak 80 % responden menyatakan setuju, ditambah responden yang menyatakan sangat setuju, sehingga seluruh responden mendukung adanya pendapat tersebut. Sikap responden tersebut sangat positif, sehingga akan dapat mendukung Wajib Belajar.

Tabel 4.92

## KEBERUNTUNGAN ANAK YANG BERSEKOLAH

No	Alternatif Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	11	13.7
3	Setuju	51	63.8
4	Sangat setuju	18	22.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK28

Berdasarkan tabel 4.92 tersebut, mengenai pertanyaan tentang keberuntungan anak responden bila bersekolah. Dalam tabel tersebut, sebesar 63,8 % menyatakan setuju, ditambah dengan responden yang menyatakan sangat setuju. Dari gambaran tersebut, maka sikap mereka mengenai pendidikan bagi anaknya positif.

Tabel 4.93

## KEPUASAAN TERHADAP ANAK YANG BERSEKOLAH

No	Kepuasan Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	2	2.5
3	Setuju	65	81.3
4	Sangat setuju	13	16.2
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK29

Berdasarkan tabel 4.92 tentang sikap responden terhadap anaknya yang bersekolah merasa puas, atau tidak, maka terdapat 81,3 % yang menyatakan setuju, berarti mereka puas, anaknya dapat bersekolah. Sikap positif tersebut menunjukkan motivasi yang tinggi, yang akan mendorong partisipasi untuk menyekolahkan anaknya.

Tabel 4.94

KEBANGGAAN TERHADAP ANAKNYA YANG BERSEKOLAH

No	Kebanggaan Responden	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	62	77.5
4	Sangat setuju	18	22.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK30

Berdasarkan tabel 4.94 tentang kebanggaan orang tua bila melihat anaknya bersekolah, berkaitan erat dengan tingkat kepuasan, ternyata terdapat jumlah yang setuju dan sangat setuju sebanyak 100 %. Hal tersebut sangat menguntungkan pelaksanaan Wajar Dikdas, karena dengan kebanggaan bila anaknya bersekolah, otomatis mereka akan berbondong-bondong untuk berpartisipasi menyekolahkan anaknya.

Tabel 4.95

## KEBUTUHAN LEMBAGA PENDIDIKAN

No	Keutuhan Lembaga Pendidikan	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	0	0.0
2	Tidak setuju	0	0.0
3	Setuju	58	72.5
4	Sangat setuju	22	27.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK31

Dengan adanya sikap yang merasa bangga bila anaknya bersekolah, maka mereka akan menghendaki adanya jenjang pendidikan yang lebih tinggi di wilayahnya, yang dapat menunjang pelaksanaan Wajar Dikdas.. Hal tersebut terungkap pada tabel 4.95 responden yang menyatakan setuju maupun yang menyatakan sangat setuju semuanya berjumlah 100 %.

Tabel 4.96

## KEWAJARAN BIAYA SEKOLAH

No	Kewajaran Biaya Sekolah	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	15	18.7
2	Tidak setuju	24	30.0
3	Setuju	38	47.5
4	Sangat setuju	3	3.8
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no.SK32

Terkait dengan dukungan sikap masyarakat terhadap partisipasi pelaksanaan Wajib Belajar, yang cukup memerlukan biaya yang tinggi, maka pada tabel 4.96 terdapat 47,5 % yang menganggap bahwa biaya sekolah yang tinggi tersebut merupakan hal yang wajar, Hal ini didasarkan adanya motivasi yang tinggi dan sikap yang positif, karena mereka benar-benar merasa puas terhadap anak yang bersekolah, serta mengetahui arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya. Kondisi tersebut memang tidak seluruh responden yang menyatakan setuju, tetapi ada sebagian yang tidak setuju, dikarenakan penghasilan mereka memang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup.

Tabel 4.97

BANYAKNYA KEGIATAN BELAJAR BAGI ANAK

No	Banyaknya Kegiatan Anak	Frekuensi	%
1	Sangat tidak setuju	9	11.2
2	Tidak setuju	12	15.0
3	Setuju	49	61.3
4	Sangat setuju	10	12.5
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari pertanyaan no. SK33

Berdasarkan tabel 4.97, tentang banyaknya kegiatan dalam belajar, maka terdapat 61,3 % yang menyatakan setuju. Ini berarti bahwa mereka menyadari dengan benar tentang kegiatan belajar mengajar, demi masa depan anak mereka. Dengan demikian mereka tidak akan mengganggu anaknya untuk mencari nafkah

Dari berbagai pertanyaan mengenai sikap responden terhadap pendidikan dengan segala kegiatannya dan segala kebutuhannya, dapat dikepompokkan dalam empat tingkatan yaitu rendah, cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 98

REKAPITULASI SIKAP TERHADAP PARTISIPASI

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat Rendah	0	0.0
2	Rendah	7	8.8
3	Tinggi	73	91.2
4	Sangat Tinggi	0	0.0
	Total	80	100.0

Sumber : Jawaban responden dari variabel SIKAP

Berdasarkan tabel 4.98 tentang rekapitulasi sikap terhadap Wajib Belajar, maka sebagian besar jawaban mengenai sikap terhadap pelaksanaan Wajib Belajar menunjukkan responden yang mempunyai sikap tinggi/positif prosentasenya mencapai 91,2% Ini membuktikan bahwa pada umumnya sikap mereka terhadap pendidikan sangat tinggi. Sikap tersebut didasari adanya motivasi yang tinggi, sehingga mereka mau berpartisipasi untuk menyekolahkan anaknya, dan hal tersebut sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar

## C. ANALISIS HASIL PENELITIAN

### 1. Hubungan antara Sosial Ekonomi dengan Partisipasi ( x1 – y )

Untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan antara Sosial Ekonomi dengan Partisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung, akan disajikan tabel silang yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, sebagai berikut.

Tabel 4.99

#### HUBUNGAN ANTARA SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI

Y		X	SOS EK			Total
			1 Rendah	2 Cukup Tinggi	3 Tinggi	
Partisipasi	1 Rendah		19 61.3%	23 57.5%	6 66.7%	48 60.0%
	2 Cukup Tinggi		9 29.0%	15 37.5%		24 30.0%
	3 Tinggi		3 9.7%	2 5.0%	3 33.3%	8 10.0%
Total			31 100.0%	40 100.0%	9 100.0%	80 100.0%

Sumber : Diolah dari jawaban kuesioner

Dari tabel 4.99, tentang hubungan Sosial Ekonomi dengan Partisipasi, maka dapat di kemukakan hasil sebagai berikut :

- Mereka yang berasal dari tingkat sosial ekonomi yang rendah dan tingkat partisipasinya dalam pelaksanaan Wajib Belajar rendah, dari 31 responden yang tingkat sosial ekonominya rendah, mencapai sebesar 61,3 %. Dan yang tingkat

partisipasinya cukup tinggi mencapai 29 %, serta yang partisipasinya tinggi hanya 9,7 %

- Dari responden berasal dari tingkat sosial ekonomi yang cukup tinggi sebanyak 40 responden, maka yang tingkat partisipasinya rendah mencapai sebesar 57,5 %, dan yang tingkat partisipasinya cukup tinggi mencapai 37,5 % serta yang partisipasinya tinggi hanya 5 %.
- Dari responden yang berasal dari tingkat sosial ekonomi tinggi sebanyak 9 responden, maka yang tingkat partisipasinya rendah mencapai 66,7 % sedangkan yang tingkat partisipasinya tinggi mencapai 33,3%
- Secara total dari seluruh responden dari semua tingkat sosial ekonomi, yang tingkat partisipasinya rendah mencapai angka 60 % , yang tingkat partisipasinya cukup tinggi mencapai 30 %, sedangkan yang tingkat partisipasinya tinggi hanya 10 %.

Dari angka-angka tersebut, menunjukkan adanya dan besarnya kecenderungan bahwa mereka yang bersosial ekonomi rendah, akan rendah pula tingkat partisipasinya, atau dapat dikatakan ada hubungan positif antara sosial ekonomi dengan partisipasi tetapi tidak cukup kuat, sehingga belum tentu bila tingkat sosial ekonomi meningkat , maka tingkat partisipasinya akan tinggi pula.. Kekuatan hubungan tersebut akan ditentukan dengan uji Rank Kendall's yang akan dapat terlihat kuat lemahnya hubungan antara sosial ekonomi dengan partisipasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.100

## KORELASI ANTARA SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.024	.114	.215	.830
N of Valid Cases		80			

Dari tabel 4. 100 di atas, berupa hasil uji statistik hubungan antara Sosial Ekonomi dengan Partisipasi, bahwa koefisien korelasi Kendall's antara kedua variabel tersebut adalah 0.024, namun masih lemah, karena kurang dari 0,05. Guna menguji kebenaran hubungan antara kedua variabel, maka dengan Approx Signifikansinya sebesar 0,830, ini membuktikan bahwa harga hitung lebih tinggi dari 0,0, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara sosial ekonomi dengan partisipasi. Namun korelasi tidak signifikan.. Hal tersebut terlihat pada jawaban- tabel hubungan antara sosial ekonomi dengan partisipasi, bahwa yang berasal dari tingkat ekonomi yang tinggi sebanyak 9 responden, sebesar 66,7 % tingkat partisipasinya rendah, atau sejumlah responden yang dari semua tingkatan ekonomi, terdapat 60 % yang partisipasinya rendah Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengaruh sosial ekonomi terhadap partisipasi kurang kuat , atau semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, belum tentu akan semakin tinggi tingkat partisipasinya

## 2. Hubungan antara Motivasi dengan Partisipasi ( $x_2 - y$ )

Motivasi merupakan variabel bebas kedua yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi sebagai variabel tergantung, dalam pelaksanaan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan antara motivasi dengan partisipasi, akan disajikan tabel silang yang menggambarkan hubungan dua variabel sebagai berikut.

Tabel 4.101

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN PARTISIPASI

Y	X	MOTIVASI			Total
		1 Rendah	2 Cukup Tinggi	3 Tinggi	
Partisipasi	1 Rendah	0 0.0	48 73.9 %	0 0.0	48 60.0%
	2 Cukup Tinggi	0 0.0	9 13.8%	15 100%	24 30.0%
	3 Tinggi	0 0.0	8 12.3%	0 0.0	8 10.0%
Total		0 0.0	65 100.0%	15 100.0%	80 100.0%

Sumber : Diolah dari jawaban Kuesener

Berdasarkan tabel 4.101 mengenai hubungan antara motivasi dengan partisipasi, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Mereka yang mempunyai motivasi rendah, tidak berpartisipasi sama sekali.
- Mereka yang motivasinya cukup tinggi, dari responden sebanyak 65, maka sebesar 73,9 % tingkat partisipasinya rendah, dan sebesar 13,8 partisipasinya cukup tinggi, serta sebesar 12,3 partisipasinya tinggi,

- Mereka yang motivasinya tinggi sebanyak 100 % dari 15 responden, tingkat partisipasinya cukup tinggi.
- Secara total dari seluruh responden, maka 60 % responden partisipasinya rendah, dan sebesar 30 % partisipasinya cukup tinggi, sedangkan yang 10 % partisipasinya tinggi.

Dari angka-angka tersebut, menunjukkan adanya dan besarnya kecenderungan bahwa mereka yang motivasinya tinggi akan tinggi pula tingkat partisipasinya, atau dapat dikatakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara Motivasi dengan Partisipasi. Kekuatan hubungan tersebut akan dapat dilihat pada uji Rank Kendall's yang akan dapat terlihat kuat dan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut, pada tabel berikut.

Tabel 4.102

UJI RANK KENDALL'S  
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN PARTISIPASI

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.462	.087	4.399	.000
N of Valid Cases		80			

Berdasarkan tabel 4. 102 mengenai uji statistik antara Motivasi dengan Partisipasi, menunjukkan bahwa koefisien Korelasi Rank Kendall's antara kedua variabel tersebut, adalah sebesar 0,462 dapat dikatakan cukup kuat. Guna menguji kebenaran

hubungan antara kedua variabel tersebut, maka dengan Approx Signifikansi sebesar 0.000 , ini membuktikan bahwa harga hitung 0,462 lebih tinggi dari 0.000, atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara motivasi dengan partisipasi. Pengaruh motivasi tersebut sangat kuat hal ini terlihat pada jawaban pada tabel tunggal maupun tabel silang yang menunjukkan motivasi tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi, akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

### 3. Hubungan antara Sikap dengan Partisipasi ( $x_3 - y$ )

Sikap yang merupakan variabel bebas ketiga, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung. Untuk dapat menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, akan disajikan tabel silang sebagai berikut.

Tabel 4.103

#### HUBUNGAN ANTARA SIKAP DENGAN PARTISIPASI

Y	X	SIKAP			Total
		1 Rendah	2 Cukup Tinggi	3 Tinggi	
Partisipasi	1 Rendah	0	7	41	48
		0.0	100 %	56,2 %	60.0%
	2 Cukup Tinggi	0	0	24	24
		0.0	0.0	32,8 %	30.0%
	3 Tinggi	0	0	8	8
		0.0	0.0	11.0 %	10.0%
Total		0	7	73	80
		0.0	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber : Diolah dari jawaban kuesener

Berdasarkan tabel 4.103 tentang hubungan antara sikap dengan partisipasi, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Responden yang sikapnya tinggi, sebesar 56,2 % tingkat partisipasinya rendah, dan sebesar 32,8 % partisipasinya cukup tinggi, sedangkan yang 11 % partisipasinya tinggi.
- Secara total dari 80 responden, sebesar 60 % partisipasinya rendah, dan yang cukup tinggi sebesar 30 %, sedangkan yang partisipasinya tinggi hanya 10 %.

Dari gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap responden terhadap masalah pendidikan cukup positif, namun tingkat partisipasinya masih cukup rendah. Hal ini disebabkan mereka belum benar-benar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Wajib Belajar, yang disebabkan mereka kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, karena tingkat penghasilan yang kurang, dan pengeluarar yang relatif tinggi. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sikap mereka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Kekuatan hubungan tersebut akan ditentukan dengan uji Rank Kendall's, yang akan melihat kuat dan lemahnya hubungan antara kedua variabel sebagai berikut.

Tabel 4.104

UJI RANK KENDALL's  
HUBUNGAN ANTARA SIKAP DENGAN PARTISIPASI

		Value	Asymp. Std. Error(a)	Approx. T(b)	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.238	.047	2.839	.005
N of Valid Cases		80			

Berdasarkan tabel 4.104 mengenai uji hubungan antara sikap dengan partisipasi, menunjukkan bahwa Koefisien Korelasi Rank Kendall's antara kedua variabel sebesar 0,283. Guna menguji kebenaran hubungan antara kedua variabel tersebut, maka dengan Approx. Signifikansi sebesar 0,005, membuktikan bahwa harga hitung lebih besar dari harga tabel, atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara sikap dengan partisipasi.

Disini dapat diterangkan bahwa semakin tinggi sikap mereka terhadap pelaksanaan wajar, maka semakin tinggi partisipasi mereka.

#### **4. Hubungan antara Sosial Ekonomi, Motivasi dan Sikap**

##### **dengan Partisipasi ( $x_1, x_2, x_3 - y$ )**

Setelah dilihat hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel tergantung, maka akan dilihat pula hubungan ketiga variabel bebas yaitu Sosial Ekonomi, Motivasi dan Sikap dengan partisipasi sebagai variabel tergantung, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.105

## HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DENGAN RUMUS KENDALL'S

			PARTI SIPASI	Sosial Ekonomi	Motivasi	Sikap
Kendall's tau_b	PARTISI PASI	Correlation Coefficient	1.000	.024	.462(**)	.238(*)
		Sig. (2-tailed)	.	.815	.000	.028
		N	80	80	80	80
	Sosial Ekonomi	Correlation Coefficient	.024	1.000	.018	.133
		Sig. (2-tailed)	.815	.	.865	.220
		N	80	80	80	80
	Motivasi	Correlation Coefficient	.462(**)	.018	1.000	.149
		Sig. (2-tailed)	.000	.865	.	.186
		N	80	80	80	80
	Sikap	Correlation Coefficient	.238(*)	.133	.149	1.000
		Sig. (2-tailed)	.028	.220	.186	.
		N	80	80	80	80
** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).						
* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).						

Berdasarkan tabel 4.105 mengenai korelasi antar variabel dengan menggunakan rumus Kendall's, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

- Antara Sosial Ekonomi dengan Partisipasi, terdapat koefisien korelasi sebesar 0,024 dengan angka signifikansi (two tailed test) sebesar 0,815. Dari hal yang demikian menunjukkan bahwa antara sosial ekonomi dengan partisipasi, ada hubungan positif, tetapi sangat lemah karena kurang dari 0,05, dan dapat dikatakan bahwa semakin

tinggi tingkat sosial ekonomi, belum tentu akan semakin tinggi tingkat partisipasi. Oleh karena itu perlu adanya variabel lain yang diteliti.

- Hubungan antara Motivasi dengan Partisipasi menunjukkan adanya koefisien korelasi sebesar 0,462 dengan angka signifikansi (two tailed test) sebesar 0,028. sehingga dapat dikatakan mempunyai korelasi yang signifikan pada level 0,01. Ini menggambarkan bahwa motivasi mereka tinggi dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap partisipasi, karena lebih tinggi dari 0.00. Dari gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin besar motivasi mereka, akan semakin besar partisipasinya
- Hubungan antara sikap dengan partisipasi pada tabel tersebut menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,238, dengan angka signifikansi (two tailed test) sebesar 0,028. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa antara sikap dengan partisipasi ada korelasi positif dan signifikan pada level 0,05 two tailed. Dengan adanya hubungan yang demikian, bahwa sikap mempunyai pengaruh yang besar terhadap partisipasi, dan dapat dikatakan bahwa semakin besar sikap responden, akan semakin besar tingkat partisipasinya.
- Hubungan antara sosial ekonomi dengan motivasi, pada tabel tersebut menunjukkan angka korelasi - 0,18 dengan angka signifikansi sebesar 0,865, sehingga masih menunjukkan adanya hubungan yang positif, walaupun tidak cukup besar. Sehingga walaupun tingkat sosial ekonominya semakin tinggi, belum tentu tingkat motivasinya menjadi semakin besar.

- Hubungan antara sosial ekonomi, dengan sikap masih menunjukkan adanya hubungan yang positif, dan lebih besar dibanding dengan hubungan antara sosial ekonomi dengan motivasi, karena angka korelasi menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,133, dengan angka signifikansi sebesar 0,220. Korelasi tersebut positif, namun belum cukup kuat, dalam arti bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonominya, dapat meningkatkan sikap mereka terhadap kegiatan, namun masih lemah..
- Hubungan antara motivasi dengan sikap, menunjukkan adanya hubungan yang positif yaitu sebesar 0,149 dengan angka signifikansi menunjukkan angka 0,186. Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi motivasi mereka, akan semakin tinggi sikap mereka atau sebaliknya, semakin baik sikap mereka, menunjukkan bahwa mereka mempunyai motivasi yang tinggi, walaupun masih belum terlalu kuat, namun menunjukkan adanya korelasi yang positif.

Dari hasil analisis mengenai hubungan antar variabel pada tabel tentang hubungan antar variabel, , maka dapat dilihat mengenai tingkatannya sebagaimana terlihat dalam tabel Kendall's W Test sebagai berikut

Tabel 4.106

RANKING KENDALL's W. TEST

	Mean Rank
SOSIAL EKONOMI	1.73
Partisipasi	1.51
MOTIVASI	3.53
SIKAP	3.24

Dari hasil analisis mengenai korelasi antar variabel yang terdapat pada tabel sebelumnya, pada tabel 4.106, dapat dilihat mengenai ranking Kendall's W Test, bahwa yang tertinggi adalah motivasi dengan hasil mean sebanyak 3,53, kemudian variabel sikap dengan mean 3,24. . Sedangkan sosial ekonomi mencapai 1,73

Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa faktor motivasi menjadi variabel yang paling dominan disamping sikap. Dengan adanya motivasi yang tinggi, sikap mereka akan berubah, yang tadinya belum berpartisipasi, akan berpartisipasi, sedang yang sudah berpartisipasi, akan meningkatkan partisipasinya. Sedangkan faktor Sosial ekonomi tidak mencukupi untuk dapat mempengaruhi partisipasi, artinya orang yang tingkat sosialnya tinggi belum tentu partisipasinya tinggi.

Guna mengetahui hubungan bersama-sama antara sosial ekonomi, motivasi dan sikap dengan partisipasi maka akan diuji dengan teknik Konkordansi Kendall's (W) Hasil perhitungan dapat terlihat pada tabel 4.1098 berikut .

Tabel 4.107

KONKORDANSI KEDALL's

Test Statistics	
N	80
Kendall's W(a)	.793
Chi-Square	190.247
df	3
Asymp. Sig.	.000
a Kendall's Coefficient of Concordance	

Hasil perhitungan di atas, memperlihatkan bahwa nilai koefisien korelasi Kendall's adalah 0,796. Apabila dilihat antara nilai Chi Square adalah sebesar 190,247 dan harga tabel untuk perhitungan ini adalah sebesar 3, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosial ekonomi, motivasi dan sikap secara bersama-sama secara signifikan berhubungan dengan partisipasi.

Tabel 4.108

MODEL SUMMARY

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.403(a)	.163	.130	.63	.163	4.919	3	76	.004

a Predictors: (Constant), SIKAP, SOS EK, MOTIVASI

Sebagaimana terlihat pada tabel 4.108 ketiga variabel independen yaitu Sosial Ekonomi, Motivasi dan Sikap secara bersama-sama signifikan berhubungan dengan partisipasi. Sedangkan pengaruhnya dapat dilihat pada koefisien determinasi yaitu sebesar 0,130, dan apabila diprosentase sebesar 13 % artinya pengaruh variabel independen tersebut lebih kecil dibanding dengan pengaruh dari faktor faktor atau model di luar variabel yang diteliti.

#### D. DISKUSI

Berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Grindle, bahwa dalam melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi, yang meliputi salah satunya adalah kepatuhan dan daya tanggap, yang hampir sama dengan model Meter dan Horn yaitu ada pengaruh kondisi sosial, sikap pelaksana dan sumberdaya. Juga menurut DC Korten 1988 : 241) bahwa antara penerima program (masyarakat) pemberi bantuan dan organisasi harus ada kesesuaian yang saling mempengaruhi. Keberhasilan program tersebut dipengaruhi oleh adanya kepatuhan dan daya tanggap berupa partisipasi masyarakat dalam hal ikut menyekolahkan anaknya, sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Partisipasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang cukup banyak, antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena pendidikan memerlukan biaya. Disamping itu, motivasi memegang peranan untuk mengubah sikap negatif menjadi sikap yang positif. Dimana seseorang mempunyai motivasi yang tinggi, mereka akan bersikap positif, dan sikap positif tersebut mendorong mereka untuk berpartisipasi

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hubungan variabel sosial ekonomi (X1) dengan partisipasi (Y) menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,024, yang berarti ada hubungan positif, tetapi masih sangat lemah karena kurang dari 0,05. Sedangkan antara sosial ekonomi (X1) dengan motivasi (X2) terdapat korelasi - 0,018 yang menunjukkan bahwa sosial ekonomi mempunyai hubungan dengan motivasi walaupun lemah, artinya bahwa peningkatan sosial ekonomi, tidak secara

otomatis meningkatkan motivasi. Sosial ekonomi tidak mempunyai hubungan yang signifikan, hal ini dimungkinkan . Dari hasil pengamatan dilapangan bahwa ternyata yang kaya belum tentu mau menyekolahkan anaknya, bila tidak mempunyai motivasi yang tinggi, sedangkan yang miskin bila mempunyai motivasi yang tinggi, mereka akan menyekolahkan anaknya.

Begitu pula hubungan (X1) dengan sikap (X3) menunjukkan koefisien korelasi 0,133, menunjukkan ada hubungan yang positif,, namun masih lemah, artinya bila sosial ekonomi semakin tinggi, sikap mereka akan positif, namun masih kecil.

Antara variabel Motivasi (X2) dengan partisipasi (Y), terdapat koefisien korelasi sebesar 0,462 yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan, artinya semakin tinggi motivasi mereka, akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya Dari motivasi yang tinggi, mereka akan terdorong untuk mengikuti program

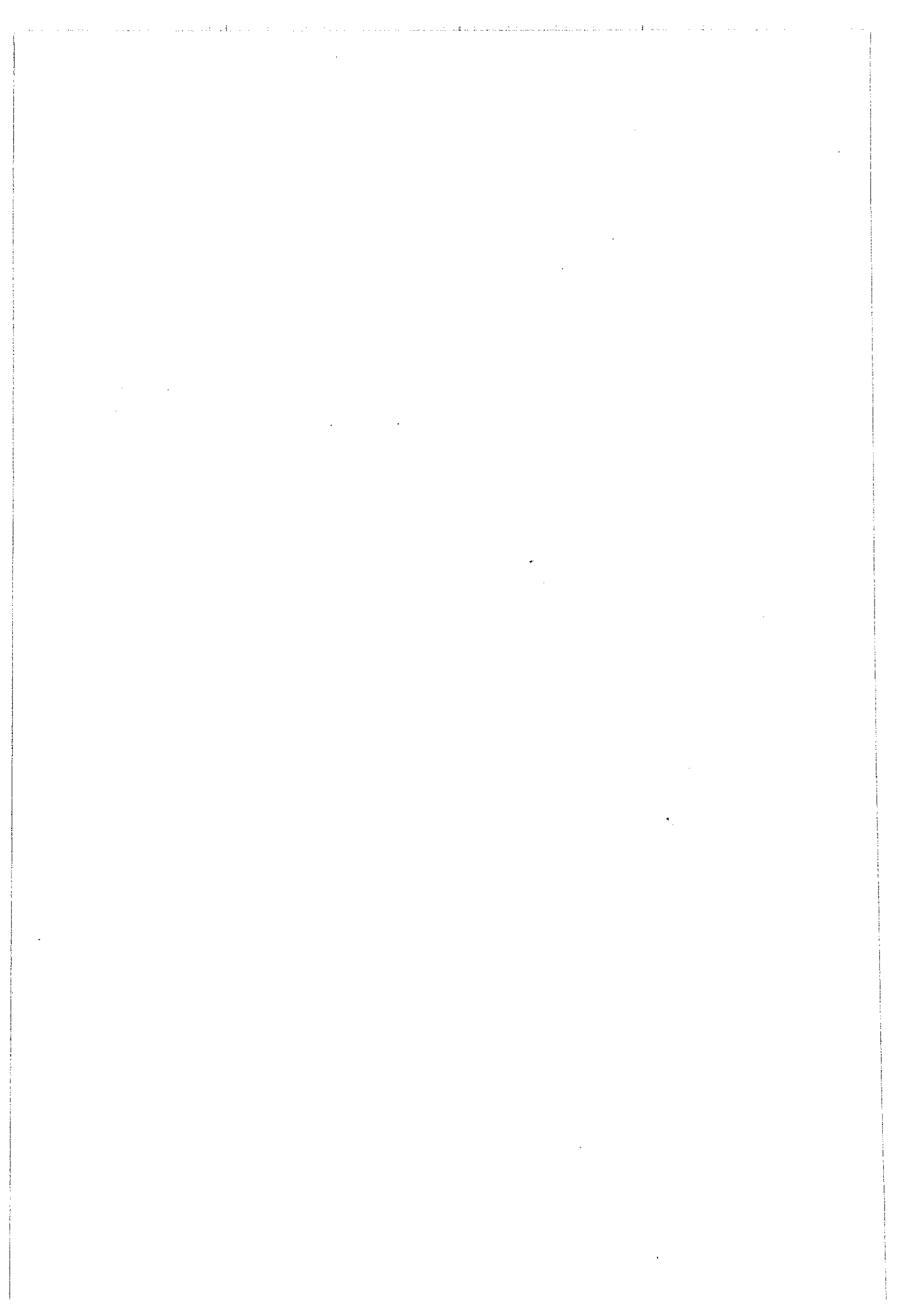
Adapun hubungan antara motivasi (X2) dengan sikap (X3) terdapat koefisien korelasi sebesar 0,149. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara motivasi dengan sikap, dan semakin tinggi motivasi mereka, akan semakin tinggi pula sikap

Hubungan antara variabel sikap (X3) dengan partisipasi (Y) terdapat koefisien korelasi sebesar 0,238, ini menunjukkan bahwa hubungan antara sikap dengan partisipasi, signifikan, artinya semakin tinggi sikap mereka, akan semakin tinggi tingkat partisipasinya. Dari temuan tersebut, variabel yang berpengaruh

terhadap partisipasi adalah variabel motivasi, kemudian variabel sikap. Sedangkan sosial ekonomi kurang mempunyai pengaruh terhadap partisipasi.

Sedangkan Konkordansi Kendall, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar sebesar 0,796 dan Chi square sebesar 190,247, uji signifikansi ketiga variabel harga chi square sebesar df 3, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel independen tersebut mempunyai korelasi dengan partisipasi, dengan koefisien determinasi sebesar 0,130 apabila dilakukan perhitungan persentase, maka pengaruh bersama-sama adalah sebesar 13 %, sedangkan sisanya sebesar 87 % adalah faktor faktor di luar model, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen terpilih tidak cukup kuat untuk mempengaruhi partisipasi, terutama pada variabel sosial ekonomi. Implikasi dari temuan tersebut, perlu pula dikaji variabel lain selain ketiga variabel tersebut, yang dapat mempengaruhi partisipasi,

Apabila ketiga variabel itu akan digunakan untuk meningkatkan partisipasi, maka yang digarap adalah pembentukan sikap dan pemberian motivasi agar mereka secara sadar mengikuti program Wajib Belajar dengan cara menyekolahkan anaknya, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat maupun peningkatan kinerja dari tim Koordinasi Wajib Belajar, dengan diadakan sosialisasi secara terus menerus. Dan dibentuk Pokja yang tugasnya secara tetap pada daerah binaan, agar dapat mengetahui perkembangannya.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat partisipasi yang dipengaruhi banyaknya faktor-faktor. Tingkat Partisipasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang oleh penulis berasumsi bahwa faktor Sosial Ekonomi, Motivasi dan Sikap adalah faktor yang dominan.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka kerangka teori yang dibangun dalam penelitian ini, dilakukan analisis dan penelitian di lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesener dan dilengkapi dengan wawancara, yang didistribusikan pada responden yaitu orang tua yang mempunyai anak usia sekolah ( 7 – 15 tahun) di 5 (lima) Desa Kecamatan Tanjung. Kemudian data ordinal yang terkumpul di olah dengan menggunakan uji statistik Rank Kendall's untuk menguji adanya hubungan antar variabel penelitian.

Hasil pengujian dari ketiga variabel bebas ( X ) dengan variabel tergantung (Y) dengan rumus rank Kendall's, terbukti mempunyai koefisien korelasi yang signifikan, dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel sosial ekonomi dengan variabel partisipasi, koefisien korelasi Kendall's Tau-b sebesar 0,024 dengan tingkat kecocokan normal sebesar 0,830 dan tingkat signifikansi sebesar 95 %, setelah dikonsultasikan dengan tabel kritis, dapat diinterpretasikan bahwa sosial ekonomi mempunyai pengaruh

positif terhadap tingkat partisipasi keberhasilan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung, namun masih lemah karena dibawah 0,05. Atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi, dapat diterima.

2. Terdapat hubungan positif signifikan antara variabel motivasi dengan variabel partisipasi, koefisien korelasi Kendall's Tau-b sebesar 0,462 dan diperoleh approximation T (b) sebesar 4.399 dengan tingkat signifikansi 95 % dengan dua ekor, dan setelah dikonsultasikan dengan tabel kritis, dapat diinterpretasikan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara Motivasi dengan partisipasi. Semakin tinggi motivasi, akan semakin tinggi tingkat partisipasi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan antara motivasi dengan partisipasi ada hubungan positif, dapat diterima.
3. Terdapat hubungan positif signifikan antara variabel sikap dengan partisipasi. Koefisien korelasi Kendall's Tau-b sebesar 0,238 , approximation T (b) diperoleh angka 2,839 dengan derajat signifikansi 0,005, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sikap mempunyai pengaruh dan ada hubungan positif yang signifikan terhadap partisipasi. Semakin tinggi sikap mereka, akan semakin tinggi tingkat partisipasi terhadap keberhasilan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.
4. Koefisien konkordansi Kendall's sebesar 0,793 dengan tingkat kepercayaan 0,005 , uji Chi Square hitung 190,247, setelah

dikonsultasikan dengan chi Square tabel diperoleh angka 3, artinya bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara sosial ekonomi, motivasi, sikap dengan partisipasi terhadap keberhasilan Wajib Belajar di Kecamatan Tanjung, tidak dapat diterima.

5. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0,130 mengandung arti bahwa pengaruh sosial ekonomi, motivasi dan sikap, terhadap partisipasi hanya sebesar 13 % sedangkan faktor-faktor di luar ketiga variabel tersebut sebesar 87 % yang dapat mempengaruhi partisipasi tidak diuji, sehingga diperlukan uji terhadap faktor-faktor tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan, terutama dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam rangka keberhasilan Wajib Belajar, sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, bahwa motivasi menempati ranking yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi partisipasi, maka dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat perlu diberikan motivasi berupa penyuluhan secara intensif, maupun adanya contoh-contoh dari tokoh masyarakat yang menyekolahkan anaknya, melalui sosialisasi Gerakan Wajib Belajar secara terus menerus dan membentuk sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala

2. Perlu ditanamkan rasa kebanggaan terhadap orang tua yang mempunyai anak yang sukses sehingga dapat ditiru oleh kelompok masyarakat yang motivasinya masih kurang, sehingga mereka akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Wajib Belajar dengan menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi
3. Menanamkan sikap yang positif kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, serta diadakan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, agar mereka secara sadar dan sukarela berpartisipasi untuk mendukung keberhasilan Wajib belajar.
4. Bagi perusahaan ataupun pengusaha, diharapkan tidak menerima tenaga kerja dari lulusan SD, dan bila ternyata menermia, harus diberi sanksi. Karena hal tersebut sampai saat ini belum pernah dilakukan, maka perlu disosialisasikan pemikiran ke arah itu.
5. Dikarenakan faktor Sosial ekonomi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi partisipasi, maka disarankan kepada peneliti yang meneliti masalah tersebut, perlu memperhatikan faktor faktor di luar ketiga variabel tersebut, yang jumlahnya cukup banyak, sehingga hasil kajian akan lebih terjamin validitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Akhmadi dan Nur Uhbiyati, 1991, *Ilmu Pendidikan*, Cetakan Pertama Rineka Cipta, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1989 *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Rineka Karya, Jakarta
- Gibson, James L, 1984 *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ihalauw, John,JOI, 1996, *Bangunan Teori Universitas Kristen Satya Wacana* , Salatiga
- Koentjaraningrat, 1991, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Jakarta
- , 1995, *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*, Gramedia Jakarta
- Korten David C & Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Muhamad Surya, 2001, *Bahan Seminar Nasional Otonomi Pendidikan*, Jakarta
- Munandir, 2001, *Ensiklopedia Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang
- Manasse Malo dan Sri Trisnoningtias, 2000, *Metode Penelitian Masyarakat*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Nasutioan dan Thomas, 1988, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi,Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara , Bandung
- Nugroho, Djuzali Alimursid, Abuzar A, 1985; *Rumus-Rumus Statistik Serta Penerapannya*, Cetakan pertama, CV Rajawali, Jakarta.
- Robins, Stephen P, 1995 *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi Aplikasi*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Sanapiah Faisal, 1982 *Metodologi Penelitian Pendidikan* (terjemahan dari buku : Research in Education, Third edition, oleh John W. Best), Usaha Nasional, Surabaya
- Sugiyeno, 1987, *Metode Penelitian Administrasi*, PT Alfabeta, Bandung

Suyamto, 1992, *Refleksi Budaya Jawa Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Effhar, Semarang

Sutrisno Hadi, ,2000, *Metodologi Research*, Penerbit Andi Yogyakarta.

Tadjuddin Nuraly, Mochi, 2001, *Peranan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar*, Bahan Semiloka, Semarang

Yatim Riyanto, 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cetakan Kedua, SIC, Surabaya

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2002, *Buku Pedoman Penyusunan Tesis*, Semarang

Proyek Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, 1999/2000, *Intisari Hasil Pemantauan Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar*, Menko Kesra dan Taskin, Jakarta

Tim Koordinasi Wajib Belajar, *Hasil Evaluasi Pelaksanaan Wajar Dikdas di Kab Brebes*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Dharma Bakti, Jakarta